

**YAHUDI DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KONFLIK PALESTINA
ANALISIS TEMATIK DAN HISTORIS**



Oleh :

Didik Suprastowo

10005109

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Master Of Arts In Islamic Studies (MAIS)**

**PROGRAM STUDI ISLAMIC STUDIES
PROGRAM PASCASARJANA
INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY**

2026

LEMBAR PENGESAHAN
YAHUDI DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
KONFLIK PALESTINA
ANALISIS TEMATIK DAN HISTORIS

Didik Suprastowo

10005109

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar *Master of Arts in Islamic Studies*
Program Islamic Studies

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis

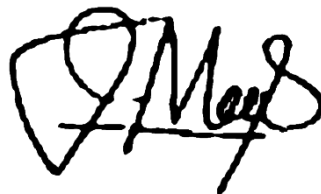
Supervisor,



Dr. Lukman Sumarna, M.Pd.

Mengetahui

Assistant Head Of Departement
Islamic Studies and Arabic Languge



Dr. Mega Satria Nurul Falah S.S MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirrahmanirrahim. Saya, mahasiswa International Open University (IOU) sebagai berikut ini :

Nama : Didik Suprastowo
NIM : 10005109
Program Studi : *Master of Arts in Islamic Studies*

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Indonesia, 05 Januari 2026



Didik Suprastowo

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pada program studi yang penulis tempuh di International Open University. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengkaji secara mendalam gambaran Al-Qur'an terhadap kaum Yahudi (Bani Israil) serta relevansinya dengan konflik Palestina-Israel melalui pendekatan tafsir tematik dan kajian historis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Al-Qur'an serta kajian konflik kontemporer di Timur Tengah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan ilmiah, masukan, dan koreksi yang diberikan selama proses penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika International Open University yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik selama masa studi.

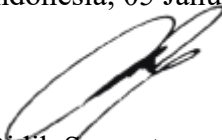
Selanjutnya, penulis bersyukur kepada Allah kemudian mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para dosen dan staf Internasional Open University (IOU) dan secara khusus pada Dr. Lukman Sumarna, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Segenap keluarga dan secara khusus Ibunda dan Intan Lisdiana Nur Pratiwi, S.Si selaku istri yang memberikan banyak bantuan dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

3. Setiap guru, dosen, ustadz dan masyaikh yang pernah memberikan ilmu pada penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, yang secara langsung dan tidak langsung turut berkontribusi memperkaya cakupan wawasan dalam tesis ini.
4. Teman-teman seperjuangan di setiap jenjang pendidikan dan majelis kajian yang senantiasa mengobarkan semangat juang guna menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi metodologi maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang studi Al-Qur'an dan kajian konflik Palestina–Israel, serta memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik secara umum.

Indonesia, 05 Januari 2026



Didik Suprastowo

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PANDUAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	10
5. Batasan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Kajian Tafsir Tentang Yahudi	13
2. Kajian Historis Yang Relevan	16
3. Posisi Penelitian	25
BAB III. METODE PENELITIAN	28
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
2. Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Teknik Analisis Data	29
5. Sistematika Penulisan	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
1. Deskripsi Objek Penelitian	32
2. Hasil	33
3. Pembahasan	36

a. Asal Usul Nasab	37
b. Sejarah Yahudi	47
c. Masuknya Bangsa Yahudi ke Palestina	72
d. Lahirnya Zionisme dan Awal Imigrasi Yahudi Modern	76
e. Mandat Inggris dan Deklari Balfour	79
f. Menuju 1948 dan Nakba	82
g. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Negara Israel di Era Kontemporer	87
h. Pengusiran Paksa dan Penghancuran Rumah	90
i. Ketidakmampuan Mendapatkan Izin Bangunan	97
j. Serangkaian Tindakan Tidak Berperikemanusiaan Zionis Yahudi.....	100
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	123
1. Simpulan	123
2. Saran	124
BAB VI. DAFTAR PUSTAKA	126

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Penyusunan transliterasi bahasa Arab ke Latin dalam tesis ini mengacu pada keputusan dari Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan di dalam bahasa Arab yang terdapat dalam sistem penulisan Arab ditandai oleh huruf, dalam Transliterasi ini beberapa ditandai huruf dan sebagian diwakili oleh simbol, sementara sebagian lainnya diwakili dengan karakter serta simbol sekaligus. Berikut adalah daftar huruf-huruf Arab beserta Transliterasinya menggunakan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, mirip dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong serta vokal ganda atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan simbol atau tanda. Transliterasinya dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

كر ذ - žukira

يذهب - suila سئل - yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى .	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c. Kata Sandang

Aturan penggunaan kata sandang al- (ال) bervariasi bergantung pada huruf yang mengikuti.

- Apabila mengikuti huruf Qamariyah: Ditransliterasikan berdasarkan cara bacanya, yaitu al-. Instance: Al-Qur'an.
- Apabila diikuti huruf Syamsiyah: Huruf lam (l) digabungkan dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya. Contoh: Matahari.

B. Singkatan

Dalam penulisan tesis ini, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah ta'āla, serta utusan-Nya Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam, penulis dengan sepenuh hati tidak mencantumkan

singkatan SAW dan SWT, tetapi mencatatnya secara lengkap. Selain itu, beberapa akronim yang terdapat dalam referensi dan daftar pustaka juga perlu dijelaskan agar kejelasan dan konsistensi penulisan terjamin. Singkatan ed./eds. mengacu pada editor dari buku atau sumber yang disebutkan, sedangkan et al. digunakan untuk mengindikasikan 'dan lain-lain' atau 'dan rekan-rekan' dalam konteks penulis buku atau karya ilmiah dengan lebih dari dua penulis. Vol. adalah singkatan dari volume, yang menunjukkan jumlah jilid buku atau periode terbit karya ilmiah seperti jurnal. Sementara itu, No. adalah singkatan dari nomor, yang merujuk pada angka yang menunjukkan penerbitan karya ilmiah seperti jurnal, majalah, dan sejenisnya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas gambaran Al-Qur'an terhadap kaum Yahudi (Bani Israil) serta relevansinya dengan konflik Palestina-Israel. Kajian ini bertujuan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang Bani Israil berdasarkan tafsir tematik dan mengaitkannya dengan dinamika historis konflik Palestina-Israel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maudhu'i dan historis-kritis, dengan sumber utama Al-Qur'an, tafsir klasik dan pertengahan, serta sumber pendukung dari kajian sejarah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik Al-Qur'an terhadap Bani Israil bersifat perilaku dan moral, bukan generalisasi etnis, serta memiliki relevansi dengan praktik ideologi Zionisme dalam konteks pendudukan dan penindasan terhadap bangsa Palestina.

Kata kunci: Al-Qur'an, Bani Israil, Palestina-Israel, Tafsir Tematik.

ABSTRACT

This study examines the Qur'anic portrayal of the Jews (Bani Israil) and its relevance to the Palestine-Israel conflict. The research aims to analyze Qur'anic verses concerning Bani Israil through a thematic (maudhu'i) tafsir approach and to relate them to the historical dynamics of the Palestine-Israel conflict. This study employs a qualitative methodology using thematic and historical-critical approaches, with the Qur'an as the primary source, supported by classical and medieval Qur'anic exegesis as well as modern historical studies. The findings indicate that the Qur'anic critique of Bani Israil is behavioral and moral in nature rather than an ethnic generalization, and that it bears relevance to the practices of Zionist ideology in the context of occupation and oppression of the Palestinian people.

Keywords: Qur'an, Bani Israil, Palestine-Israel, Thematic Tafs

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Di dalamnya terkandung berbagai prinsip kehidupan yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum, serta kisah-kisah umat terdahulu yang mengandung pelajaran (*'ibrah*) bagi orang-orang yang beriman. Kisah-kisah tersebut bukanlah sekadar narasi historis, melainkan bagian integral dari pesan ilahi yang bersifat universal dan abadi. Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (Yusuf: 111)

Ayat ini menegaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an bertujuan memberikan pelajaran dan bimbingan, bukan semata sebagai catatan sejarah. Salah satu kisah yang paling banyak diulang dalam Al-Qur'an adalah tentang Bani Israil, yakni keturunan Nabi Ya'qub *'alaihissalam*, yang kemudian dikenal sebagai kaum Yahudi. Kisah mereka disebut lebih dari empat puluh kali dengan berbagai konteks dan dimensi: keimanan, keingkaran, sejarah kenabian, politik, hingga sifat moral dan spiritual mereka. Banyaknya penyebutan ini menunjukkan pentingnya memahami karakter dan perjalanan mereka, sebab di dalamnya terdapat pelajaran besar bagi umat Islam.

Secara etimologis, kata *Isra'il* berarti “hamba Allah”, sebuah gelar yang disematkan kepada Nabi Ya'qub *'alaihissalam*. Maka, Bani Israil berarti keturunan Ya'qub. Mereka adalah umat yang pada mulanya mendapat banyak karunia dari Allah.

Mereka memiliki banyak nabi di antara mereka, di antaranya Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, dan Isa ‘*alaihimussalam*. Namun, seiring waktu mereka berulang kali mengingkari perjanjian dengan Allah, menyimpang dari wahyu, bahkan membunuh sebagian nabi yang diutus kepada mereka. Allah berfirman:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

“Apakah setiap kali datang kepadamu seorang rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian mereka kamu dustakan dan sebagian (yang lain) kamu bunuh?” (Al-Baqarah: 87)

Sejak masa Nabi Musa ‘*alaihissalam*, sejarah Bani Israil penuh dengan kontradiksi antara nikmat besar yang mereka terima dan pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Mereka diselamatkan dari kekejaman Fir‘aun, disaksikan dengan mukjizat besar seperti terbelahnya laut, diturunkan manna dan salwa, namun tetap kufur dan menuntut berhala untuk disembah. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَنُتَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: ‘Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembah. Maka bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu; yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu.’” (Al-Baqarah: 54)

Ayat-ayat seperti ini memperlihatkan tabiat mendasar kaum Yahudi yang digambarkan Al-Qur’an: pembangkang, sombong, cinta dunia, dan suka menyelewengkan wahyu. Ibnu Katsir dalam Tafsir *al-Qur’an al-‘Azhim* menegaskan bahwa pengulangan kisah mereka adalah bentuk peringatan agar umat Muhammad ﷺ tidak terjerumus dalam kesalahan serupa. Menurut beliau, Allah ﷻ menuturkan kisah Bani Israil secara berulang-ulang karena di dalamnya terdapat hukum, pelajaran moral, dan tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ yang sangat besar.

Istilah Yahudi sendiri berasal dari Yahuda, salah satu dari dua belas anak Ya‘qub. Awalnya, kata ini hanya menunjukkan identitas kesukuan. Namun, setelah zaman Nabi Musa, ia menjadi identitas keagamaan bagi pengikut ajaran Taurat. Dalam perkembangan berikutnya, istilah “Yahudi” tidak lagi semata merujuk pada keturunan, melainkan pada kelompok yang mengklaim diri sebagai pewaris risalah Musa meskipun telah menyimpang dari ajarannya. Dalam Al-Qur’an, istilah Yahud disebut sebanyak delapan kali, seringkali dengan konotasi kecaman terhadap sifat mereka yang congkak, pengkhianat, dan menolak kebenaran.

Para ulama salaf seperti Ibnu Jarir Ath-Tabari (2000), al-Baghawi (2002), dan Ibnu Katsir (1999) menafsirkan bahwa kisah Bani Israil dalam Al-Qur’an bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan *mirror of civilization*, cermin yang menggambarkan kecenderungan manusia bila jauh dari wahyu. Ibnu Taimiyyah dalam *al-Jawab as-Sahih li Man Baddala Din al-Masih* menyebutkan bahwa permusuhan Yahudi terhadap umat Islam bersumber dari kedengkian mereka karena kenabian dan risalah berpindah dari keturunan Israil (Ya‘qub) kepada keturunan Ismail (Arab). Sejak saat itu, kebencian mereka bersifat ideologis dan terus berlanjut hingga akhir zaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” (Al-Baqarah: 120)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan mereka terhadap Islam bukan sekadar karena perbedaan sosial atau politik, tetapi karena perbedaan ideologi dan akidah. Mereka tidak akan rela terhadap umat Islam sampai kaum Muslimin meninggalkan agamanya dan mengikuti cara hidup mereka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini adalah peringatan abadi agar umat Islam tidak mencari keridhaan mereka, karena keridhaan itu hanya bisa diperoleh dengan meninggalkan iman.

Salah satu tabiat penting yang disebutkan Al-Qur'an tentang kaum Yahudi adalah kebiasaan mereka mengubah wahyu dan menyelewengkan hukum Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

“Mereka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya.” (Al-Ma'idah: 13)

Ibnu Jarir ath-Thabari (2000) menjelaskan bahwa tahrif yang dimaksud bukan hanya perubahan lafaz, tetapi juga perubahan makna. Mereka memanipulasi ayat untuk membenarkan keinginan hawa nafsu dan kepentingan duniawi (ath-Thabari, 2000). Selain itu, mereka dikenal mencintai dunia dan takut mati, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

“Dan sungguh engkau akan mendapati mereka sebagai orang yang paling tamak terhadap kehidupan (dunia), bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik.” (Al-Baqarah: 96)

Kecintaan terhadap dunia dan ketakutan terhadap kematian menjadikan mereka berani melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Tabiat ini tetap terlihat dalam perilaku politik modern bangsa Yahudi, terutama dalam konteks penjajahan Zionis terhadap Palestina.

Sejarah menunjukkan bahwa setelah masa Nabi Isa 'alaihissalam, banyak kaum Yahudi yang menolak kerasulan beliau dan berusaha menyalibnya. Dalam Al-Qur'an Allah ﷻ berfirman bahwa mereka membanggakan perbuatan itu:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

“Dan karena ucapan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah.’” (An-Nisa': 157)

Namun Allah ﷻ menegaskan bahwa mereka tidak berhasil membunuhnya. Sikap permusuhan terhadap para nabi inilah yang menjadi karakter abadi mereka. Nabi Muhammad ﷺ pun tidak luput dari makar kaum Yahudi. Di Madinah, mereka melakukan berbagai tipu daya, menyebarkan fitnah, melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh beliau melalui racun yang dimasukkan ke makanan. Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* mencatat bahwa peristiwa tersebut menjadi bukti nyata kebencian kaum Yahudi terhadap risalah Islam sejak awal (Ibnu Hajar, 2005).

Dalam konteks modern, perilaku dan tabiat yang digambarkan Al-Qur'an itu tampak nyata dalam ideologi dan praktik politik Zionisme. Gerakan Zionisme yang didirikan oleh Theodor Herzl pada tahun 1897 bukan hanya gerakan politik untuk membentuk negara bagi orang Yahudi, tetapi juga proyek ideologis yang berakar pada kepercayaan teologis bahwa tanah Palestina adalah “tanah yang dijanjikan” bagi mereka. Padahal, dalam perspektif Islam, janji Allah ﷻ hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan bagi orang-orang zalim. Allah ﷻ berfirman:

قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“(Allah) berfirman: Janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah: 124)

Dengan demikian, klaim teologis Zionisme tidak memiliki legitimasi dalam wahyu yang benar. Justru, pendudukan mereka atas tanah Palestina adalah bentuk kezaliman yang nyata. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, bangsa Palestina menjadi korban penjajahan, pengusiran, dan genosida. Tragedi demi tragedi yang menimpa rakyat Palestina mencerminkan pola kezaliman yang sudah digambarkan Al-Qur'an sejak berabad-abad lalu.

Moshe Machover, seorang filsuf dan intelektual Yahudi asal Israel, mengemukakan kritik tajam terhadap gerakan Zionis modern. Dalam esainya “*An Immoral Dilemma: The Trap of Zionist Propaganda*”, Machover menilai bahwa propaganda Zionis berfungsi sebagai instrumen ideologis untuk melegitimasi

nasionalisme Yahudi secara global. Ia menegaskan bahwa inti ideologi Zionis bertumpu pada gagasan bahwa “semua orang Yahudi di seluruh dunia merupakan satu bangsa” yang memiliki hak historis dan teologis atas tanah (Eretz Yisrael). Menurut Machover, klaim tersebut merupakan “mitos ideologis” yang dikonstruksi untuk mendukung kepentingan politik kolonial Israel dan digunakan secara sistematis dalam wacana internasional (Machover, 2023).

Pandangan ini penting dalam konteks penelitian mengenai Yahudi dalam Al-Qur’an dan relevansinya terhadap konflik Palestina, karena memberikan kerangka analitis tentang bagaimana narasi identitas Yahudi dan konsep “bangsa pilihan” dapat dipolitisasi menjadi bentuk propaganda ideologis yang memengaruhi persepsi global terhadap konflik Palestina.

Dalam artikel pengantar berjudul “*Zionist Ideology and Propaganda*” yang diterbitkan oleh *Institute for Palestine Studies*, dijelaskan bahwa gerakan Zionis sejak awal telah berupaya memproduksi propaganda ideologis yang kuat, baik dalam bentuk material maupun kultural, guna mendukung klaim hak historis atas tanah Palestina serta mengonstruksi narasi sejarah yang menguntungkan bagi kepentingan Zionisme (*Institute for Palestine Studies*, 2023).

Artikel tersebut juga menegaskan bahwa gerakan Zionis “*had to win an ideological war prior to the ground war*” — harus memenangkan perang ideologi sebelum perang fisik — karena sebagai gerakan pemukiman dan kolonial, narasi ideologis menjadi instrumen utama dalam membentuk legitimasi politik dan moral di mata dunia internasional (*Institute for Palestine Studies*, 2023).

Pandangan ini memperlihatkan bahwa propaganda bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan strategi ideologis fundamental dalam proyek kolonial Zionis, yang secara historis berupaya membenarkan pendudukan wilayah Palestina atas dasar konstruksi narasi “kembali ke tanah leluhur”.

Banyak pakar baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim yang menyatakan bahwa proyek Zionisme tidak berhenti pada ide keagamaan atau kultural semata, melainkan berkembang menjadi gerakan politik yang memiliki orientasi ekspansionis dan kolonialis. Proyek ini berupaya membangun hegemoni politik di kawasan Timur Tengah, terutama melalui pembentukan dan perluasan Negara Israel di tanah Palestina.

Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah bagaimana kekerasan, propaganda dan strategi politik memainkan peran dalam konflik. Dalam kajian tentang kolonialisme pemukim, Ali Jong (2018) menulis: *“This exposition draws out how the notion of binary conflict is instrumental in obscuring settler colonial dispossession and Palestinian lived experience.”*. Artinya, narasi “konflik antara dua pihak” sering menyembunyikan realitas bahwa masyarakat Palestina mengalami perampasan ruang dan hak sebagai akibat strategi pemukiman dan kolonisasi wilayah.

Dari perspektif propaganda dan teori konspirasi, B. Muhtadi (2012) dalam studinya menyebut, *“I will examine Media Dakwah ... on how Islamic print media responds to issues related or unrelated to Jewish issues.”* Studi ini menunjukkan bahwa media dalam dunia Islam membentuk persepsi tentang Yahudi dan Zionisme—termasuk propaganda yang bertujuan membingkai musuh atau “yang lain”.

Kemudian terkait dengan strategi politik, ahli geopolitik Rashid Khalidi mengemukakan bahwa, *“The objective is to transform Palestine into the land of Israel. ... Zionism will not succeed in Palestine without doing what they did in New York ... the money they raise in the United States.”* Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana gerakan Zionis memiliki strategi global: penggalangan dana, diplomasi internasional, dan operasi di luar wilayah sebagai bagian dari rencana politiknya.

Menurut Edward Said (1979) dalam *The Question of Palestine*, *“Zionism is a colonial movement that has succeeded in transforming the language of European imperialism into a moral vocabulary of redemption and return.”* Said menjelaskan bahwa gerakan Zionis berhasil mengubah bahasa kolonialisme Eropa menjadi narasi

moral yang tampak religius, seolah-olah proyek pendudukan Palestina merupakan upaya “pembebasan tanah suci”. Padahal, pada hakikatnya, hal itu merupakan bentuk kolonialisme baru yang menyingkirkan penduduk asli.

Para mufasir, seperti Ibnu Katsir (1999), menjelaskan bahwa Allah ﷻ mengulang kisah pengusiran kaum Yahudi Bani Nadhir dari Madinah dalam Surah al-Hasyr untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang akibat kezaliman mereka. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama... Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (Al-Hasyr: 2)

Ayat ini menjadi relevan ketika melihat realitas modern: penjajahan Israel atas tanah Palestina adalah kelanjutan dari tabiat lama mereka, pengkhianatan, kesombongan, dan kezaliman terhadap umat beriman.

Banyak kajian Muslim modern menegaskan bahwa Al-Qur’an menyajikan gambaran yang plural terhadap kaum Yahudi — bukan semata-mata negatif, tetapi juga kritis terhadap aspek keagamaan, sosial dan historis mereka. Misalnya, menurut Isma’il Raji al-Faruqi (1980): *“Zionism was fundamentally unjust, as it sought to displace Palestine’s indigenous population and seize their land, resources, and homes.”*

Memahami karakter dan tabiat kaum Yahudi melalui kacamata Al-Qur’an menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Sebab, konflik antara Israel dan Palestina bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga pertempuran ideologis antara kebenaran dan kebatilan, antara keimanan dan kekufuran, antara keadilan dan kezaliman. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap perspektif wahyu, umat Islam

akan mudah tertipu oleh narasi-narasi global yang menutupi hakikat sebenarnya dari konflik tersebut.

Laporan PBB melalui ESCWA (2022) menyimpulkan bahwa kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina menunjukkan pola apartheid, termasuk diskriminasi sistematis, perampasan tanah, pembatasan mobilitas, dan kekerasan negara. Temuan ini sejalan dengan laporan Amnesty International (2022) dan Human Rights Watch (2021) yang mendokumentasikan pembunuhan warga sipil, penghancuran rumah, serta pemindahan paksa penduduk Palestina sebagai bagian dari kebijakan negara Israel.

Selain itu, liputan investigatif media internasional seperti Al Jazeera dan BBC News secara konsisten melaporkan praktik penghancuran rumah di Tepi Barat, blokade Gaza, serta penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional terhadap warga sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak (BBC News, 2023; Al Jazeera, 2024). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa praktik penindasan yang terjadi bukanlah insidental, melainkan bagian dari kebijakan sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji secara komprehensif bagaimana Al-Qur'an menggambarkan karakter, perilaku, dan ideologi kaum Yahudi, serta bagaimana tafsir para ulama salaf menyingkap makna-makna di balik ayat-ayat tersebut. Kajian ini juga berupaya mengaitkan pemaparan Al-Qur'an dengan fakta sejarah dan realitas kontemporer, khususnya terkait konflik berkepanjangan di Palestina.

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa sifat dan perilaku Yahudi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti pengkhianatan, kesombongan, manipulasi wahyu, dan cinta dunia. Bukan hanya fenomena masa lalu, tetapi masih tampak dalam perilaku politik dan ideologis mereka pada masa kini. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami bahwa Al-Qur'an bukan sekadar kitab sejarah, tetapi petunjuk abadi yang menyingkap realitas manusia sepanjang masa.

Maka, kajian bertema “Yahudi dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Konflik Palestina: Analisis Tematik dan Historis” menjadi sangat urgen. Di tengah derasnya propaganda global yang sering memutarbalikkan fakta, penelitian ini berusaha meneguhkan kembali pandangan Islam berdasarkan wahyu yang sahih dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Melalui pendekatan tematik (maudhu‘i) dan historis, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kesinambungan antara tabiat yang Allah ﷻ sebutkan dalam Al-Qur’an dengan perilaku politik kaum Yahudi sepanjang sejarah hingga masa kini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran Al-Qur’an tentang karakter dan perilaku kaum Yahudi berdasarkan penafsiran mufasir?
- b. Apa faktor historis dan teologis yang melatarbelakangi konflik Yahudi–Palestina?
- c. Bagaimana relevansi gambaran Al-Qur’an tersebut dengan ideologi dan praktik Zionisme modern terhadap Palestina?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan-tujuan ditulisnya tesis ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis gambaran Al-Qur’an tentang karakter dan perilaku kaum Yahudi berdasarkan penafsiran mufasir.
- b. Untuk mengkaji faktor-faktor historis dan teologis yang melatarbelakangi konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Palestina.
- c. Untuk menjelaskan relevansi gambaran Al-Qur’an tersebut dengan ideologi dan praktik Zionisme modern dalam konteks penjajahan terhadap bangsa Palestina.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam menjelaskan gambaran Al-Qur'an tentang kaum Yahudi dari aspek keimanan, moral, dan sikap mereka terhadap para nabi, sehingga memperkaya kajian tematik (maudhu'i) dalam studi keislaman.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang sifat, karakter, dan tabiat kaum Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam tafsir para ulama seperti Ibn Jarir ath-Tabari, Ibn Katsir, al-Baghawi, dan As-Sa'di sehingga dapat dijadikan rujukan dalam memahami bagaimana Al-Qur'an menggambarkan pola-pola penyimpangan umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Islam masa kini.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengungkap akar historis, teologis, dan ideologis konflik Yahudi–Palestina, dengan merujuk pandangan para pakar dan sejarawan Muslim maupun Barat, sehingga pembaca dapat memahami secara objektif mengapa konflik tersebut berlangsung lama dan kompleks.
- d. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kontekstual tentang relevansi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap realitas perilaku kaum Yahudi modern dan gerakan Zionisme, sehingga umat Islam dapat menilai peristiwa kontemporer secara proporsional berdasarkan manhaj Al-Qur'an dan pemahaman ulama.
- e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan metodologis dalam penerapan pendekatan tematik dan historis pada kajian Al-Qur'an, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode penelitian tafsir yang komprehensif dan aplikatif terhadap isu-isu keumatan kontemporer, khususnya konflik Palestina.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup kajian pada tema Yahudi dalam Al-Qur'an, yang dianalisis melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) dan historis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kaum Yahudi dari aspek keimanan, moral, serta perilaku sosialnya, serta bagaimana gambaran tersebut relevan dengan perilaku kaum Yahudi modern dalam konteks konflik Palestina.

Untuk menjaga fokus dan ketajaman analisis, penelitian ini dibatasi pada penafsiran sejumlah ayat yang secara eksplisit membicarakan kaum Yahudi (Bani Israil), khususnya dalam konteks sikap mereka terhadap wahyu, nabi, serta hubungan sosial dan kemanusiaan dengan umat lain. Ayat-ayat tersebut antara lain terdapat dalam beberapa surat utama, yaitu:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 40–123, yang menguraikan sejarah, janji, dan pengingkaran Bani Israil terhadap perintah Allah ﷻ.
- b. Surah Al-Ma'idah ayat 12–82, yang menyoroti pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian dan pengubahan hukum Allah ﷻ.
- c. Surah Al-A'raf ayat 163–166, tentang pelanggaran mereka terhadap larangan berburu pada hari Sabtu.
- d. Surah Al-Isra' ayat 4–8, yang menjelaskan dua kali kerusakan besar yang dilakukan Bani Israil di muka bumi dan hukuman yang menimpanya.
- e. Surah Al-Hasyr ayat 2–5, yang menggambarkan pengusiran Bani Nadhir dan kehancuran kaum Yahudi karena kesombongan dan tipu daya mereka.

Dalam menganalisis ayat-ayat tersebut, penelitian ini dibatasi hanya pada lima kitab tafsir utama, yaitu:

- a. Tafsir ath-Tabari (*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*) karya Ibn Jarir ath-Tabari (w. 310 H)

- b. Tafsir al-Baghawi (*Ma‘alim at-Tanzil*) karya al-Husain bin Mas‘ud al-Baghawi (w. 516 H),
- c. Tafsir al-Qurtubi (al-Jami li Ahkam al-Quran) karya al-Qurtubi (w. 671 H)
- d. Tafsir Ibn Katsir (*Tafsir al-Qur‘ān al-‘Azhim*) karya Isma‘il bin ‘Umar Ibn Katsir (w. 774 H), dan
- e. Tafsir as-Sadi (Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan) karya Abd al-Rahman as-Sadi (w. 1376 H).

Pembatasan pada kelima tafsir tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian perspektif manhaj salaf dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an, serta agar pembahasan tetap sistematis dan tidak melebar pada interpretasi-interpretasi kontemporer yang bersifat politis atau spekulatif.

Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan tema-tema Al-Qur’an tentang kaum Yahudi dengan isu-isu kemanusiaan dan etika, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kezaliman terhadap bangsa lain, manipulasi hukum, dan pengingkaran terhadap perjanjian — yang semuanya tampak dalam konflik modern antara Yahudi (Zionis Israel) dan bangsa Palestina. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga relevan secara moral dan sosial terhadap realitas dunia Islam kontemporer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Tafsir Tentang Yahudi

Pembahasan mengenai kaum Yahudi atau Bani Israil merupakan salah satu tema yang paling banyak diulang dalam Al-Qur'an. Para mufasir seperti Ibn Jarir ath-Tabari (w. 310 H), al-Baghawi (w. 516 H), Ibnu Katsir (w. 774 H), al-Qurtubi (w. 671 H), dan Abdurrahman as-Sadi (w. 1376 H) memberikan penjelasan luas berdasarkan riwayat-riwayat sahih dari para sahabat dan tabi'in, seperti Ibn 'Abbas, Mujahid, Qatadah, as-Suddi, Ikrimah, dan lainnya. Mereka sepakat bahwa penggambaran Bani Israil dalam Al-Qur'an mengandung pelajaran moral dan peringatan untuk umat Islam, bukan sekadar catatan historis. Ibnu Katsir (1999) menegaskan: "Allah menyebutkan kisah mereka agar umat ini berhati-hati dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan mereka dimurkai." (Tafsir Ibn Katsir, QS al-Baqarah: 40).

Pemilihan tafsir klasik dalam kajian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis dan epistemologis. Tafsir-tafsir tersebut merepresentasikan pemahaman generasi awal Islam yang paling dekat dengan konteks turunnya wahyu, baik dari sisi bahasa, sejarah, maupun transmisi riwayat. Selain itu, karya-karya tafsir periode ini relatif terbebas dari pengaruh ideologi modern dan kepentingan politik kontemporer, sehingga lebih objektif dalam menjelaskan maksud ayat. Oleh karena itu, tafsir klasik dan abad pertengahan dipandang sebagai rujukan utama yang paling kredibel untuk memahami sikap Al-Qur'an terhadap Bani Israil secara normatif dan proporsional.

Salah satu sifat yang sering dijelaskan para mufasir adalah kecenderungan sebagian dari mereka untuk mengubah wahyu dan menyimpangkan firman Allah ﷻ. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Maka apakah kamu (muslimin) sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?” (Al-Baqarah: 75)

Ath-Thabari (2000) menafsirkan ayat ini sebagai kecaman terhadap perilaku segelintir ahli kitab yang mengetahui kebenaran Taurat namun sengaja mengubah maknanya demi kepentingan duniawi, suatu tindakan yang menurut beliau merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian suci.

Sifat lain yang dijelaskan adalah perilaku menyembunyikan kebenaran, terutama terkait ciri-ciri Nabi Muhammad yang tertera dalam kitab mereka. Allah ﷻ berfirman:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya).” (Al-Baqarah: 146)

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa pengenalan para ulama Yahudi terhadap Nabi Muhammad setingkat dengan kepastian seseorang mengenali anak kandungnya sendiri. Namun sebagian mereka menolak karena hawa nafsu dan fanatisme kesukuan. Al-Qur'an juga menggambarkan keberpihakan negatif sebagian mereka terhadap umat beriman, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka.” (Al-Baqarah: 120).

Menurut al-Baghawi (1997), ayat ini menunjukkan bahwa kerelaan sebagian kelompok ahli kitab bukanlah bersifat universal ataupun murni objektif, melainkan

terkait kepentingan ideologis dan keagamaan mereka. Para ulama juga membahas sifat keras hati yang muncul setelah mereka berkali-kali menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Hal ini tergambar dalam firman-Nya:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras.” (Al-Baqarah: 74)

Ath Thabari (2000) menafsirkan bahwa kekerasan hati tersebut merupakan akibat dari seringnya mereka menolak perintah Allah ﷻ, membangkang para nabi, dan menyimpang dari ajaran wahyu, sehingga hati menjadi tertutup dari cahaya kebenaran. Selain itu, para mufasir menyoroti kecenderungan mereka melanggar perjanjian dengan Allah ﷻ. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menyinggung pelanggaran terhadap perintah sabat, kedurhakaan terhadap para nabi, dan upaya membunuh utusan Tuhan. Allah ﷻ berfirman:

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

“Dan (mereka)membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar)” (Ali 'Imran: 112)

Ibnu Katsir (1999) menyatakan bahwa sejarah mencatat banyak nabi dari kalangan Bani Israil yang dibunuh oleh kaumnya sendiri karena membawa risalah yang berseberangan dengan hawa nafsu mereka.

Para mufasir juga menekankan bahwa kritik Al-Qur'an tidak bersifat menyeluruh kepada seluruh komunitas Yahudi, tetapi ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang berbuat zalim. Hal ini ditegaskan dalam ayat:

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

“Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat).” (Ali 'Imran: 113–115),

Ayat ini menunjukkan bahwa tetap ada di antara mereka kelompok yang lurus dan bertakwa.

Lebih jauh, kisah Bani Israil dalam Al-Qur'an dipaparkan secara luas dalam surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-A'raf, dan surah-surah lainnya. Para mufasir menjelaskan bahwa repetisi kisah ini memiliki nilai pedagogis. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang bahaya melanggar perjanjian, fanatisme buta, taklid tanpa ilmu, kecintaan berlebihan pada dunia, dan sifat munafik serta licik dalam sebagian strategi mereka — sifat-sifat yang ditekankan bukan karena identitas etnis mereka, tetapi karena tindakan moral yang salah dan bertentangan dengan perintah Allah ﷻ.

Secara keseluruhan, literatur tafsir klasik mengajarkan bahwa penyebutan Bani Israil dalam Al-Qur'an merupakan cermin bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kisah-kisah tersebut mengandung hikmah moral, nilai korektif, dan peringatan spiritual agar kaum Muslim bersikap jujur, amanah, tunduk kepada wahyu, serta tidak memanipulasi agama demi kepentingan duniawi.

2. Kajian Historis Yang Relevan

Telah banyak kajian atau penelitian mengenai asal-usul konflik Palestina–Israel yang dilakukan oleh para sejarawan, ilmuwan politik, dan peneliti Timur Tengah, baik dari kalangan Barat maupun dari dunia Islam. Kajian-kajian ini umumnya menyoroti akar kolonialisme modern, perkembangan ideologi Zionisme, peran kekuatan besar seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta dinamika internal masyarakat Palestina dalam menghadapi tekanan politik dan militer.

a. Noura Erakat berjudul *Justice for Some* (2019)

Kajian kontemporer yang relevan mengenai Palestina dapat ditemukan dalam karya Noura Erakat, *Justice for Some* (2019). Dalam karyanya, Erakat mengajukan kritik mendasar terhadap cara hukum internasional diterapkan dalam konteks Palestina–Israel. Ia menegaskan bahwa hukum internasional tidak selalu berfungsi

sebagai instrumen keadilan, melainkan sering kali dimanfaatkan secara selektif untuk melegitimasi dominasi kolonial Israel atas Palestina.

Erakat menjelaskan bahwa Israel secara sistematis menggunakan bahasa dan mekanisme hukum internasional—seperti klaim keamanan, status wilayah sengketa, dan pengecualian darurat—untuk membenarkan pendudukan, ekspansi permukiman, dan kekerasan terhadap warga Palestina. Dalam kerangka ini, hukum internasional tidak gagal karena kelemahan normatif, tetapi karena penerapannya dikendalikan oleh relasi kekuasaan global yang timpang. Pendekatan ini menempatkan konflik Palestina–Israel sebagai persoalan kolonialisme pemukim modern yang dilindungi oleh struktur hukum internasional.

Lebih lanjut, Erakat menunjukkan bahwa bangsa Palestina tidak hanya menghadapi kekerasan militer, tetapi juga kekerasan hukum (*legal violence*), yakni kondisi ketika hukum digunakan untuk membatasi hak hidup, mobilitas, dan kedaulatan mereka. Perspektif ini memperluas pemahaman konflik Palestina dari sekadar konflik bersenjata menjadi sistem penindasan struktural yang dilembagakan secara legal dan politik.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Erakat relevan untuk memperkuat analisis mengenai praktik kolonialisme Zionis di era kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum humaniter internasional. Temuan Erakat melengkapi kajian historis para sejarawan seperti Ilan Pappé dan Nur Masalha, dengan menambahkan dimensi hukum dan institusional sebagai instrumen penjajahan modern. Dengan demikian, kajian ini memperkaya pendekatan interdisipliner penelitian yang menggabungkan tafsir Al-Qur'an dengan analisis historis dan hukum internasional, tanpa mereduksi konflik Palestina–Israel ke dalam persoalan agama atau etnis semata.

b. Saree Makdisi berjudul *Tolerance Is a Wasteland* (2019)

Kajian kontemporer lain yang relevan mengenai Palestina dapat ditemukan dalam karya Saree Makdisi, *Tolerance Is a Wasteland* (2019). Dalam karya ini, Makdisi

menegaskan bahwa Zionisme modern merupakan bentuk kolonialisme pemukim yang bertujuan menguasai tanah Palestina dengan cara menggantikan penduduk asli, bukan sekadar mengelola wilayah jajahan. Ia menolak narasi konflik sebagai “sengketa dua pihak yang setara” dan menunjukkan bahwa relasi Israel–Palestina sejak awal dibangun di atas ketimpangan kekuasaan struktural.

Makdisi menjelaskan bahwa proyek Zionis beroperasi melalui kebijakan sistematis seperti ekspansi permukiman, segregasi ruang hidup, pembatasan mobilitas, serta normalisasi kekerasan negara terhadap warga Palestina. Praktik-praktik tersebut bukan respons temporer terhadap ancaman keamanan, melainkan bagian dari logika kolonialisme pemukim yang berorientasi pada penguasaan ruang dan eliminasi keberadaan politik penduduk asli Palestina. Dalam konteks ini, konsep “toleransi” dan “demokrasi” yang sering diklaim Israel justru berfungsi sebagai wacana penutup atas realitas apartheid dan penindasan struktural.

Lebih lanjut, Makdisi menyoroti peran wacana global dan dukungan Barat dalam menopang keberlangsungan kolonialisme Zionis. Menurutnya, legitimasi internasional terhadap Israel tidak terlepas dari konstruksi narasi moral dan politik yang mengaburkan pengalaman kolonial bangsa Palestina. Dengan demikian, konflik Palestina–Israel harus dipahami sebagai persoalan kolonialisme modern yang terus direproduksi melalui institusi politik, hukum, dan budaya global.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemikiran Makdisi memperkuat analisis mengenai praktik kolonialisme Zionis di era kontemporer, khususnya dalam menjelaskan dimensi ideologis dan struktural dari penjajahan Palestina. Kajiannya melengkapi pendekatan historis dan hukum internasional dengan perspektif kritis terhadap wacana politik global, serta sejalan dengan tujuan penelitian ini yang berupaya mengaitkan gambaran normatif Al-Qur’an tentang perilaku kolektif tertentu dengan realitas ideologi dan praktik kolonial modern, tanpa melakukan generalisasi etnis atau keagamaan.

f. Hatem Bazian yang berjudul *Decolonizing Palestine: Settler Colonialism, Islamophobia, and the Erasure of Indigenous Palestinians* (2022)

Kajian kontemporer lain yang relevan mengenai Palestina dapat ditemukan dalam karya Hatem Bazian (2022) yang membahas hubungan antara Zionisme, kolonialisme pemukim, dan konstruksi wacana global tentang Palestina. Bazian menegaskan bahwa Zionisme modern tidak hanya beroperasi sebagai proyek kolonial di lapangan, tetapi juga sebagai proyek ideologis yang aktif membentuk narasi global melalui media, institusi akademik, dan kebijakan luar negeri Barat.

Menurut Bazian, dominasi Israel atas Palestina tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Zionisme dalam membingkai penjajahan sebagai isu keamanan, demokrasi, dan hak membela diri. Narasi ini berfungsi untuk menormalisasi kekerasan struktural, pendudukan militer, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap bangsa Palestina, sekaligus mendeligitimasi perlawanan Palestina dengan stigma ekstremisme atau terorisme. Dengan demikian, konflik Palestina–Israel dipahami sebagai persoalan kolonialisme modern yang dilindungi oleh hegemoni wacana internasional.

Bazian juga menyoroti keterkaitan erat antara Zionisme dan fenomena Islamofobia global, di mana representasi negatif terhadap Muslim dan Arab digunakan untuk membenarkan kebijakan represif Israel. Dalam kerangka ini, Palestina menjadi locus pertemuan antara kolonialisme pemukim, rasisme struktural, dan politik global pasca-Perang Dingin. Pendekatan Bazian memperluas analisis konflik Palestina dari ranah teritorial ke ranah ideologis dan kultural.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Bazian relevan untuk memperkuat analisis mengenai ideologi Zionisme sebagai sistem hegemonik yang tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga secara diskursif. Kajiannya melengkapi perspektif historis dan hukum internasional dengan analisis wacana, serta mendukung pendekatan penelitian ini yang mengaitkan gambaran normatif Al-Qur'an tentang perilaku

hegemonik dan manipulatif dengan praktik kolonialisme pemukim modern, tanpa melakukan generalisasi etnis atau keagamaan.

g. Nur Masalha yang berjudul *Palestine: A Four Thousand Year History* (2018)

Kajian lain yang sangat berpengaruh adalah karya Nur Masalha *Palestine: A Four Thousand Year History* (2018), yang membantah narasi Zionis bahwa Palestina “tanah tanpa bangsa” atau tidak memiliki identitas historis yang jelas. Berdasarkan bukti arkeologi, dokumen Mesir kuno, catatan Romawi, literatur Arab, dan arsip Utsmaniyah, Masalha menunjukkan bahwa istilah “Filistin” atau “Palestine” telah digunakan selama ribuan tahun sebagai identitas geografis maupun sosial, jauh sebelum munculnya gerakan Zionisme. Buku ini membongkar konstruksi naratif kolonial yang berupaya menghapus penduduk asli dari sejarah untuk membenarkan pendudukan modern.

Masalha juga menyoroti bagaimana sejak awal abad ke-20, propaganda Zionis memproduksi wacana orientalis yang menggambarkan Palestina sebagai wilayah kosong, primitif, atau tidak terorganisir—padahal dalam periode Utsmaniyah, masyarakat Palestina memiliki struktur sosial, ekonomi, dan kultural yang mapan. Kajian ini relevan dengan penelitian karena menunjukkan pola distorsi sejarah, manipulasi informasi, dan propaganda sistematis—karakteristik yang secara etis selaras dengan sifat manipulatif yang dikritik Al-Qur’an terhadap kelompok-kelompok tertentu di masa Bani Israil.

h. Rashid Khalidi yang berjudul *The Hundred Years’ War on Palestine* (2020)

Karya terbaru Rashid Khalidi, *The Hundred Years’ War on Palestine* (2020), memberikan perspektif historis panjang bahwa perjuangan Palestina bukan konflik lokal, tetapi “perang seratus tahun” yang dilakukan oleh kekuatan kolonial mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat. Khalidi menggunakan dokumen pribadi keluarganya—karena keluarganya terlibat dalam politik Jerusalem—arsip diplomatik AS, serta catatan rezim kolonial Inggris untuk menunjukkan bahwa Palestina telah

menjadi korban urutan kekuatan imperialis global yang bekerja sama dengan proyek Zionisme.

Berbeda dengan karya *The Iron Cage*, buku ini membahas aspek militer, propaganda internasional, serta intervensi langsung pemerintah AS dalam menopang kekuasaan Israel. Karya ini memperkuat gagasan bahwa ketimpangan kekuatan global-lah yang menopang penjajahan modern atas Palestina. Relevansi penelitian ini sangat kuat karena menghubungkan sifat kezaliman, fanatisme ideologis, serta pelanggaran moral-politik yang dikritik Al-Qur'an dengan dinamika kolonialisme kontemporer yang dijalankan oleh elite Zionis.

i. Omar Shakir yang berjudul *A Threshold Crossed* (2021)

Karya yang relevan dalam satu dekade terakhir mengenai Palestina dapat ditemukan dalam buku *A Threshold Crossed* (2021) yang ditulis oleh Omar Shakir atas nama *Human Rights Watch*. Buku ini menegaskan bahwa kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina telah melampaui batas pelanggaran biasa dan memenuhi unsur-unsur kejahatan apartheid serta penindasan sistematis sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional.

Dalam kajiannya, Shakir menunjukkan bahwa praktik pendudukan Israel—termasuk perampasan tanah, pemisahan wilayah, pembatasan mobilitas, diskriminasi hukum, dan kekerasan negara—bukan bersifat temporer atau defensif, melainkan merupakan bagian dari sistem dominasi yang terstruktur. Kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur, dan warga Palestina di dalam Israel sendiri, dengan standar hukum yang berbeda berdasarkan identitas nasional dan etnis.

Shakir menegaskan bahwa sistem hukum dan administratif Israel dirancang untuk mempertahankan supremasi satu kelompok atas kelompok lain, sehingga menghasilkan kondisi ketidaksetaraan permanen. Dengan merujuk pada konvensi internasional, termasuk Konvensi Anti-Apartheid dan Statuta Roma, kajian ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memahami konflik Palestina–Israel sebagai

persoalan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, bukan sekadar konflik politik atau keamanan.

Dalam konteks penelitian ini, karya Shakir relevan untuk memperkuat analisis mengenai praktik kolonialisme pemukim dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Negara Israel di era kontemporer. Temuan ini melengkapi kajian historis dan ideologis dengan bukti empiris dan yuridis, serta mendukung pendekatan penelitian yang mengaitkan gambaran normatif Al-Qur'an tentang kezaliman dan pengingkaran keadilan dengan realitas penindasan struktural terhadap bangsa Palestina, tanpa melakukan generalisasi etnis atau agama.

j. Virginia Tilley yang berjudul *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid* (2017)

Kajian relevan mengenai Palestina juga dapat ditemukan dalam laporan yang disusun oleh Virginia Tilley bersama Richard Falk, berjudul *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid* (2017), yang diterbitkan oleh United Nations ESCWA. Laporan ini menyimpulkan bahwa kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina memenuhi unsur-unsur apartheid sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional.

Tilley menjelaskan bahwa sistem hukum, kebijakan administratif, dan pengaturan teritorial Israel secara konsisten dirancang untuk mempertahankan dominasi satu kelompok atas kelompok lain berdasarkan identitas nasional dan etnis. Praktik tersebut mencakup pemisahan wilayah, pembatasan hak politik, diskriminasi hukum, serta pengingkaran hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina. Dengan pendekatan yuridis-struktural, laporan ini menegaskan bahwa penindasan terhadap Palestina bukan bersifat insidental, melainkan sistemik dan terlembaga.

Dalam konteks penelitian ini, kajian Tilley relevan untuk memperkuat analisis mengenai pelanggaran hukum internasional dan struktur penindasan modern di Palestina. Temuan ini melengkapi kajian historis dan ideologis dengan kerangka hukum internasional yang jelas, serta mendukung pendekatan penelitian yang

mengaitkan prinsip keadilan dan penolakan terhadap kezaliman dalam Al-Qur'an dengan realitas kolonialisme pemukim dan apartheid yang dialami bangsa Palestina, tanpa melakukan generalisasi etnis atau agama.

k. Lorenzo Veracini yang berjudul *The Settler Colonial Present* (2015)

Kajian penting mengenai Palestina dalam kerangka kolonialisme pemukim dapat ditemukan dalam karya Lorenzo Veracini, *The Settler Colonial Present* (2015). Veracini menempatkan Palestina sebagai salah satu contoh paling jelas dari kolonialisme pemukim modern, di mana tujuan utama proyek kolonial bukan sekadar eksploitasi wilayah, melainkan penggantian penduduk asli.

Veracini menjelaskan bahwa kolonialisme pemukim memiliki logika eliminasi (*logic of elimination*), yakni upaya sistematis untuk menghapus keberadaan politik dan sosial penduduk asli melalui perampasan tanah, segregasi, dan normalisasi kekerasan struktural. Dalam konteks Palestina, logika ini tampak dalam kebijakan permukiman, pemindahan paksa, serta pembatasan hak kolektif bangsa Palestina. Dengan pendekatan teoritis ini, konflik Palestina–Israel dipahami bukan sebagai konflik simetris, melainkan sebagai relasi kolonial yang timpang.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka Veracini relevan untuk memperkuat analisis ideologi Zionisme sebagai bentuk kolonialisme pemukim modern. Pendekatan teoretis ini melengkapi kajian historis dan hukum internasional, serta memberikan dasar konseptual untuk mengaitkan gambaran Al-Qur'an tentang dominasi, pengingkaran keadilan, dan pelanggaran perjanjian dengan praktik kolonialisme pemukim kontemporer di Palestina, tanpa melakukan generalisasi etnis atau agama.

l. Sara Roy yang berjudul *The Gaza Strip* (2016)

Kajian kontemporer yang relevan mengenai Palestina, khususnya Jalur Gaza, dapat ditemukan dalam karya Sara Roy, *The Gaza Strip* (2016). Roy mengembangkan konsep de-development untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Israel secara sistematis tidak hanya menghambat pembangunan Gaza, tetapi secara aktif merusak struktur ekonomi, sosial, dan institusional masyarakat Palestina.

Menurut Roy, blokade, pembatasan pergerakan, penghancuran infrastruktur sipil, dan kontrol ketat atas sumber daya telah menciptakan ketergantungan struktural dan kemiskinan yang disengaja. Kondisi ini tidak dapat dipahami sebagai dampak sampingan konflik keamanan, melainkan sebagai bagian dari strategi pengendalian kolonial yang bertujuan melemahkan kemampuan Palestina untuk hidup mandiri dan berdaulat. Dengan demikian, Gaza diposisikan sebagai wilayah yang dikelola melalui krisis permanen.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Roy relevan untuk memperkuat analisis mengenai dampak kolonialisme pemukim dan pendudukan Israel terhadap kehidupan sipil bangsa Palestina. Kajiannya melengkapi perspektif historis, ideologis, dan hukum internasional dengan analisis ekonomi-politik yang menunjukkan bagaimana penindasan tidak hanya terjadi melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui penghancuran sistem kehidupan secara struktural. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang mengaitkan prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an dengan realitas penindasan modern terhadap rakyat Palestina, tanpa generalisasi etnis atau agama.

m. Muhammad Abdul Aziz, Yahudi dalam Perspektif Al-Quran dan Relevansinya terhadap Genosida Palestina (2024).

Tesis ini menegaskan bahwa kritik Al-Quran terhadap Bani Israil bersifat perilaku dan moral, bukan etnis atau agama secara umum. Muhammad Abdul Aziz menunjukkan bahwa praktik penindasan, pengkhianatan perjanjian, dan kezaliman yang dikritik Al-Quran memiliki kesesuaian pola dengan ideologi Zionisme modern dalam konteks penjajahan Palestina. Oleh karena itu, konflik Palestina–Israel dipahami sebagai persoalan kolonialisme dan ideologi politik, bukan konflik keagamaan antara Islam dan Yahudi (Abdul Aziz, 2024).

3. Posisi Penelitian

Berdasarkan beragam kajian historis yang telah dipaparkan—mulai dari Noura Erakat, Saree Makdisi, Hatem Bazian, Nur Masalha, hingga sejarawan “*New Historians*” lainnya—tampak bahwa seluruh penelitian tersebut memberikan penjelasan komprehensif tentang kolonialisme pemukim Zionis, rekayasa demografis, strategi militer, propaganda internasional, serta dukungan kekuatan global yang memungkinkan berdirinya Israel dan terjadinya penindasan sistematis terhadap bangsa Palestina.

Kesamaan utama dari kajian-kajian tersebut terletak pada penegasan bahwa Zionisme beroperasi sebagai proyek kolonial terstruktur yang didukung oleh kekuatan global, dilembagakan melalui hukum internasional, dinormalisasi lewat wacana politik dan media, serta dipertahankan melalui kekerasan militer dan penindasan administratif. Penindasan terhadap bangsa Palestina dipahami sebagai sistemik, berlapis, dan berkelanjutan—mencakup dimensi historis, hukum, ekonomi-politik, dan ideologis.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya bergerak dalam kerangka analisis sejarah, hukum internasional, teori kolonialisme, dan studi politik kontemporer. Mereka tidak secara eksplisit mengaitkan fenomena kolonialisme Zionis dengan tradisi etika dan kritik moral yang bersumber dari teks keagamaan Islam, khususnya Al-Qur’an dan tafsir klasiknya. Di sisi lain, kajian tafsir Al-Qur’an tentang Bani Israil umumnya berhenti pada konteks historis kenabian dan moralitas umat terdahulu, tanpa menguji relevansinya terhadap struktur penindasan modern.

Di sinilah penelitian ini mengambil posisi yang berbeda sekaligus melengkapi. Penelitian ini memadukan analisis tafsir Al-Qur’an—berdasarkan karya mufasir klasik seperti Ibnu Jarir ath-Tabari, Ibnu Katsir, dan al-Baghawi—dengan kajian historis-kritis kontemporer mengenai Palestina. Pendekatan ini bertujuan menelaah bagaimana kritik Al-Qur’an terhadap perilaku kolektif tertentu—seperti pengingkaran perjanjian (naqdh al-‘uhud), distorsi kebenaran (tahrif al-kalim), manipulasi kekuasaan, dan kecenderungan hegemonik—dapat dibaca secara etis dan struktural dalam konteks kolonialisme pemukim Zionis modern.

Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan generalisasi etnis atau agama, melainkan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber etika dan kritik sosial yang menilai pola perilaku politik dan struktur kekuasaan. Posisi ini juga sejalan dengan temuan Muhammad Abdul Aziz (2024) yang menegaskan bahwa kritik Al-Qur'an terhadap Bani Israil bersifat moral-perilaku, bukan identitas keagamaan atau etnis.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat interdisipliner: melampaui kajian sejarah murni dan tafsir tekstual dengan mempertemukan wahyu, tafsir klasik, dan realitas kolonial kontemporer secara kritis. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjembatani etika Qur'ani dengan dinamika geopolitik modern, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang Palestina—bukan hanya sebagai persoalan sejarah dan hukum internasional, tetapi juga sebagai masalah kezaliman struktural yang relevan dengan peringatan moral Al-Qur'an sepanjang zaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir *bil-ma'tsur* dan analisis historis. Metode tafsir *bil-ma'tsur* digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang Yahudi berdasarkan riwayat dari Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan tabi'in. Pendekatan historis digunakan untuk melihat realisasi sifat-sifat tersebut dalam sejarah hingga masa modern.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

- Kitab tafsir salaf klasik, yaitu:
 - Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an karya Ibn Jarir ath-Tabari (w. 310 H),
 - Ma'alim at-Tanzil karya al-Baghawi (w. 516 H)
- Kitab tafsir salaf abad pertengahan, yaitu:
 - Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Imam Qurthubi (w. 671 H)
 - Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibn Katsir (w. 774 H)
 - Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (w. 1376 H)
- Kitab hadis sahih, seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, yang memuat riwayat tentang interaksi Rasulullah ﷺ dengan kaum Yahudi.
- Literatur sejarah klasik, seperti Tarikh al-Umam wal Muluk karya ath-Tabari dan *al-Bidayah wan Nihayah* karya Ibn Katsir, untuk mendukung aspek historis.

b. Sumber Sekunder:

Sumber sekunder meliputi karya-karya ilmiah modern, baik berupa buku akademik, artikel jurnal, maupun penelitian mutakhir yang relevan dengan tema Yahudi, Zionisme, dan konflik Palestina. Beberapa di antaranya adalah:

- Abdul Aziz, M. (2024). Yahudi dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya terhadap genosida Palestina. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/83203/>
- Subhi Ash-Shalih. (2020). "Zionisme dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis terhadap Makna Permusuhan Bani Israil terhadap Kaum Mukminin." Jurnal Al-Fikr Al-Islami.
- Yusi Maesuri. (2022). "Yahudi Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)." Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Miftah H. Yusufpati. (2023). "Ahl al-Kitab dalam Al-Qur'an: Kecaman Ditujukan kepada Orang Yahudi, Bukan Nasrani." Jurnal Kalam.
- Ahmad Syaifuddin. (2018). "Israiliyyat dalam Tafsir al-Tabari dan Relevansinya terhadap Penafsiran Kisah Bani Israil." Jurnal Al-Munzir.
- Nurcahyati, Rahmat Sholeh, & Dudung Abdul Karim. (2021). "Yahudi dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik Penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam Kitab *Tafsir al-Adzim*)." Jurnal Al-Muhafidz.
- Hassan, N. & Ismail, A. (2022). "Contemporary Qur'anic Discourse on Zionism and the Palestinian Struggle." *Journal of Islamic Studies and Civilization*, Vol. 10(2).
- Mahmoud, R. & Al-Khatib, M. (2023). "Religious Narratives and Resistance: The Role of Qur'anic Interpretation in the Palestinian Cause." *Middle East Review of Theology and Politics*.
- Abu Fares, L. (2024). "Islamic Hermeneutics and Modern Zionism: A Thematic Review of Qur'anic Exegesis." *Al-Tafsir Journal of Qur'anic Studies*.

- UN ESCWA Report (2022) – “*Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid.*”
- Pew Research Center (2023) – “*Global Attitudes on Israel, Palestine, and Religious Narratives.*”

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah tafsir, hadits, dan karya sejarah klasik serta literatur kontemporer yang sahih dan relevan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang menyebut atau menggambarkan Bani Israil/Yahudi.
- b. Menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tafsir *bil-ma'tsur* dari para ulama.
- c. Mengaitkan hasil tafsir dengan fakta historis bangsa Yahudi.
- d. Menarik relevansi antara penjelasan Al-Qur'an dengan realitas konflik Palestina modern.

5. Sistematika Penulisan

a. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan batasan penelitian. Bab ini juga menjelaskan alasan mengapa tema “Yahudi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Konflik Palestina” perlu dikaji, bagaimana urgensinya dalam konteks keilmuan tafsir dan isu kontemporer, serta arah dan batas pembahasan yang akan ditempuh oleh penulis.

b. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Di dalamnya dibahas pandangan para ulama tafsir seperti Ibn Jarir ath-Tabari, Ibn Katsir, dan al-Baghawi tentang kaum Yahudi, serta hasil

penelitian modern yang relevan dari berbagai jurnal dan buku ilmiah. Tujuannya untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara karya-karya terdahulu dan menemukan celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini.

c. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya dijabarkan jenis penelitian (kualitatif dengan pendekatan tafsir bil-ma'tsur dan historis), sumber data primer dan sekunder (termasuk jurnal dan penelitian kontemporer), teknik pengumpulan data (studi kepustakaan), serta teknik analisis data (analisis tematik dan historis). Bab ini bertujuan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang Yahudi dan mengaitkannya dengan realitas kontemporer.

d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil kajian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas Bani Israil atau kaum Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam lima kitab tafsir utama: Tafsir ath-Tabari, Tafsir al-Baghawi, dan Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Qurthubi, dan Tafsir As-Sa'di.

Bab ini menguraikan bagaimana ketiga mufasir tersebut menggambarkan sifat, karakter, dan perilaku kaum Yahudi dalam aspek keimanan, moralitas, serta sikap terhadap para nabi dan umat beriman. Analisis ini disusun secara tematik agar tampak pola umum yang menggambarkan tabiat Yahudi menurut perspektif wahyu dan tafsir para ulama.

e. Bab V: Simpulan dan Saran

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian dan temuan utama yang diperoleh dari analisis sebelumnya. Bagian kesimpulan menegaskan hubungan antara tafsir klasik tentang Yahudi dan realitas modern konflik Palestina, sementara bagian rekomendasi memberikan saran akademik dan praktis bagi penelitian lanjutan, pengembangan studi tafsir, serta penguatan kesadaran umat Islam terhadap pesan Al-Qur'an yang bersifat universal dan abadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kaum Yahudi (Bani Israil) beserta penafsiran lima kitab tafsir klasik utama, yaitu *Jami' al-Bayan* karya Ibn Jarir ath-Tabari, *Ma'alim at-Tanzil* karya al-Baghawi, *Jami li Ahkam al-Quran* karya Al Qurthubi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir, dan *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* karya Abdurrahman bin Nashir As'Sadi.

Ayat-ayat yang menjadi fokus kajian mencakup Surah Al-Baqarah ayat 40–123, Surah Al-Ma'idah ayat 12–82, Surah Al-A'raf ayat 163–166, Surah Al-Isra' ayat 4–8, dan Surah Al-Hasyr ayat 2–5. Keseluruhan ayat tersebut dipilih karena memiliki pola tematik yang konsisten dalam menggambarkan perilaku, karakter, respons keagamaan, serta perjalanan historis sebagian Bani Israil sebagaimana dikisahkan oleh Al-Qur'an.

Dalam tradisi Al-Qur'an, kaum Yahudi adalah kelompok yang paling banyak dibicarakan, baik dari aspek keimanan, moral, maupun perilaku politik. Hal ini menunjukkan besarnya nilai ibrah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (Yusuf: 111).

Deskripsi objek penelitian ini juga mencakup karakteristik tema Yahudi dalam Al-Qur'an yang bersifat edukatif, selektif, dan historis. Pembahasan ayat-ayat tersebut tidak bertujuan menarasikan sejarah secara kronologis, tetapi untuk mengungkapkan pola moral dan spiritual yang berulang. Oleh karena itu, Al-Qur'an menampilkan

perilaku Bani Israil dalam berbagai konteks: pengingkaran nikmat, penolakan terhadap nabi-nabi, tahrif wahyu, pelanggaran perjanjian, hingga tindakan konspiratif terhadap para rasul dan umat Islam. Ketiga mufasir klasik yang menjadi objek penelitian memberikan kontribusi besar dalam memahami karakteristik tersebut melalui analisis mendalam terhadap riwayat-riwayat sahih dari para sahabat dan tabi'in.

Dengan demikian, objek penelitian ini terdiri atas dua unsur utama: (1) ayat-ayat Al-Qur'an tentang Yahudi yang tersebar dalam beberapa surat penting, dan (2) tiga kitab tafsir klasik yang menjadi fondasi analisis, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam, historis, dan berlandaskan metode tafsir bil-ma'tsur.

2. Hasil

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kaum Yahudi melalui para ulama tafsir tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memaparkan pola perilaku, karakter spiritual, dan kecenderungan moral mereka secara konsisten. Pola ini tidak hanya ditampilkan dalam satu peristiwa, tetapi dalam rentang sejarah panjang yang melibatkan banyak nabi dan berbagai episode penyimpangan.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 40–44, Allahﷻ memulai pembahasan panjang tentang Bani Israil dengan mengingatkan mereka pada nikmat besar yang telah dianugerahkan kepada nenek moyang mereka serta perintah untuk menepati perjanjian. Allahﷻ berfirman:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

“Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kalian. Penuhilah perjanjian-Ku, niscaya Aku penuhi perjanjian kalian, dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus takut.” (QS. Al-Baqarah: 40)

Menurut ath-Thabari (2000), perjanjian ini adalah janji Bani Israil untuk menaati para nabi yang diutus kepada mereka dan tidak mengubah syariat. Namun mereka kerap melanggar perjanjian tersebut, sehingga Allah mencela mereka dalam ayat-ayat

berikutnya. Salah satu akibat dari pembangkangan tersebut adalah kekerasan hati, sebagaimana firman Allah:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

“Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, sehingga ia seperti batu bahkan lebih keras lagi.” (QS. Al-Baqarah: 74)

Ibnu Katsir (1999) menegaskan bahwa kekerasan hati mereka merupakan akibat dari kebiasaan panjang dalam membangkang, mengingkari ayat-ayat Allah ﷻ, dan menentang ajaran para nabi. Kekerasan hati ini bukan sekadar kondisi spiritual, tetapi menjadi sumber dari banyak bentuk penyimpangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Salah satu penyimpangan yang paling sering dikritik dalam Al-Qur'an adalah tahrif—yaitu mengubah wahyu Allah ﷻ baik secara teks maupun makna. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 75, Allah berfirman:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Apakah kalian masih berharap mereka akan beriman kepada kalian, padahal sebagian dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui?” (QS. Al-Baqarah: 75)

Ath-Tabari (2000) menjelaskan bahwa kelompok yang dimaksud adalah pemuka Yahudi yang mengetahui kebenaran isi Taurat tetapi dengan sengaja mengubahnya demi mempertahankan wibawa dan kepentingan duniawi mereka. Al-Baghawi (2002) menambahkan bahwa tahrif juga mencakup tindakan menyembunyikan hukum yang benar dan menetapkan penafsiran palsu untuk tetap mempertahankan kekuasaan religius. Sikap penentangan terhadap para nabi juga menjadi tema sentral dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ

“Maka sebagian (nabi) kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh.” (QS. Al-Baqarah: 87)

Ibnu Katsir (1999) menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan pola sejarah Bani Israil yang berulang kali menolak dan memusuhi nabi-nabi ketika ajaran yang dibawa tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dalam penjelasan al-Baghawi, tindakan mereka bukan sekadar penolakan verbal, melainkan agresi nyata termasuk upaya dan tindakan pembunuhan. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 13, Allah menyebutkan sebab turunnya laknat atas mereka:

فَبِمَا نَفَضْنَاهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

“Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian, Kami melaknat mereka dan menjadikan hati mereka keras.” (QS. Al-Ma'idah: 13)

Ath-Tabari (2000) menjelaskan bahwa pelanggaran perjanjian ini mencakup penolakan terhadap kebenaran yang sudah diketahui, termasuk penolakan terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad ﷺ meskipun tanda-tanda kenabian beliau telah tertulis jelas dalam kitab mereka. Hal ini diperkuat oleh firman Allah:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab mengenal (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.” (QS. Al-Baqarah: 146)

Ibnu Katsir (1999) menukil banyak riwayat dari Ibn 'Abbas bahwa pengenalan itu adalah pengenalan yang pasti, namun kesombongan dan kedengkian membuat mereka menolak. Analisis juga menunjukkan bahwa Bani Israil kerap melanggar syariat dengan cara manipulatif, sebagaimana dalam kisah pelanggaran hari Sabat. Allah berfirman:

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيِينَ

“Maka ketika mereka dengan sombong melanggar larangan, Kami berfirman kepada mereka: ‘Jadilah kalian kera yang hina.’” (QS. Al-A'raf: 166)

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa mereka memasang perangkap ikan sebelum Sabtu, lalu mengambilnya setelah Sabtu—suatu bentuk rekayasa untuk mengakali larangan Allah ﷻ. Hukuman perubahan bentuk menjadi kera menegaskan

beratnya dosa pelanggaran syariat melalui tipu daya. Dalam Surah Al-Isra' ayat 4–8, Allah ﷻ juga membahas dua kerusakan besar yang dilakukan Bani Israil:

لَنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

“Sungguh kalian akan membuat kerusakan di bumi dua kali...” (QS. Al-Isra': 4)

Menurut Al-Baghawi (2002) dan Ibnu Katsir (1999), kerusakan tersebut mencakup pembangkangan terhadap ajaran Musa, pembunuhan nabi-nabi, dan kerusakan moral serta politik yang dilakukan di masa-masa berikutnya. Ayat tersebut juga menunjukkan pola sebab-akibat: kerusakan moral akan berujung pada kehancuran sosial. Kata “dua kali” menegaskan bahwa perilaku itu terjadi berulang, bukan hanya sekali, sesuai dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat mereka sendiri.

Objek analisis lain yang sangat penting adalah Surah Al-Hasyr ayat 2–5, yang membahas pengkhianatan Bani Nadhir terhadap Nabi Muhammad ﷺ. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ

“Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka...” (QS. Al-Hasyr: 2)

Menurut Ibnu Katsir, pengusiran tersebut terjadi karena mereka melakukan konspirasi pembunuhan terhadap Nabi dan melanggar perjanjian damai. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sifat pengkhianatan dan tipu daya yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tampak kembali pada masa kehidupan Nabi.

Secara keseluruhan, hasil analisis dari ketiga kitab tafsir klasik menunjukkan bahwa karakter negatif yang disematkan Al-Qur'an kepada sebagian Bani Israil bukanlah penilaian etnis, tetapi deskripsi historis dan spiritual atas pola perilaku yang berulang: tahrif wahyu, pelanggaran perjanjian, pembangkangan terhadap para nabi, manipulasi hukum, tipu daya dalam menjalankan syariat, serta pengkhianatan terhadap umat beriman.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk mengambil ibrah dari perilaku tersebut serta mewaspadaai pola-pola serupa dalam konteks modern.

3. Pembahasan

Asal-usul Bani Israil menjadi salah satu tema sentral dalam studi sejarah agama, peradaban Timur Tengah, dan kajian keagamaan. Bangsa Yahudi secara tradisional menisbatkan garis keturunan mereka kepada Nabi Ya‘qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Narasi ini tidak hanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi dan Kristen, tetapi juga ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta dianalisis dalam penelitian para sejarawan klasik maupun modern.

Bab ini menyajikan uraian komprehensif berdasarkan tujuh aspek yang diminta: (1) dalil Qur’an, (2) hadis, (3) pandangan mufasir, (4) pandangan sejarawan klasik, (5) analisis ilmiah modern, (6) realitas sejarah di lapangan, (7) pengembangan gaya akademik dan kelengkapan metodologis.

3.1. Asal-Usul Nasab: Nabi Ya‘qub (Israel)

Subbab ini menegaskan asal-usul nasab Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam sebagai dasar teologis identitas Bani Israil dalam Al-Qur’an menurut tafsir klasik dan abad pertengahan.

Menurut seluruh tradisi samawi, Nabi Ya‘qub ibn Ishaq ibn Ibrahim merupakan bagian dari garis keturunan kenabian paling mulia. Nasabnya seperti berikut:

- Ibrahim alaihissalam
 - Ishaq alaihissalam
 - Ya‘qub alaihissalam

Allah telah menegaskan keturunan ini dalam Al-Qur’an:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

“Kami telah menganugerahkan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya‘qub.” (Al-Ankabut: 27)

Ayat ini menempatkan Ya‘qub sebagai karunia ilahi yang bersifat khusus, yang diwariskan kepada Ibrahim setelah ujian panjang kehidupan dan migrasi dakwahnya. Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa penyebutan nama Ya‘qub bersama Ishaq di antara

karunia Allah ﷻ kepada Ibrahim menunjukkan kemuliaan nasab tersebut, sebab Allah jarang menyebut dua keturunan sekaligus tanpa penegasan maqam mereka.

Secara genealogis, garis keturunan ini memiliki tiga karakteristik:

1. Keturunan nabi yang melahirkan nabi – Sebagian besar nabi Bani Israil adalah keturunan Ya‘qub.
2. Garis keturunan bersih (nasab nabawi) – Tidak terdapat unsur penyembahan berhala atau kemusyrikan dalam keluarga inti mereka.
3. Berlanjut menjadi komunitas religius (Bani Israil) – Dari Ya‘qub lahir generasi yang kemudian disebut dalam Al-Qur‘an sebagai Bani Israil, salah satu kelompok manusia yang paling banyak dibahas dalam wahyu.

3.1.1. Latar Keluarga: Lingkungan Tauhid dan Tradisi Kenabian

Subbab ini menegaskan bahwa Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berlandaskan tauhid dan tradisi kenabian, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir klasik dan abad pertengahan.

Nabi Ya‘qub tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sejak awal memegang teguh ajaran tauhid. Kakeknya, Nabi Ibrahim, merupakan figur sentral revolusi monoteisme di wilayah Syam dan Mesopotamia. Ayahnya, Nabi Ishaq, meneruskan risalah tersebut dan hidup sebagai nabi yang menjaga ajaran lurus Ibrahim.

Tradisi tafsir menyebut bahwa Ishaq sangat memperhatikan pendidikan keagamaan anak-anaknya. Menurut ath-Tabari, Ishaq menanamkan kepada Ya‘qub tentang sifat Allah ﷻ, syariat Ibrahim, etika ibadah, zakat, serta prinsip menjauhi kemusyrikan, sebagaimana termaktub dalam pesan Ibrahim:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ

“Ibrahim telah mewasiatkan ajaran itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya‘qub.”

(Al-Baqarah: 132)

Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum wafatnya, Ya‘qub telah memegang otoritas moral dan keagamaan setara dengan Ibrahim dalam hal penyampaian wasiat tauhid.

3.1.2. Tempat Kelahiran dan Kondisi Geografis

Subbab ini menegaskan konteks tempat kelahiran dan kondisi geografis Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam sebagai latar historis yang memengaruhi perjalanan kenabian Bani Israil.

Sebagian besar riwayat mengisahkan bahwa Nabi Ya‘qub lahir di wilayah Kanaan, daerah yang kini mencakup Palestina, Israel, Yordania, dan sebagian Suriah. Kanaan pada masa itu adalah kawasan agraris yang subur dengan padang rumput luas, cocok untuk kehidupan pastoral—sebuah karakteristik yang melekat pada keluarga Ibrahim, Ishaq, dan Ya‘qub.

Sejarawan modern menilai bahwa kisah migrasi Abraham–Ishaq–Ya‘qub tidak berdiri terpisah dari realitas sejarah Timur Dekat kuno. William F. Albright, dalam *From the Stone Age to Christianity* (1957), menegaskan bahwa “tradisi para leluhur [patriarchal traditions] mencerminkan latar sosial dan budaya yang sejalan dengan konteks awal milenium kedua SM,” menunjukkan bahwa pola perpindahan keluarga Ibrahim dari Ur menuju Harran dan Kanaan sesuai dengan mobilitas kelompok-kelompok Semitik pada masa itu.

Senada dengan itu, Kenneth A. Kitchen dalam *On the Reliability of the Old Testament* (2003) menjelaskan bahwa nama-nama, adat keluarga, bentuk perjanjian, serta praktik migrasi dalam narasi para leluhur “sangat cocok dengan dunia abad ke-19 hingga ke-17 SM di Mesopotamia dan Levant,” sehingga “tidak masuk akal menempatkan tradisi patriarkal pada masa yang jauh lebih muda.” Dengan demikian, keberadaan Ya‘qub sebagai figur historis tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka teologis, tetapi juga berada dalam lanskap sosial, migrasi, dan struktur keluarga yang memang dikenal dari budaya Semitik kuno pada awal milenium kedua sebelum Masehi.



Gambar 1 : Peta Kanaan Abad ke-2 SM

3.1.3. Makna Gelar “Israel”: Asal-usul Linguistik dan Teologis

Makna gelar Israel dikaji dari aspek linguistik dan teologis untuk menegaskan posisinya sebagai sebutan kenabian Nabi Ya‘qub ‘alaihi salam menurut tafsir klasik dan abad pertengahan.

Nama “Israel” yang menjadi basis penamaan Bani Israil merupakan gelar yang diberikan kepada Nabi Ya‘qub. Dua pendapat utama dalam literatur Islam:

1. Pendapat mayoritas mufasir:

Israel berarti “*abdullah*” (hamba Allah). Ibn Katsir, al-Qurthubi, dan ath-Tabari menyebutkan bahwa “Isra” berarti hamba, dan “El” merujuk pada Ilah atau Allah dalam bahasa Ibrani kuno.

2. Pendapat ahli bahasa Ibrani :

Israel berasal dari akar kata Ibrani Yisra (bergumul/teguh/bersungguh-sungguh) El (Allah) sehingga bermakna “yang bersungguh-sungguh dengan Allah” atau “yang ditolong Allah”. Kedua pendapat ini tidak bertentangan.

Keduanya menekankan kedekatan spiritual Ya‘qub dengan Tuhan, serta menggambarkan kedudukannya sebagai nabi yang memperoleh bimbingan ilahi secara langsung.

3.1.4. Sifat dan Kepribadian Nabi Ya‘qub Menurut Al-Qur’an

Pembahasan ini menegaskan sifat dan kepribadian Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam sebagaimana digambarkan Al-Qur’an dan dijelaskan dalam tafsir klasik dan abad pertengahan.

Al-Qur’an menggambarkan Nabi Ya‘qub sebagai sosok yang luar biasa dari berbagai sisi, baik spiritual maupun moral. Pertama, beliau dikaruniai ilmu dan hikmah, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَإِنَّهُ لَدُرُّ عِلْمٍ

“Dan sesungguhnya dia benar-benar memiliki ilmu.” (Yusuf: 68)

Ilmu dan hikmah ini menjadikan Nabi Ya‘qub mampu membimbing keluarga dan anak-anaknya dengan penuh pertimbangan, sehingga setiap keputusan yang diambil bersumber dari pemahaman agama yang benar.

Kedua, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa (ṣabr jamil), terutama ketika menghadapi ujian kehilangan anaknya, Nabi Yusuf. Allah berfirman:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

“(Yang ada hanyalah) kesabaran yang indah.” (Yusuf: 18)

Kesabaran ini bukan sekadar menahan diri, tetapi juga mencerminkan keteguhan hati, kedalaman spiritual, dan kemampuan menerima takdir Allah dengan lapang dada.

Ketiga, Nabi Ya‘qub adalah pemimpin keluarga yang religius, yang selalu menekankan pentingnya tauhid dan menjauhi syirik. Hal ini tercermin ketika beliau mewasiatkan agama kepada anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman:

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ نَبِيِّيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan wasiat itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya‘qub. Ia berkata, ‘Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama

ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.””(Al-Baqarah: 132)

Lebih lanjut, ketika menjelang ajalnya, beliau menanyakan kepada anak-anaknya siapa yang akan mereka sembah setelah beliau tiada, dan mereka menjawab:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلّٰهِ أَبَاءُكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Apakah kalian hadir ketika Ya‘qub mendekati maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ‘Apa yang kalian sembah sepeninggalku?’ Mereka menjawab, ‘Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Isma‘il, dan Ishaq; (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada-Nya kami berserah diri.’””(Al-Baqarah: 132–133)
Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ya‘qub berhasil menanamkan dasar keimanan dan kepatuhan kepada Allah dalam keluarganya.

Keempat, beliau memiliki hati yang halus dan penuh kasih, terlihat dari kesedihan mendalam ketika terpisah dari Yusuf, yang menunjukkan kedalaman emosional sekaligus spiritual. Para mufasir menekankan bahwa sifat-sifat Nabi Ya‘qub—ilmu, kesabaran, kepemimpinan religius, dan kasih sayang—menjadi fondasi moral bagi pembentukan karakter Bani Israil di masa berikutnya, karena anak-anaknya belajar dari keteladanan ayah mereka dan meneruskan nilai-nilai tauhid, kesabaran, dan keadilan.

3.1.5. Keluarga Nabi Ya‘qub dan Pembentukan Dua Belas Kabilah Israil

Pembahasan ini menegaskan peran keluarga Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam dalam pembentukan dua belas kabilah Bani Israil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan tafsir klasik serta abad pertengahan.

Nabi Ya‘qub memiliki dua belas putra yang kelak dikenal sebagai Asbath, nenek moyang bani Israil. Mereka adalah:

- | | | |
|---------------------|------------|-------------|
| 1. Reuben | 5. Dan | 9. Issachar |
| 2. Syam’un (Simeon) | 6. Naftali | 10. Zebulon |

3. Levi

7. Gad

11. Yusuf

4. Yahudza

8. Asyir

12. Bunyamin

Dari dua belas putra ini, terbentuklah dua belas kabilah yang membangun struktur sosial-politik Bani Israil di kemudian hari. Al-Qur'an menegaskan keberadaan mereka:

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

"Kami jadikan mereka dua belas suku yang menjadi umat-umat." (al-A'raf:160)

Pembentukan kabilah ini merupakan fenomena penting dalam sejarah. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh seperti:

- Nabi Musa dari kabilah Levi
- Nabi Harun dari kabilah Levi
- Nabi Daud dari kabilah Yahudza
- Nabi Sulaiman dari kabilah Yahudza
- Maryam dari keturunan Levi
- 'Isa dari keturunan Levi melalui Maryam

Sejarawan modern menilai struktur kabilah ini sebagai salah satu sistem sosial paling terorganisasi di Timur Dekat pada masanya.

3.1.6. Hijrah Nabi Ya'qub: Dari Kanaan ke Harran dan Kembali

Pembahasan ini menegaskan peristiwa hijrah Nabi Ya'qub 'alaihis salam dari Kanaan ke Harran dan kembali sebagai bagian dari dinamika dakwah dan pembentukan sejarah Bani Israil.

Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ya'qub mengalami beberapa perpindahan geografis yang penting dan penuh makna. Pertama, ia pindah dari Kanaan ke Harran atas perintah ayahnya, Ishaq, karena konflik dengan saudaranya, 'Esau, sekaligus agar ia menikah dengan perempuan yang seiman. Di Harran, Ya'qub tinggal di rumah pamannya, Laban, menikah, dan mulai membangun keluarganya.

Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke tanah Kanaan bersama seluruh keluarganya; perjalanan pulang ini menandai awal pembentukan komunitas familial yang besar dan kuat. Selanjutnya, pada masa kelaparan hebat, Ya'qub dan keluarganya

melakukan migrasi ke Mesir setelah mengetahui bahwa Yusuf telah menjadi pejabat tinggi di istana Mesir.

Perpindahan ini menjadi awal dari fase panjang sejarah Bani Israil di Mesir, sekaligus menyiapkan latar bagi perjalanan dan ujian keturunan mereka di masa berikutnya.

3.1.7. Hubungan Nabi Ya‘qub dengan Nabi Yusuf: Fondasi Teologis dan Psikologis

Kajian ini menunjukkan bahwa relasi Nabi Ya‘qub dan Nabi Yusuf ‘*alaihimassalam* memiliki dimensi teologis dan psikologis yang membentuk nilai kesabaran, keteguhan iman, dan tawakal sebagaimana digambarkan Al-Qur’an.

Kisah Ya‘qub dan Yusuf merupakan narasi paling panjang dalam Al-Qur’an. Kisah ini menunjukkan aspek kebijaksanaan Ya‘qub dalam mendidik anak, kesabaran luar biasa menghadapi ujian berat, kepekaan spiritual, hingga kecintaan mendalam yang seimbang dengan ketundukan kepada ketetapan Allah

Ya‘qub mengetahui bahwa Yusuf akan menjadi figur besar melalui mimpinya:

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

"Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."(Yusuf: 4)

Namun ia tetap memerintah Yusuf agar tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebuah bentuk kebijaksanaan psikologis yang diakui para mufasir.

3.1.8. Wasiat Terakhir Nabi Ya‘qub: Penegasan Tauhid Sepanjang Zaman

Uraian ini menempatkan wasiat terakhir Nabi Ya‘qub ‘*alaihis salam* sebagai penegasan prinsip tauhid yang diwariskan kepada keturunannya. Al-Qur’an menggambarkan momen sakral menjelang wafatnya Ya‘qub:

مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي

"Apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat?"

Mereka menjawab:

...تَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ

“Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu—Ibrahim, Ismail, dan Ishaq—Tuhan Yang Esa.” (Al-Baqarah: 133)

Ayat ini adalah deklarasi monoteisme yang paling eksplisit dari keluarga Ya‘qub. Di sini terlihat bahwa fondasi Bani Israil bukan etnisitas, melainkan tauhid.

3.1.9. Signifikansi Historis Nabi Ya‘qub bagi Pembentukan Bani Israil

Kajian ini menempatkan Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam sebagai figur sentral dalam proses historis terbentuknya Bani Israil.

Nabi Ya‘qub bukan hanya seorang tokoh spiritual, tetapi juga pendiri identitas kolektif yang kelak dikenal sebagai Bani Israil. Ia berperan sebagai asal-usul genealogis, karena seluruh nabi Bani Israil adalah keturunannya, dan sebagai pembentuk struktur sosial, karena dua belas suku Israil berasal dari putra-putranya.

Selain itu, Ya‘qub juga berperan sebagai figur pendidik, membangun sistem pendidikan keluarga yang kuat sehingga ajaran tauhid tetap terjaga. Ia menjadi teladan karakter melalui kesabaran, keteguhan iman, dan kebijaksanaannya, yang menjadi model bagi umat setelahnya.

Lebih jauh, perannya sebagai fondasi keluarga dan komunitas menjadikannya fondasi peradaban, karena tradisi keilmuan, agama, dan hukum Yahudi berakar dari keturunannya, membentuk dasar moral dan spiritual bagi generasi Bani Israil berikutnya.

3.1.10. Bani Israil dalam Literatur Arkeologi

Kajian arkeologi modern memainkan peran fundamental dalam menelusuri asal-usul historis Bani Israil dan memahami konteks sosial, budaya, serta geografis yang melingkupi kemunculan mereka di kawasan Syam–Mesir. Di antara para tokoh paling berpengaruh dalam bidang ini adalah William F. Albright dan K. A. Kitchen, dua figur yang meskipun memiliki pendekatan berbeda, sama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap rekonstruksi sejarah masyarakat awal Israil.

Melalui data arkeologis dari Palestina, Mesir, dan Levant, keduanya berupaya menjembatani celah antara teks keagamaan, tradisi kuno, serta bukti material yang ditemukan di lapangan.

William F. Albright, dalam karya klasiknya *The Archaeology of Palestine and the Bible* (1935) dan *From the Stone Age to Christianity* (1940), menegaskan bahwa munculnya entitas “Israel awal” dapat dikenali melalui perubahan pola permukiman di dataran tinggi Kanaan pada transisi dari Zaman Perunggu Akhir menuju Zaman Besi (sekitar 1200–1000 SM). Albright mencatat bahwa arkeologi menunjukkan lonjakan drastis situs-situs baru di daerah pegunungan Samaria, Galilea, dan Yudea, tepat pada masa ketika kota-kota Kanaan mengalami kemunduran.

Situs-situs baru ini memiliki ciri khas yang konsisten: rumah tipe “*four-room house*” yang dianggap sebagai tipikal arsitektur Israil awal, tembikar domestik sederhana tanpa ornamen, sumur berlapis batu, sistem terasering untuk pertanian, serta fakta paling mencolok yaitu ketiadaan tulang babi dalam sampah dapur mereka—indikator diet religius yang identik dengan budaya Israil menurut Albright. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kelompok penghuni baru memiliki identitas religius yang berbeda dan lebih ketat dibanding populasi Kanaan yang sudah lama menetap.

Secara lebih luas, Albright berpendapat bahwa keberadaan Bani Israil tidak dapat dipahami hanya sebagai “pendatang asing” yang tiba secara tiba-tiba, tetapi sebagai bagian dari transformasi internal masyarakat Semitik Barat yang mengalami tekanan politik dan ekonomi akibat keruntuhan sistem feodal Kanaan pada akhir Zaman Perunggu. Ia menilai bahwa banyak dari komunitas tersebut adalah petani lokal, budak yang melarikan diri, dan kelompok pastoral yang bersama-sama membentuk struktur sosial baru. Menurut Albright, inilah proses yang secara arkeologis menghasilkan identitas baru yang kemudian disebut “Israel”.

Pandangan Albright diperkuat oleh K. A. Kitchen, yang dalam *On the Reliability of the Old Testament* (2003) melakukan perbandingan sistematis antara data

arkeologi Mesir dan Levant. Kitchen berpendapat bahwa narasi tentang Bani Israil awal sangat konsisten dengan dokumentasi Mesir Kuno mengenai populasi asing di Delta Timur. Ia menyoroti dokumen seperti Papyrus Anastasi VI, yang menyebutkan kelompok Semitik yang mencari izin masuk Mesir untuk merumputkan ternak mereka, serta catatan tentang pekerja dan budak asing yang disebut “Shasu”, “Apiru”, atau “Asiatics”.

Meskipun istilah-istilah ini tidak secara langsung merujuk pada “Israel”, Kitchen menegaskan bahwa mereka merupakan kelompok etnis yang secara budaya sangat mirip dengan komunitas Israil awal: semi-nomadik, berbahasa Semitik Barat, dan sering berinteraksi dengan Mesir melalui jalur migrasi. Ia juga menekankan bahwa struktur keluarga besar, mobilitas tinggi, serta peran ekonomi kelompok ini sesuai dengan gambaran awal Bani Israil dalam tradisi keagamaan dan sumber-sumber sejarah.

Salah satu bukti terpenting dari arkeologi Mesir adalah Stele Merneptah (1208 SM), yang secara eksplisit menyebut entitas bernama “Israel” (“Isrir” atau “Ysrir”). Prasasti ini merupakan bukti tertulis paling awal yang menyebut Israel, dan menariknya, penggambaran mereka menggunakan determinatif “manusia”, bukan “kota”, menunjukkan bahwa Israel pada waktu itu adalah kelompok sosial-etnis, belum berbentuk negara atau kota.

Hal ini selaras dengan model arkeologis yang diajukan Albright bahwa Israel awal adalah masyarakat tribal yang tinggal di dataran tinggi, bukan bangsa dengan struktur kenegaraan. Stele Merneptah juga menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-13 SM, Israel telah cukup signifikan secara demografis sehingga menjadi perhatian geopolitik Mesir.



Gambar 2 : Prasasti Stele Merneptah

Arkeologi di kawasan Syam—meliputi Palestina, Yordania, dan Suriah bagian selatan—menyediakan gambaran komplementer. Penggalan di situs-situs seperti Shiloh, Khirbet Raddana, Ai, Tel Masos, dan Mount Ebal menunjukkan ciri-ciri permukiman baru yang konsisten dengan masyarakat yang baru beralih dari kehidupan pastoral ke agraris.

Dari sisa-sisa bangunan, artefak rumah tangga, serta sistem pertanian yang ditemukan, tampak bahwa komunitas-komunitas ini membangun pola kehidupan yang terdesentralisasi, bersifat tribal, dan tidak terlibat dalam struktur kota-kota besar Kanaan. Para arkeolog seperti Israel Finkelstein dan Lawrence Stager kemudian mengkonfirmasi bahwa ledakan permukiman pedesaan kecil ini merupakan fenomena nyata dan bukan kebetulan, melainkan proses pemisahan budaya dan sosial dari penduduk kota yang lebih mapan.

Sisi penting lainnya dari studi arkeologi Syam–Mesir adalah konteks hubungan dua wilayah tersebut. Mesir memiliki pengaruh besar di Kanaan selama lebih dari 300 tahun melalui jaringan benteng, administrasi, dan jalur perdagangan yang menghubungkan Delta Timur dengan kota-kota Kanaan. Karena itu, keberadaan Bani Israil yang disebut dalam kitab-kitab suci—mulai dari Yusuf hingga periode Musa—

sangat mungkin terjadi dalam konteks kontak intensif Syam–Mesir yang tidak terputus sejak abad ke-18 hingga ke-12 SM.

Bukti seperti benteng Mesir di Gaza dan Jaffa, catatan pajak terhadap penduduk asing, serta papirus yang menyebut migran Semitik yang meminta izin melewati perbatasan Mesir, memberikan konteks historis yang sangat relevan dengan narasi perpindahan keluarga Ya‘qub, perkembangan Bani Israil di Mesir, hingga peristiwa eksodus.

Secara keseluruhan, sintesis antara temuan Albright, analisis Kitchen, dan data arkeologi Syam–Mesir menunjukkan bahwa Bani Israil tidak muncul secara mendadak atau ahistoris, melainkan melalui proses panjang transformasi masyarakat Semitik yang bermigrasi, menetap, bercampur dengan penduduk lokal, dan membentuk identitas religius serta sosial yang khas.

Meskipun data arkeologi tidak selalu mendukung seluruh detail narasi tekstual, namun secara umum memberikan gambaran kuat bahwa Bani Israil merupakan kelompok nyata yang eksis dalam sejarah Timur Dekat kuno, dengan jejak material yang dapat diidentifikasi secara ilmiah.

Dengan demikian, arkeologi menjadi komponen penting dalam memahami sejarah awal Bani Israil dan keterkaitan mereka dengan lanskap budaya Syam–Mesir yang lebih luas.

3.2. Sejarah Yahudi

3.2.1. Gambaran Umum Kaum Yahudi dalam Al-Qur’an: Pemberian Nikmat, Penyimpangan, dan Karakter Keagamaan

Tulisan ini mengkaji gambaran Al-Qur’an mengenai karakter dan perilaku kaum Yahudi sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israil. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kritik Al-Qur’an bersifat normatif dan moral, bukan etnis atau rasial. Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat tersebut didasarkan pada penjelasan para mufasir otoritatif dari periode klasik hingga

abad pertengahan. Dengan kerangka ini, pembaca diarahkan untuk memahami gambaran Al-Qur'an secara proporsional dan bertanggung jawab secara ilmiah.

Al-Qur'an memberikan gambaran historis dan teologis mengenai komunitas Yahudi (Bani Israil) sebagai kelompok yang memperoleh berbagai bentuk nikmat ilahi, namun pada saat yang sama memiliki rekam jejak pembangkangan yang berulang terhadap ajaran para nabi. Allah menjelaskan bahwa Bani Israil adalah keturunan Nabi Ya'qub 'alaihis salam - yang diberi gelar Israil- yang dianugerahi risalah, kitab suci, pemimpin-pemimpin agama, serta keselamatan dari berbagai bentuk penindasan. Allah ﷻ berfirman:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلَيَّ فُضِّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kalian, dan bahwa Aku telah melebihkan kalian di atas semua umat (pada masa itu).” (Al-Baqarah: 47)

Meskipun dianugerahi kedudukan mulia, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa sebagian mereka menunjukkan pola penolakan terhadap tuntunan wahyu, termasuk kedurhakaan terhadap para nabi. Penyimpangan tersebut dijelaskan melalui berbagai ayat, di antaranya mengenai tindakan ekstrem berupa pembunuhan terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Allah ﷻ berfirman:

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

“Dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.” (Al-Baqarah: 61)

Demikian pula Allah mengulang kecaman tersebut dalam konteks lain:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِقًا تَقْتُلُونَ

“Maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan apa yang tidak sesuai keinginan kalian, kalian berlaku sombong; lalu sebagian mereka kalian dustakan, dan sebagian lainnya kalian bunuh.” (Al-Baqarah: 87)

Al-Qur'an bahkan merekam klaim sebagian kaum Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa 'alaihis salam. Klaim ini dibantah secara tegas:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

“Dan (karena) ucapan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah.’ Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan bagi mereka.” (An-Nisa’: 157)

Penyebutan komunitas Yahudi dalam Al-Qur’an muncul dengan beberapa istilah: Bani Israil, Ahlul Kitab, Kaum Musa, dan Yahud. Namun penggunaan istilah Yahud umumnya muncul dalam konteks celaan terhadap keyakinan atau tindakan mereka. Misalnya, ketika mereka menyatakan Uzair sebagai anak Allah:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

“Orang-orang Yahudi berkata: ‘Uzair adalah putra Allah.’” (At-Taubah: 30)

Atau ketika mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: ‘Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.’” (Al-Ma’idah: 18)

Allah ﷻ menyangkal pengakuan tersebut dengan logika yang jelas: jika mereka memang kekasih Allah ﷻ, mengapa mereka menerima azab akibat pelanggaran mereka sendiri? Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk “meminta kematian” jika benar bahwa mereka adalah kelompok terpilih yang pasti mendapatkan surga:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Katakanlah: Wahai orang-orang Yahudi, jika kalian menganggap bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah selain manusia lainnya, maka mintalah kematian jika kalian memang benar.” (Al-Jumu’ah: 6)

Akan tetapi Al-Qur’an menegaskan bahwa mereka justru sangat takut menghadapi kematian:

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ

“Namun mereka tidak akan menginginkan kematian itu selamanya, karena perbuatan tangan mereka sendiri.” (Al-Jumu’ah: 7)

Dari sudut pandang metodologis, penamaan Yahudi lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kelompok yang melakukan penyimpangan teologis dan moral sebagaimana dicatat dalam Al-Qur'an.

Adapun nama Israil dalam Al-Qur'an adalah gelar mulia bagi Nabi Ya'qub 'alaihihissalam dan tidak pernah digunakan sebagai label negatif atau celaan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah "Israel" untuk merujuk kepada negara modern yang didirikan oleh gerakan Zionis sering dipandang problematis dalam karya akademik keislaman dan literatur Muslim.

Para ulama menekankan bahwa menyebut negara Zionis dengan nama "Israel" dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengaburkan perbedaan antara sosok Nabi Ya'qub yang dimuliakan dengan entitas politik modern yang melakukan penindasan terhadap umat Islam, khususnya rakyat Palestina.

Para ulama tafsir juga telah menuangkan tulisan mengenai sifat atau karakter kaum Yahudi. Menurut Ibnu Katsir (1999), Al-Qur'an mengonstruksi karakter sebagian kaum Yahudi (Bani Israil) sebagai komunitas yang sering melanggar perjanjian dengan Allah, mendustakan para nabi, memanipulasi ajaran wahyu demi kepentingan duniawi, serta menunjukkan sikap sombong dan enggan menerima kebenaran meskipun telah mengetahuinya.

Al-Qurtubi (2006) menekankan bahwa karakter yang dicela Al-Qur'an pada kaum Yahudi terutama tampak dalam praktik tahrif makna wahyu, penyalahgunaan otoritas agama, klaim keistimewaan religius tanpa tanggung jawab moral, serta kecenderungan menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Ath-Tabari (2000) menggambarkan Bani Israil sebagai umat yang berulang kali mengingkari nikmat ilahi, menentang perintah para nabi, melanggar janji kolektif, dan menampilkan pola pembangkangan yang terus berulang dalam sejarah mereka.

Sementara Al-Baghawi (2002) menegaskan bahwa karakter tercela yang disematkan Al-Qur'an pada sebagian kaum Yahudi meliputi sikap oportunistik terhadap iman, pengkhianatan terhadap amanah kenabian, keberanian melanggar

larangan ilahi, dan kecenderungan menentang para rasul ketika ajaran mereka bertentangan dengan kepentingan kelompok.

Beberapa fatwa ulama dan organisasi Islam menegaskan agar umat Muslim menggunakan istilah “Zionis Israel” atau “rezim Zionis” ketika membahas entitas politik modern ini, bukan nama Nabi Ya‘qub. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dalam beberapa pernyataannya bahwa penggunaan istilah “Israel” untuk rezim Zionis sebaiknya dihindari karena mengandung implikasi simbolik yang menyalahi kehormatan Nabi Ya‘qub. Begitu pula Ikatan Ulama Muslim Internasional (IUMS) menekankan pentingnya menyebut negara Zionis secara jelas sebagai rezim pendudukan atau entitas Zionis, agar umat Islam tidak secara tidak sengaja mengasosiasikan nama Nabi yang mulia dengan tindakan penindasan dan agresi politik.

3.2.2. Pola Pemberontakan, Penyimpangan Akidah, dan Relasi Yahudi dengan Wahyu

Meskipun Bani Israil memperoleh kedudukan istimewa melalui pengutusan banyak nabi, pemberian kitab Taurat, serta penyelamatan dari penindasan Firaun, Al-Qur’an menegaskan bahwa kelompok ini memperlihatkan pola keagamaan yang fluktuatif dan sering kali berlawanan dengan perjanjian (*mitsaq*) yang mereka ikrarkan. Allah mengingatkan kembali perjanjian tersebut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari kalian, dan Kami angkat bukit Thur di atas kalian, (seraya berkata): ‘Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu.’” (Al-Baqarah: 63)

Perjanjian itu tidak hanya terkait ketaatan, melainkan juga komitmen untuk menjaga kemurnian tauhid. Namun, Al-Qur’an mencatat bahwa penyimpangan terhadap tauhid—bahkan menuju kemusyrikan—terjadi tidak lama setelah nikmat besar dianugerahkan kepada mereka. Misalnya, permintaan mereka agar Nabi Musa membuatkan sesembahan sebagaimana kaum lain memiliki berhala:

“اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

“Buatlah untuk kami sesembahan (berhala) sebagaimana mereka memiliki sesembahan.” (Al-A‘raf: 138)

Penyimpangan akidah ini juga tercermin dalam ucapan mereka mengenai sifat Allah ﷻ. Salah satunya adalah klaim mereka bahwa tangan Allah ﷻ “terbelenggu”:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا

“Orang-orang Yahudi berkata: ‘Tangan Allah terbelenggu.’ Tangan merekalah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat karena ucapan itu.” (Al-Ma‘idah: 64)

Ayat ini menggambarkan bentuk tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk) dan pelecehan terhadap sifat-sifat ketuhanan yang suci, sehingga menuai kecaman keras dalam Al-Qur’an.

Al-Qur’an menyebut secara berulang bahwa Bani Israil menunjukkan sikap keras kepala (*‘inad*) dan pembangkangan terhadap nabi-nabi. Penolakan ini tidak hanya berupa pengingkaran verbal atau desakan perubahan syariat, melainkan sampai pada tindakan ekstrem pembunuhan. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرَهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

“(Kami kutuk mereka) karena mereka melanggar perjanjian, mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.” (An-Nisa’: 155)

Ayat-ayat semacam ini menjadi bukti bahwa perlawanan terhadap otoritas kenabian telah berakar kuat dalam sejarah spiritual mereka. Para mufasir seperti Ibnu Jarir ath-Thabari (2000) dan Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa pembunuhan nabi-nabi tersebut dilakukan ketika ajaran para nabi tidak selaras dengan hawa nafsu sosial dan politik mereka. Hal ini sejalan dengan ayat:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

“Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan apa yang tidak sesuai keinginan kalian, kalian menyombongkan diri?” (Al-Baqarah: 87)

Pola tindakan ini menunjukkan hubungan kompleks antara wahyu, kekuasaan, dan identitas kolektif dalam masyarakat Yahudi terdahulu. Penolakan terhadap ajaran

moral yang mengancam status sosial-politik mereka berperan besar dalam memicu konflik antara mereka dan para nabi.

Salah satu isu teologis utama yang dikritik Al-Qur'an adalah klaim eksklusivitas keagamaan, yaitu pandangan bahwa mereka adalah umat terpilih yang secara otomatis dicintai dan diselamatkan oleh Allah. Allah merekam pernyataan tersebut:

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." (Al-Ma'idah: 18)

Klaim teologis ini bertentangan dengan konsep keadilan ilahi dalam Islam. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menantang klaim mereka dengan logika kontradiktif: jika mereka benar-benar kekasih Allah ﷻ, mengapa mereka justru mendapatkan azab atas pelanggaran mereka? Allah ﷻ bahkan memerintahkan mereka untuk menginginkan kematian bila klaim tersebut benar,

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Maka berharaplah untuk mati jika kalian memang benar." (Al-Jumu'ah: 6)

Namun Al-Qur'an menegaskan bahwa mereka adalah kelompok yang paling enggan menghadapi kematian.

وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْزَرَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ

"Dan sungguh engkau akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling berambisi terhadap kehidupan (panjang)." (Al-Baqarah: 96)

Ayat ini menggambarkan kontras antara klaim spiritual mereka dan kondisi batin yang sesungguhnya: ketakutan mendalam terhadap kematian akibat beban moral dari perbuatan mereka.

3.2.3. Narasi Qur'ani tentang Keturunan Ya'qub hingga Masa Nabi Musa

Pembahasan ini menelusuri narasi Al-Qur'an mengenai keturunan Nabi Ya'qub hingga masa Nabi Musa 'alaihiassalam sebagai rangkaian sejarah keimanan Bani Israil.

Sejarah awal Bani Israil dalam perspektif Al-Qur'an bermula dari Nabi Ya'qub 'alaihihissalam-yang dalam tradisi Qur'ani disebut Israil-yang dianugerahi dua belas putra. Kedua belas putra inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal dua belas kabilah utama Bani Israil. Al-Qur'an mencatat dinamika internal keluarga Nabi Ya'qub, khususnya kecemburuan sebagian saudara terhadap Nabi Yusuf. Allah berfirman:

قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ

"Saudara-saudara Yusuf berkata, 'Sungguh Yusuf dan saudaranya (Benyamin) lebih dicintai ayah kita daripada kami, padahal kami ini adalah satu golongan yang kuat.'"

(Yusuf :8)

Kecemburuan tersebut mendorong mereka melakukan makar, hingga Yusuf dibuang ke dalam sumur dan akhirnya dijual sebagai budak. Al-Qur'an menyebutkan:

وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ

"Mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dasar sumur." (Yusuf :15)

Melalui rangkaian peristiwa ilahi, Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh bangsawan Mesir dan mendapat kedudukan tinggi sebagai pengelola perbendaharaan negara (Yusuf: 54–55). Pada tahap inilah keluarga Ya'qub, yang semula hidup sebagai komunitas badui di Palestina, dipindahkan ke Mesir sebagai komunitas pendatang yang dihormati. Allah ﷻ berfirman:

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ

"Dan Dia telah mendatangkan kalian dari kehidupan padang (badui)." (Yusuf:100)

Perpindahan ini menjadi titik awal terbentuknya komunitas besar Bani Israil di Mesir.

Setelah wafatnya Nabi Yusuf, status sosial Bani Israil tidak lagi dihormati oleh penguasa Mesir (*al-Aqbat*). Mereka diperlakukan sebagai kelompok kelas bawah dan akhirnya diperbudak dalam jangka waktu panjang. Al-Qur'an menggambarkan fase penindasan ini:

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

"Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian." (QS Al-Baqarah 2:49)

Penindasan tersebut mencapai puncaknya ketika Firaun mengeluarkan kebijakan pembunuhan massal bayi laki-laki Bani Israil. Pada masa pembantaian itu, Nabi Musa dilahirkan. Ibunya mendapat perintah ilahi untuk menyelamatkan bayi Musa dengan meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Allah berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا جَفَّتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ

“Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa, ‘Susuilah dia; jika engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai.’” (Al-Qasas :7)

Petinya kemudian ditemukan oleh keluarga Firaun. Al-Qur’an menggambarkan:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

“Keluarga Firaun memungutnya, padahal ia kelak menjadi musuh dan sumber kesedihan bagi mereka.” (Al-Qasas:8)

Istri Firaun memohon agar Musa tidak dibunuh, sebagaimana diabadikan Allah:

قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا

“Istri Firaun berkata, ‘Janganlah engkau membunuhnya; boleh jadi ia bermanfaat bagi kita.’” (Al-Qasas:9)

Dengan ketetapan Allah, Musa dikembalikan kepada ibu kandungnya sebagai penyusu, tanpa diketahui oleh Firaun bahwa itu adalah ibunya sendiri.

Setelah dewasa, Musa diangkat menjadi rasul dan diutus kepada Firaun dan kaumnya. Al-Qur’an menyebutkan bahwa Nabi Musa diberi sembilan mukjizat besar yang disaksikan oleh seluruh Mesir, termasuk Bani Israil. Allah berfirman:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

“Sungguh Kami telah memberikan kepada Musa sembilan tanda yang jelas.” (Al-Isra’:101)

Mukjizat tersebut meliputi tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, badai topan, belalang, kutu, katak, darah, dan berbagai tanda lainnya (Al-A‘raf:133). Menariknya, Al-Qur’an menegaskan bahwa bencana itu hanya menimpa kaum Firaun, sedangkan wilayah Bani Israil tetap selamat—sebuah peristiwa yang menunjukkan pemisahan ilahi (*tamyiz*) di tengah satu wilayah geografis.

Setelah serangkaian tanda-tanda besar ditampakkan kepada Firaun—seperti angin topan, belalang, kutu, katak, serta perubahan air menjadi darah—Al-Qur'an menegaskan bahwa bencana itu hanya menimpa kaum Firaun, sedangkan wilayah Bani Israil tetap selamat. Allah ﷻ berfirman:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ

“Kemudian Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda-tanda yang jelas.” (Al-A'raf :133)

Tradisi tafsir menjelaskan bahwa perubahan air menjadi darah hanya terjadi pada kaum Firaun, sedangkan Bani Israil tetap mendapatkan air yang jernih. Meskipun demikian, Firaun tetap menolak iman karena kesombongannya, hingga ia bertekad membunuh Musa dan kelompok Bani Israil.

Sebagai bentuk perlindungan, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israil keluar dari Mesir pada malam hari. Firman-Nya:

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا

“(Kami wahyukan kepada Musa), ‘Berangkatlah pada malam hari bersama hamba-hamba-Ku, lalu buatlah bagi mereka jalan yang kering di laut.’” (Taha :77)

Migrasi malam hari tersebut melibatkan laki-laki, perempuan, anak-anak, serta orang tua.

Dalam tradisi Yahudi, disebutkan bahwa jumlah Bani Israil yang keluar dari Mesir sekitar 600.000–700.000 orang. Namun, sejumlah ulama Muslim menilai angka tersebut tidak sesuai dengan kalkulasi demografis. Berdasarkan riwayat, ketika Ya'qub beserta keluarganya tiba di Mesir, jumlah mereka sekitar 70 jiwa. Jeda waktu dari masa Ya'qub hingga masa hijrah Nabi Musa diperkirakan sekitar 450 tahun, yang kira-kira setara dengan 5–6 generasi.

Secara aritmetika, pertumbuhan dari 70 menjadi 700.000 dalam 5–6 generasi mengimplikasikan peningkatan hingga 10.000 kali lipat, yang dinilai tidak realistis dalam konteks demografi kuno. Oleh sebab itu, sebagian ulama Muslim menilai angka

tersebut lebih bersifat simbolik untuk menunjukkan besarnya komunitas tersebut dalam tradisi Yahudi.

Catatan sejarah modern menunjukkan bahwa diaspora Yahudi di berbagai wilayah menyebabkan terjadinya perkawinan campuran, sehingga kelompok Yahudi masa kini memiliki variasi fisik yang luas. Hal tersebut menyebabkan konsep “kemurnian etnis” Yahudi menjadi perdebatan akademik, meskipun komunitas Yahudi modern tetap menggunakan payung identitas religius yang sama.

Setelah mengetahui kepergian Musa dan Bani Israil, Firaun segera mengerahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Al-Qur’an menggambarkan bahwa kedua kelompok itu akhirnya bertemu di tepi Laut Merah (*Bahr al-Ahmar*). Ketika jarak semakin dekat, kegelisahan muncul dari sebagian Bani Israil:

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ

“Ketika kedua kelompok saling melihat, para pengikut Musa berkata, ‘Kita pasti akan tertangkap.’” (Asy-Syu‘ara’ :61)

Di dalam literatur tafsir disebutkan bahwa ungkapan tersebut mengandung nada keraguan terhadap kepemimpinan Musa, meski mereka telah menyaksikan banyak mukjizat sebelumnya. Keraguan ini—yang berulang dalam beberapa peristiwa—menjadi salah satu karakter Bani Israil yang sering dicatat dalam Al-Qur’an sebagai peringatan moral. Musa memberikan jawaban tegas:

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

“Musa berkata, ‘Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Tuhanku bersamaku; Dia akan memberi petunjuk kepadaku.’” (Asy-Syu‘ara’ :62)

Jawaban Musa menegaskan keyakinannya bahwa penyelamatan ilahi akan terjadi sekalipun secara empiris tampak mustahil: di hadapan mereka terbentang laut, dan di belakang pasukan Firaun.

Setelah Allah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran Fir’aun melalui mukjizat besar terbelahnya Laut Merah, Al-Qur’an menegaskan bahwa peristiwa itu merupakan

salah satu ayat terbesar yang mereka saksikan langsung. Allah berfirman tentang pembelahan lautan,

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa: ‘Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.’ Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.”

وَأَزَلُّنَا تَمَّ الْآخَرِينَ

“Dan Kami dekatkan kelompok Fir’aun ke tempat itu.”

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

“Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya.”

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخَرِينَ

“Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.”

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa Allah membelah laut menjadi dua belas jalan (lorong), sesuai jumlah kabilah Bani Israil. Air yang menjadi dinding antar lorong itu bukan sekadar berdiri tegak, tetapi memiliki celah seperti jendela sehingga tiap kabilah dapat melihat keluarga mereka di lorong lain agar tidak takut dan menyangka mereka binasa.

Mukjizat lain juga terjadi tanah dasar laut secara tiba-tiba menjadi kering, bukan berlumpur sebagaimana kondisi dasar laut pada umumnya. Hal ini sesuai firman Allah:

فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

“Maka Kami selamatkan kalian, dan Kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, sedang kalian menyaksikan.” (Al-Baqarah: 50)

Para mufasir menegaskan frasa *“wa antum tanzhurun”* menandakan bahwa seluruh keajaiban itu terjadi di depan mata mereka—karunia yang semestinya mengukuhkan keimanan.

Ketika Bani Israil masih meragukan apakah Fir’aun benar-benar telah mati, Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa jasad Fir’aun diselamatkan agar menjadi bukti nyata:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tetap lalai dari tanda-tanda (kekuasaan) Kami.” (Yunus: 92)

Ayat ini menjadi konfirmasi bahwa keraguan Bani Israil dijawab langsung oleh tanda konkret dari Allah.

Setelah selamat dari Fir'aun, ujian keimanan Bani Israil segera muncul kembali.

Allah berfirman:

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Dan Kami seberangkan Bani Israil melewati lautan, lalu mereka mendatangi suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka berkata: ‘Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan yang mereka miliki.’ Musa berkata: ‘Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui.’” (Al-A‘raf: 138)

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menyaksikan mukjizat luar biasa, akidah mereka masih lemah, sehingga mudah terpengaruh oleh penyembahan berhala yang mereka lihat pertama kali setelah selamat.

Para mufasir—seperti Ibnu Kathir (1999) dan Al-Qurtubi (2006)—menjelaskan bahwa permintaan Bani Israil itu merupakan bentuk penyimpangan pertama setelah penyelamatan besar di Laut Merah. Ini menjadi bukti bahwa ujian keimanan mereka bukan hanya pada masa cobaan, tetapi juga pada masa nikmat.

Setelah selamat dari Fir'aun dan menyaksikan berbagai mukjizat besar, Bani Israil masih menunjukkan kecenderungan pembangkangan, termasuk saat Allah memerintahkan mereka memasuki Baitul Maqdis. Ketika mereka melihat suatu kaum yang sedang menyembah berhala, mereka meminta kepada Musa agar dibuatkan tuhan selain Allah. Permintaan ini secara jelas direkam oleh Al-Qur'an,

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mereka berkata, ‘Wahai Musa, buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan.’ Musa menjawab, ‘Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui.’” (Al-A‘raf: 138)

Musa menegur keras permintaan tersebut seraya menegaskan bahwa Allah-lah yang telah memuliakan mereka di atas umat-umat lain. Allah menyebutkan:

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Dia (Musa) berkata, ‘Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah untuk kalian, padahal Dia telah melebihkan kalian di atas seluruh umat?’” (Al-A‘raf: 140)

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa lemahnya akidah Bani Israil disebabkan oleh berabad-abad hidup di bawah penindasan Mesir — bangsa musyrik yang memperbudak mereka. Lingkungan dan dominasi musyrikin itu memengaruhi cara berpikir dan akhlak mereka.

Kemudian Allah memerintahkan Musa dan kaumnya memasuki negeri suci (Baitul Maqdis). Musa mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Musa berkata: Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Dia mengangkat para nabi dari (kalangan) kalian, menjadikan kalian ‘muluk’ (orang merdeka dan berkecukupan), dan memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan-Nya kepada siapa pun di antara umat-umat lain.” (Al-Ma‘idah: 20)

Musa melanjutkan perintah itu:

يَقَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

“Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Dan janganlah kalian berpaling ke belakang nanti kalian menjadi orang-orang yang rugi.” (Al-Ma‘idah: 21)

Namun respons Bani Israil sangat buruk. Ketika Musa memerintahkan mereka berjihad melawan penduduk kuat yang berada di dalam kota, mereka berkata:

قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدُخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا طَائِفًا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَأِنَّا دُخُلُونَ

“Mereka berkata: Wahai Musa, dalam negeri itu ada kaum yang sangat kuat. Kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar, barulah kami akan masuk.” (Al-Ma’idah: 22)

Ini merupakan alasan yang tidak logis, karena penduduk itu tidak mungkin keluar tanpa perjuangan. Kemudian ada dua orang shalih dari kalangan mereka — menurut sebagian ulama adalah Yusya’ bin Nun dan seorang mukmin lainnya — menasihati:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dua orang laki-laki yang takut kepada Allah dan Allah telah memberi nikmat kepada keduanya berkata: ‘Masuklah kalian melalui pintu itu; jika kalian memasukinya niscaya kalian akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman.’” (Al-Ma’idah: 23)

Namun nasihat itu tetap ditolak. Mereka menjawab dengan kalimat paling durhaka dalam sejarah Bani Israil:

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَنْدُخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

“Mereka berkata: ‘Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk selama mereka masih di dalamnya. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini saja.’” (Al-Ma’idah: 24)

Ini adalah puncak pembangkangan, karena mereka menyuruh Musa — seorang nabi yang mereka akui — untuk berperang sendirian.

Melihat kaumnya yang begitu membangkang, Musa berdoa:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

“Musa berkata: ‘Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik itu.’” (Al-Ma’idah: 25)

Allah pun menetapkan hukuman:

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

“Allah berfirman: ‘Sesungguhnya negeri itu diharamkan bagi mereka selama empat puluh tahun; mereka akan tersesat di bumi. Maka janganlah engkau bersedih terhadap kaum yang fasik itu.’” (Al-Ma’idah: 26)

Mereka akhirnya terkurung dan tersesat (periode Tih) selama empat puluh tahun — tidak dapat maju ke Baitul Maqdis ataupun kembali pulang — sebagai bentuk disiplin ilahi atas pembangkangan mereka.

Peristiwa-peristiwa besar yang dialami Bani Israil selama empat puluh tahun di Padang Tih—masa ketika mereka tersesat setelah menolak perintah memasuki Tanah Suci—menjadi salah satu gambaran paling jelas tentang hubungan antara nikmat Allah dan sikap pembangkangan mereka. Dalam masa ini, Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah tetap melimpahkan banyak mukjizat sebagai bentuk rahmat dan pelajaran, meskipun mereka berulang kali menunjukkan kekerasan hati.

Ketika mereka kehausan, Allah memerintahkan Musa memukul batu dengan tongkatnya. Maka keluarlah dua belas mata air, sesuai jumlah suku Bani Israil. Allah berfirman,

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Maka memancarlah darinya dua belas mata air. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi.” (Al-Baqarah: 60)

Ketika mereka meminta makanan, Allah menurunkan manna (makanan manis dari langit) dan salwa (burung yang mudah ditangkap). Namun mereka tetap mengeluh dan meminta makanan lain. Allah berfirman,

وَوَهَبْنَا عَلَىٰكُمْ الْغَمَامَ ۖ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Kami menaungi kalian dengan awan, dan Kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian.” (Al-Baqarah: 57)

Ketika mereka bosan dengan nikmat ini, mereka berkata kepada Musa:

لَا نَصْبِرُ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ...

“Kami tidak akan sabar dengan satu jenis makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi...” (Al-Baqarah: 61)

Musa menjawab dengan tegas:

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Pantaskah kalian menukar sesuatu yang lebih rendah dengan yang lebih baik?” (Al-Baqarah: 61)

Dalam kasus pembunuhan misterius, Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi, lalu memukulkan sebagian tubuhnya kepada mayat agar ia bangkit dan menyebutkan pelakunya. Namun mereka merespons dengan serangkaian pertanyaan penuh keberatan. Allah berfirman,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi.’” (Al-Baqarah: 67)

Tetapi mereka menjawab:

قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

“Mereka berkata: ‘Apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olokan?’ (Al-Baqarah: 67)

Kemudian dialog panjang terjadi hingga akhirnya mereka menemukan sapi sesuai kriteria dan menyembelihnya.

Puncak pembangkangan Bani Israil adalah ketika mereka meminta untuk melihat Allah secara terang-terangan. Allah berfirman,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

“Dan ketika kalian berkata: ‘Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan nyata,’ maka halilintar menyambar kalian sedang kalian menyaksikan.” (Al-Baqarah: 55)

Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali sebagai bentuk pelajaran.

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Kemudian Kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur.”

(Al-Baqarah: 56)

Setelah Nabi Musa pergi ke Thur Sinai untuk menerima Taurat, Bani Israil kembali terjatuh dalam kesyirikan. Mereka membuat patung anak sapi dari emas perhiasan, dan menyembahnya. Allah berfirman,

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ

“Dan kaum Musa setelah kepergiannya membuat anak sapi dari perhiasan mereka, sebuah patung yang memiliki suara.” (Al-A‘raf: 148)

Nabi Harun—yang ditinggalkan Musa sebagai pengganti—telah menasihati mereka dengan tegas:

يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

“Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanyalah diuji dengan itu. Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.” (Taha: 90)

Namun mereka membangkang dan menolak berhenti sampai Musa kembali. Ketika Musa turun dan melihat kesyirikan tersebut, ia marah besar sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur’an:

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

“Maka Musa melemparkan lembaran-lembaran (Taurat) itu dan menarik kepala saudaranya (Harun) sambil mendekatkannya kepadanya.” (Al-A‘raf: 150)

Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha maksimal, bahkan hampir dibunuh oleh Bani Israil:

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

“Ia (Harun) berkata: ‘Wahai putra ibuku, kaum ini telah melemahkanku dan hampir saja mereka membunuhku...’” (Al-A‘raf: 150)

Sebagai bentuk taubat dari kesyirikan terbesar itu, Allah menetapkan syariat yang sangat berat: mereka yang menyembah anak sapi harus dibunuh oleh mereka yang tidak menyembahnya. Perintah ini dinyatakan dalam Al-Qur'an:

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

“Bertaubatlah kepada Tuhan kalian, dan bunuhlah diri-diri kalian (yaitu: yang tidak menyembah membunuh yang menyembah). Itu adalah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian.” (Al-Baqarah: 54)

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa kegelapan malam diturunkan, kemudian mereka yang bertauhid membunuh yang menyembah sapi tanpa melihat siapa yang dibunuh. Barulah setelah itu Allah menerima taubat mereka.

Mayoritas generasi dewasa dari Bani Israil wafat di Padang Tih sebagai bentuk hukuman atas penolakan mereka memasuki Tanah Suci. Musa dan Harun juga wafat sebelum Bani Israil memasuki Baitul Maqdis.

Pemimpin berikutnya adalah Yusya' bin Nun, pelayan Musa yang disebut dalam kisah pertemuan Musa dengan Khidr:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, ‘Aku tidak akan berhenti hingga sampai ke pertemuan dua lautan...’” (Al-Kahf: 60)

Menurut Ibn Kathir (1999), *“fatah”* (pemuda) itu adalah Yusya' bin Nun. Melalui Yusya' lah Bani Israil masuk ke Baitul Maqdis. Pada hari penaklukan, matahari ditahan agar tidak terbenam—sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih—sehingga peperangan dapat diselesaikan sebelum malam tiba (karena peperangan di masa itu tidak dilakukan setelah gelap).

Allah memerintahkan Bani Israil memasuki kota itu dengan tawadhu':

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

“Masuklah kalian ke pintu itu sambil bersujud (ruku dengan tunduk), dan katakanlah: ‘Hittah’ (ampunilah dosa kami), niscaya Kami ampuni kesalahan kalian.” (Al-Baqarah: 58)

Namun mereka mengganti ucapan dan perintah itu dengan sikap mengejek. Dalam riwayat disebutkan mereka memasuki pintu dengan membelakangi (pantat terlebih dahulu), dan mengganti kata “ḥiṭṭah” dengan “ḥiṭṭah” (gandum), sebagai bentuk pelecehan terhadap perintah Allah.

3.2.3. Tiga Periode Besar dalam Sejarah Awal Bani Israil

Pembahasan ini menegaskan pembagian tiga periode besar dalam sejarah awal Bani Israil sebagai kerangka historis untuk memahami dinamika keimanan dan perjalanan kolektif mereka.

Para sejarawan Yahudi mengklasifikasikan sejarah Bani Israil awal menjadi tiga periode utama:

1. *‘Aṣr al-Qaḍat – Masa Para Hakim (Judges Period)*

Dimulai setelah Yusya‘ bin Nun membagi Bani Israil menjadi 12 wilayah sesuai 12 suku. Masing-masing dipimpin oleh seorang hakim (qaḍi) yang mengurus hukum dan sengketa. Periode ini berlangsung lama dan dipenuhi konflik internal antar-suku, kecemburuan, dan kekacauan politik. Allah mengutus beberapa nabi pada masa ini untuk memperbaiki moral mereka. Periode ini berakhir pada masa Nabi Samuel (Ṣamu’il).

2. *‘Aṣr al-Muluk – Zaman Para Raja (Monarchy Period)*

Ketika mereka meminta agar tidak lagi dipimpin oleh nabi tetapi oleh seorang raja, Allah mengutus Thalut sebagai raja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

“Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi raja bagi kalian.” (Al-Baqarah: 247)

Mereka menolak dan beralasan bahwa Thalut tidak kaya:

أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

“Bagaimana mungkin dia memerintah kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan darinya?” (Al-Baqarah: 247)

Setelah Thalut, muncullah raja besar—sekaligus nabi—Daud, kemudian putranya Sulaiman, yang membangun Haikal Sulaiman (*Solomon's Temple*) dan mencapai puncak kejayaan Bani Israil.

3. *'Aṣr Inqisam al-Mamlakah* – Masa Perpecahan Kerajaan

Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan mereka pecah menjadi dua:

- Kerajaan Israel (Utara) : dipimpin oleh Yerub'am bin Nabat
- Kerajaan Yahuza (Selatan) : dipimpin oleh Rehabeam bin Sulaiman (putra Nabi Sulaiman)

Perpecahan ini merupakan awal dari kemunduran besar mereka, yang kelak berujung pada invasi bangsa asing (Asyur dan Babilonia), penghancuran Haikal, dan masa pembuangan.

Setelah wafatnya Nabi Sulaiman 'alaihissalam, kerajaan yang sebelumnya bersatu di bawah kepemimpinannya mengalami ketegangan internal terkait pelaksanaan hukum-hukum syariat yang telah diterapkan pada masa beliau. Ketegangan tersebut bermula dari penolakan sebagian kelompok terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di masa Sulaiman.

Dalam tradisi Yahudi, peristiwa ini dikaitkan dengan munculnya tokoh Yerobeam bin Nebat (*Jeroboam son of Nebat*), yang menolak untuk tunduk kepada Rehabeam (Rehoboam), putra Nabi Sulaiman. Ketika Rehabeam menolak permintaan untuk menghapus sebagian regulasi yang dianggap berat, Yerobeam memimpin pemisahan sepuluh suku Israel dan mendirikan kerajaan terpisah, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Israel (*Northern Kingdom*). Sementara itu, Rehabeam tetap bertahan sebagai pemimpin dua suku, yaitu Yehuda (Judah) dan Benyamin (Benjamin), yang membentuk entitas politik baru bernama Kerajaan Yehuda (*Southern Kingdom*). Dari nama “Yehuda” inilah istilah “Yahudi” berkembang pada masa selanjutnya sebagai sebutan bagi keturunan serta komunitas penganut agama mereka.

Perpecahan ini melahirkan dua kerajaan yang secara genealogis masih memiliki hubungan kekerabatan, tetapi secara politik sering berkonflik. Sejarah mencatat bahwa

hubungan antara Kerajaan Israel dan Kerajaan Yehuda bersifat fluktuatif, pada beberapa masa mereka terlibat peperangan, namun pada masa lain mereka bekerja sama dalam menghadapi ancaman dari kekuatan regional seperti Aram, Asyur, dan Babilonia.

Kondisi dualisme ini berlangsung selama berabad-abad hingga keduanya mengalami kehancuran oleh kekuatan imperium dari luar. Kerajaan Israel di utara akhirnya dihancurkan oleh Kekaisaran Asyur, yang menyebabkan diaspora besar-besaran atas sepuluh suku Israel. Tak lama kemudian, Kerajaan Yehuda mengalami invasi dari Raja Babilonia, Nebukadnezar II. Serangan ini berujung pada penghancuran Bait Suci (Haikal Sulaiman) untuk pertama kalinya, serta pembuangan sebagian besar penduduk Yehuda ke Babilonia. Pada masa inilah tradisi Yahudi menyebutkan bahwa sebagian teks Taurat mengalami kehilangan, dan struktur keagamaan Bani Israil mengalami kekacauan.

Setelah periode Babilonia, kawasan Palestina beberapa kali berpindah kekuasaan, termasuk di bawah Mesir kuno serta Persia. Pada masa Kekaisaran Persia, sebagian komunitas Yahudi diizinkan kembali ke Palestina dan memulai rekonstruksi kehidupan keagamaan dan sosial mereka. Selanjutnya, kekuasaan bergeser kepada Romawi yang kembali menghancurkan Bait Suci untuk kedua kalinya pada tahun 70 M. Sejak itu, hanya satu bagian tembok yang tersisa—yang kini dikenal sebagai Tembok Ratapan (*Western Wall*)—yang dalam tradisi Yahudi menjadi simbol sentral kerinduan mereka terhadap pemulihan kerajaan dan rekonstruksi Bait Suci.

Dalam konteks modern, keyakinan keagamaan sebagian kelompok Yahudi mengenai pentingnya membangun kembali Bait Suci memainkan peran dalam dinamika politik kontemporer di Palestina. Keyakinan tersebut menjadi salah satu unsur ideologis yang digunakan untuk menjustifikasi klaim atas wilayah Yerusalem dan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, narasi keagamaan, sejarah, dan politik Yahudi saling berkelindan dalam membentuk realitas konflik yang berlangsung hingga masa kini.

3.2.4. Gambaran Umum Bani Israil dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama yang menggambarkan sejarah awal, identitas, serta relasi spiritual Bani Israil—nenek moyang komunitas Yahudi—dalam perspektif wahyu. Penggambaran ini tidak hanya menampilkan narasi historis, tetapi juga struktur teologis yang menempatkan Bani Israil sebagai umat yang pernah menerima nikmat besar, bimbingan langsung para nabi, dan kedudukan mulia, sebelum kemudian mengalami masa penyimpangan dan ujian panjang. Dengan demikian, kisah mereka memiliki dimensi edukatif yang sangat kuat bagi umat Islam.

Salah satu aspek yang paling dominan dalam penggambaran Yahudi dalam Al-Qur'an adalah banyaknya nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka. Al-Qur'an menegaskan keistimewaan itu dengan ungkapan langsung. Allah berfirman:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلَيَّ فُضِّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat.” (Al-Baqarah :47)

Menurut al-Tabari, kelebihan tersebut mencakup jumlah nabi yang sangat banyak, diturunkannya kitab suci, serta pertolongan Allah dalam berbagai peristiwa besar. Al-Qur'an berkali-kali menekankan bahwa penyelamatan dari Fir'aun merupakan salah satu nikmat terbesar. Allah berfirman:

...وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ

“Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kalian dari (kezaliman) keluarga Fir'aun yang menyiksa kalian dengan siksaan yang berat” (Al-Baqarah :49)

Ayat ini menggambarkan pembebasan moral, sosial, dan politik yang menjadi fondasi sejarah awal Bani Israil.

Kemudian, Bani Israil melihat mukjizat yang nyata yaitu peristiwa terbelahnya laut. Peristiwa ini menjadi tonggak pembebasan sekaligus bukti langsung kekuasaan Allah:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami belah laut untuk kalian, lalu Kami selamatkan kalian dan Kami tenggelamkan Fir’aun beserta pengikutnya.” (Al-Baqarah:50)

Para sejarawan modern (Kitchen, Albright) menyebutkan bahwa tradisi Israel kuno memang menyimpan memori kolektif mengenai eksodus besar dari Mesir—yang diperkuat Al-Qur’an dari sisi wahyu.

Pada masa pengembaraan di padang Tih, Al-Qur’an menyebutkan empat nikmat utama,

1. Pembagian menjadi dua belas suku:

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

“Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar.” (Al A’raf : 60)

2. Dua belas mata air:

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

“Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air.” (Al A’raf : 60)

3. Manna dan salwa:

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى

“Dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa.” (Al A’raf : 60)

4. Naungan awan:

وَوَضَّعْنَا عَلَيْكُمُ الْعِمَامَ

“Dan Kami naungi kamu dengan awan.” (Al-Baqarah:57)

Ayat-ayat ini menunjukkan pemeliharaan langsung Allah terhadap kebutuhan fisik dan sosial Bani Israil.

Sebagian besar nabi yang disebut dalam Al-Qur’an berasal dari keturunan Bani Israil, seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakariya, Yahya, ‘Isa, dan lainnya. Al-Qur’an menyebutkan:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

“Dan sungguh Kami telah memberikan kepada Bani Israil kitab, hukum, dan kenabian...” (Al-Jatsiyah:16)

Tiga hal ini—kitab, kebijaksanaan, dan nabi—merupakan nikmat yang tidak diberikan kepada banyak umat lain secara bersamaan. Setelah masa pembinaan tersebut, Al-Qur’an menyinggung berbagai bentuk penyimpangan sebagian dari mereka, bukan untuk menghina satu etnis tertentu, tetapi sebagai peringatan sejarah. Beberapa bentuk penyimpangan itu antara lain:

1. Melanggar perjanjian (*al-‘Ahd*), sebagaimana firman Allah:

أَفْتَوْمُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?” (Al-Baqarah:85)

2. Mensyirikkan Allah dengan menyembah anak sapi:

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

“...lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim” (Al-Baqarah:51)

3. Pembangkangan terhadap Nabi Musa:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

“Dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja” (Al-Ma’idah:24)

4. Sikap keras kepala, menuntut melihat Allah secara langsung:

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

Dan ketika kamu berkata: ‘Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang,’ karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya” (Al-Baqarah:55)

Semua ini menjadi bagian dari rekam sejarah spiritual yang Allah jadikan pelajaran bagi umat Islam.

Menurut para mufasir besar, pola keimanan Bani Israil menunjukkan dinamika antara ketaatan ketika menyaksikan tanda-tanda Allah dan penyimpangan ketika

cobaan telah berlalu. Ibn Jarir ath-Thabari menegaskan bahwa Bani Israil pada asalnya adalah kaum beriman yang menerima wahyu Taurat, sebagaimana firman Allah:

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ (Al-Baqarah:2:47)

—“Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku...”. Ath-Tabari menjelaskan: «كَانُوا مُؤْمِنِينَ» — “mereka beriman kepada Allah, mengakui kenabian Musa, dan menerima Taurat.”

Demikian pula Ibnu Katsir (1999) menyatakan bahwa mereka adalah Ahlul Kitab yang mengenal Allah: «يَعْرِفُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَهُ وَيُزَوِّونَ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ» — “mereka mengenal Allah, beribadah kepada-Nya, dan mengakui rububiyah-Nya.” Namun, kedua mufasir sepakat bahwa keimanan mereka tidak konsisten dan sering diikuti penyimpangan berat. Penyimpangan terbesar adalah penyembahan anak sapi, sebagaimana firman Allah: “Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sembah...” (Al-Baqarah:51). Ath-Thabari (2000) menilai: «أَعْظَمُ ذُنُوبِهِمْ عِبَادَةُ الْعِجْلِ بَعْدَ الْآيَاتِ» — “dosa terbesar mereka adalah menyembah anak sapi setelah melihat ayat-ayat Allah,” sementara Ibnu Katsir berkata: «وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْكُفْرِ إِذْ رَأَوْا الْبَحْرَ يَنْفَلِقُ ثُمَّ عَبَدُوا الْعِجْلَ» — “ini kekufuran paling besar, karena mereka telah melihat laut terbelah lalu menyembah anak sapi.” Al-Qurṭubi (2006) menambahkan aspek kesengajaan: «اتَّخَذُوهُ إِلَهًا مَعَ عِلْمِهِمْ» — “mereka menjadikannya tuhan padahal mengetahui kebatilannya.”

Selain itu, penyimpangan lain adalah taḥrif (mengubah kitab), QS. Al-Baqarah:75: “Mereka mengubah kalam Allah setelah memahaminya.” Ath-Thabari (2000) menafsirkan: «كَانُوا يُبَدِّلُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَمْدًا» — “mereka sengaja menukar kalam Allah,” sedangkan Ibnu Katsir (1999) menegaskan: «يَحْدِفُونَ وَيَزِيدُونَ وَيُغَيِّرُونَ» — “mereka menghapus, menambah, dan mengubah.” Al-Qurṭhubi (2006) menilai perubahan itu mengenai lafaz dan makna: «التَّبْدِيلُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى». Penyimpangan besar lainnya adalah pembangkangan terhadap para nabi, QS. Al-Baqarah:92: “Musa datang kepada kalian dengan bukti-bukti, tetapi kalian mengambil anak sapi sebagai sembah...”. Ath-Thabari menyebut ini sebagai bentuk إغراض — berpaling dari kebenaran setelah mengetahui. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa akar penyimpangan mereka adalah

kerasnya hati, QS. Al-Baqarah:74: “Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu...”. Al-Qurtubi menekankan: «قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا» — “hati mereka keras karena dikuasai cintanya kepada dunia.”

Kesimpulannya, pola Bani Israil menurut tiga mufasir besar ini adalah iman berdasarkan pengetahuan dan mukjizat, tetapi diikuti penyimpangan karena hawa nafsu, kecintaan dunia, dan kerasnya hati—sebuah pola yang dijadikan ibrah bagi umat Muhammad agar tidak mengulangi kesalahan mereka.

Aspek	Ibn Jarir ath-Tabari	Ibn Katsir	Al-Qurtubi
1. Keimanan Awal Bani Israil	Menegaskan bahwa mereka beriman kepada Allah, mengakui kenabian Musa, dan menerima Taurat. Kutipan: «كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مَقْرَيْنَ بَنِيؤ موسى قَابِلِينَ لِلتَّوْرَةِ». Dalil: QS al-Baqarah :47.	Mereka Ahlul Kitab yang mengenal Allah, beribadah, dan mengakui rububiyyah-Nya. Kutipan: «يَعْرِفُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَهُ وَيَقْرَأُونَ لَهُ بِالرَّبُّوبِيَّةِ». Dalil: QS al-Baqarah :122.	Mereka umat yang telah diberi kitab dan nikmat besar, namun diuji dengan berbagai cobaan. Dalil: QS al-Jumu‘ah :5.
2. Pola Keimanan	Iman muncul ketika mereka melihat ayat-ayat besar, seperti terbelahnya laut atau turunnya manna wa salwa.	Menekankan bahwa mereka beriman ketika bahaya datang, namun melemah setelah selamat.	Memahami iman mereka sebagai iman berdasarkan tradisi dan mukjizat, bukan ketundukan batin yang stabil.

3. Penyimpangan: Penyembahan Anak Sapi	Menyebut ini dosa terbesar mereka setelah menyaksikan mukjizat. Kutipan: «أعظم ذنوبهم عبادة العجل بعد الآيات». Dalil: QS al-Baqarah :51.	Menyebutnya sebagai kufur paling besar, karena mereka telah melihat laut terbelah. Kutipan: «وهذا من أعظم الكفر إذ رأوا البحر ينقلب ثم عبدوا العجل».	Menekankan unsur kesengajaan, meski mereka tahu itu batil. Kutipan: «اتخذوه إلها مع علمهم».
4. Penyimpangan: Tahrif (mengubah kitab)	«كانوا يبدلون كلام الله» — mereka mengubah kalam Allah secara sengaja. Dalil: QS al-Baqarah 2:75.	Menjelaskan bentuk tahrif: menghapus, menambah, mengganti lafaz. Kutipan: «يحذفون ويزيدون».	Menilai tahrif mencakup perubahan lafaz dan makna. Kutipan: «التبديل في اللفظ والمعنى».
5. Pembangkangan terhadap para Nabi	Disebut sebagai sikap i'rad (berpaling dari kebenaran). Dalil: QS Al-Baqarah :92.	Menyebut pembunuhan para nabi sebagai bentuk kezaliman dan kedurhakaan ekstrem. Dalil: QS Ali 'Imran :21.	Menggarisbawahi bahwa mereka menolak para nabi karena kedengkian dan hawa nafsu.

6. Akar Penyimpangan: Keras Hati	Karena berpaling setelah jelas kebenarannya.	Mengaitkan dengan QS Al- Baqarah :74: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ».	«قَسَتْ قُلُوبَهُمْ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا — hati mereka keras karena dikuasai cinta dunia.
7. Pola Umum (Kesimpulan)	Iman → melihat ayat → selamat → lupa → maksiat.	Keimanan mereka tidak stabil, berubah sesuai kondisi.	Penyimpangan mereka menjadi ibrah bagi umat Muhammad.

Tabel 1

Inti Sari Pola Keimanan & Penyimpangan Bani Israil Menurut Tiga Mufasir

3.3. Masuknya Bangsa Yahudi ke Palestina

Pembahasan mengenai awal masuknya Yahudi ke Palestina perlu dibedakan secara konseptual antara kehadiran historis Bani Israil pada masa kuno dan imigrasi Yahudi modern yang bersifat kolonial-politik pada abad ke-19 hingga ke-20. Kegagalan membedakan dua fase ini sering kali melahirkan narasi yang ahistoris dan digunakan untuk membenarkan klaim teritorial kontemporer.

Secara historis-religius, Bani Israil berasal dari keturunan Nabi Ya‘qub (Israel), yang bermigrasi dari wilayah Syam selatan ke Mesir pada masa Nabi Yusuf. Setelah peristiwa Eksodus yang dipimpin Nabi Musa, Bani Israil kembali ke wilayah Kanaan (Palestina kuno). Dalam tradisi Al-Qur’an dan Taurat, wilayah ini dipandang sebagai *ard al-muqaddasah* (tanah suci), namun kepemilikan atasnya bersifat bersyarat, yakni tergantung pada ketaatan kepada Allah, bukan hak etnis absolut.

Al-Qur’an memposisikan Palestina sebagai *al-ard al-muqaddasah* (tanah suci) dalam kerangka amanah ilahi yang bersifat moral dan spiritual, bukan sebagai hak etnis yang mutlak dan abadi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah ketika memerintahkan Bani Israil melalui Nabi Musa عليه السلام:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

“Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan bagimu, dan janganlah kamu berpaling ke belakang, sehingga kamu menjadi orang-orang yang rugi.” (Al-Ma'idah: 21)

Dalam Tafsir *al-Qur'an al-'Azhim* (1999), Ibnu Katsir menegaskan bahwa kata *kataba* (menetapkan) dalam ayat ini tidak bermakna pemberian hak kepemilikan abadi, melainkan janji ilahi yang bersyarat dengan ketaatan dan kesungguhan menjalankan perintah Allah. Ketika Bani Israil menolak untuk berjihad dan enggan menaati perintah tersebut, Allah mencabut izin itu dan menjatuhkan hukuman historis berupa larangan memasuki tanah suci selama empat puluh tahun, sebagaimana firman-Nya:

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ

“Allah berfirman: Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi.” (Al-Ma'idah: 26)

Ath-Tabari dalam *Jami' al-Bayan* (2000), menjelaskan bahwa makna “ditetapkan bagi kalian” adalah pemberian kesempatan dan izin, bukan hak kekal yang melekat pada darah dan keturunan. Ia mengutip pendapat para sahabat dan tabi'in bahwa izin tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada generasi lain apabila syarat ketaatan tidak dipenuhi. Dengan demikian, Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa relasi manusia dengan tanah suci bersifat etis dan spiritual, bukan genealogis.

Prinsip ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan hilangnya kedudukan Bani Israil akibat pembangkangan berulang terhadap perjanjian ilahi (*mitsaq*). Allah berfirman:

فَبِمَا نَفَضْنَاهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

“Maka karena mereka melanggar perjanjian, Kami melaknat mereka dan menjadikan hati mereka keras.” (Al-Ma'idah: 13)

Ibnu Katsir (1999) menafsirkan ayat ini sebagai penegasan adanya konsekuensi historis dan sosial dari pelanggaran terhadap perjanjian Allah, termasuk dicabutnya

perlindungan ilahi dan hilangnya kekuasaan politik. Menurutnya, kehancuran kerajaan Bani Israil dan terjadinya diaspora merupakan hukuman sejarah atas penyimpangan moral dan keagamaan.

Ath-Thabari (2000) menambahkan bahwa laknat tersebut mencakup penghancuran negeri, pengusiran, dan dominasi bangsa lain atas mereka, yang secara nyata terwujud dalam penaklukan Babilonia dan Romawi. Lebih jauh, Al-Qur'an tidak memonopoli kesucian dan keberkahan Palestina untuk satu kaum tertentu, melainkan menegaskan sebagai wilayah yang diberkahi bagi seluruh umat beriman. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah tentang peristiwa Isra' Mi'raj:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang Kami berkahi sekelilingnya." (Al-Isra': 1)

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa keberkahan Palestina mencakup kesuburan alam, keberlanjutan risalah kenabian, serta kehadiran orang-orang saleh dari berbagai umat dan generasi. Ath-Thabari (2000) menafsirkan frasa *"barakna hawlahu"* sebagai keberkahan yang bersifat universal dan terus diwariskan lintas umat beriman, sehingga kesucian Palestina tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh satu kelompok etnis atau agama.

Al-Qur'an juga menggambarkan dinamika naik-turunnya kekuasaan Bani Israil sebagai bagian dari hukum sejarah ilahi (*sunnatullah*). Allah berfirman:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفُسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوهَا كَبِيرًا

"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab, bahwa sungguh kamu akan membuat kerusakan di bumi dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." (Al-Isra': 4)

Ibnu Katsir (1999) menafsirkan dua kerusakan tersebut sebagai pelanggaran moral dan politik besar yang berujung pada kehancuran Yerusalem dan penaklukan oleh bangsa asing. Ath-Thabari (2000) menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan pola sejarah yang konsisten: kekuasaan diberikan kepada suatu kaum selama mereka

menegakkan keadilan dan ketaatan, dan dicabut ketika mereka tenggelam dalam kezaliman.

Atas dasar itu, Al-Qur'an secara prinsipil menolak segala bentuk klaim teologis yang digunakan untuk melegitimasi penindasan dan penjajahan. Allah berfirman:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوفًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

“Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan.” (Al-Qasas: 83)

Menurut Ibnu Katsir (1999), ayat ini merupakan prinsip universal Islam bahwa keunggulan dan kemenangan tidak diberikan kepada kaum yang melakukan kezaliman, sekalipun mereka mengatasnamakan wahyu dan janji Tuhan.

Ath-Thabari (2000) menegaskan bahwa *'uluww* (kesombongan politik) dan *fasad* (kerusakan sosial) merupakan sebab utama runtuhnya suatu kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an.

Dalam pandangan penulis tesis, rangkaian ayat Al-Qur'an beserta penafsiran para mufasir tersebut menunjukkan secara konsisten bahwa konsep kesucian dan kepemilikan atas Palestina dalam Islam tidak pernah diletakkan pada dasar etnis, ras, atau klaim sejarah semata, melainkan pada prinsip amanah ilahi yang tunduk pada ketaatan, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa pemberian izin kepada Bani Israil untuk memasuki tanah suci bersifat bersyarat dan dapat dicabut ketika mereka melakukan pembangkangan, sehingga klaim teologis atas wilayah tersebut tidak dapat dipahami sebagai hak absolut yang melekat sepanjang masa. Fakta Qur'ani ini, diperkuat oleh penjelasan Ibnu Katsir dan ath-Thabari, menegaskan bahwa kekuasaan dan kedudukan politik dalam perspektif wahyu mengikuti hukum sejarah ilahi (*sunnatullah*), yaitu diberikan kepada kaum yang menegakkan keadilan dan dicabut dari mereka yang terjerumus dalam kezaliman dan kerusakan.

Lebih jauh, penulis berpandangan bahwa penegasan Al-Qur'an tentang keberkahan Palestina yang bersifat universal menjadi kritik mendasar terhadap narasi

eksklusivisme keagamaan yang berkembang dalam wacana politik modern. Kesucian Palestina tidak dimonopoli oleh satu kelompok, melainkan menjadi ruang spiritual dan historis bagi berbagai umat beriman sepanjang zaman. Oleh karena itu, penggunaan dalil-dalil agama untuk melegitimasi dominasi politik, penjajahan, dan pengusiran pihak lain bertentangan secara langsung dengan prinsip Al-Qur'an yang menolak *'uluww* (kesombongan kekuasaan) dan *fasad* (kerusakan sosial), sebagaimana ditekankan dalam Surat Al-Qasas ayat 83.

Dengan demikian, penulis tesis menilai bahwa pendekatan Qur'ani terhadap Palestina menawarkan kerangka etis-kritis dalam membaca konflik kontemporer, yaitu bahwa legitimasi politik tidak dapat dibangun di atas klaim teologis yang ahistoris dan eksklusif, melainkan harus diuji melalui standar keadilan, kemanusiaan, dan amanah ilahi. Perspektif ini sekaligus menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber kritik normatif terhadap segala bentuk kolonialisme dan penindasan, tanpa memandang pelakunya, serta menegaskan bahwa keberpihakan wahyu senantiasa berada di sisi keadilan dan martabat manusia.

3.4. Lahirnya Zionisme dan Awal Imigrasi Yahudi Modern

Perubahan paling mendasar dalam sejarah Palestina modern terjadi pada akhir abad ke-19 dengan munculnya Zionisme sebagai gerakan politik terorganisir di Eropa. Berbeda dari keberadaan komunitas Yahudi tradisional di Palestina yang telah berlangsung selama berabad-abad dalam kerangka keagamaan dan sosial lokal, Zionisme hadir sebagai proyek ideologis modern yang bertujuan membentuk sebuah negara Yahudi berdaulat melalui kolonisasi teritorial.

Titik artikulasi utama gerakan ini secara luas dikaitkan dengan Theodor Herzl, seorang jurnalis dan intelektual Yahudi Austria-Hongaria, yang pada tahun 1896 menerbitkan pamflet politik berjudul *Der Judenstaat* (Negara Yahudi). Dalam karya tersebut, Herzl menyimpulkan bahwa antisemitisme di Eropa tidak dapat diselesaikan

melalui asimilasi atau emansipasi sipil, melainkan melalui pembentukan sebuah negara nasional Yahudi di luar Eropa.

Zionisme politik lahir dalam konteks Eropa modern yang ditandai oleh nasionalisme, kolonialisme, dan rasionalitas negara-bangsa. Para pemikir Zionis awal memandang “masalah Yahudi” sebagai persoalan struktural Eropa, namun solusi yang ditawarkan tidak diarahkan pada transformasi sistem sosial-politik Eropa itu sendiri, melainkan pada pemindahan populasi Yahudi Eropa ke wilayah lain. Palestina kemudian dipilih bukan semata karena alasan demografis, melainkan karena simbolisme religius dan historis yang kuat, yang oleh para pemimpin Zionis dimobilisasi untuk membangun legitimasi ideologis dan emosional, meskipun mereka menyadari bahwa wilayah tersebut telah dihuni oleh penduduk pribumi Arab selama berabad-abad.

Implementasi gagasan Zionisme politik mulai terlihat secara konkret melalui gelombang imigrasi Yahudi modern yang dikenal sebagai Aliyah. Gelombang pertama (First Aliyah, 1882–1903) terdiri terutama dari Yahudi Eropa Timur dan Rusia yang terdorong oleh pogrom dan diskriminasi. Gelombang ini diikuti oleh Second Aliyah (1904–1914), yang membawa imigran dengan kesadaran ideologis Zionis yang lebih kuat dan visi kolonisasi yang lebih sistematis. Para sejarawan sepakat bahwa migrasi ini bukanlah migrasi spontan atau alami sebagaimana migrasi ekonomi tradisional, melainkan migrasi politik yang terorganisir, dirancang, dan didukung oleh institusi-institusi Zionis internasional seperti *Jewish Colonization Association (JCA)* dan kemudian *Jewish National Fund (JNF)*.

Ciri utama imigrasi Zionis ini adalah keterkaitannya yang erat dengan akuisisi tanah dan pembangunan koloni pemukim (*settler colonies*). Tanah-tanah di Palestina dibeli—secara legal dalam kerangka hukum Ottoman—namun sering kali melalui tuan tanah besar (*absentee landlords*) yang tinggal di Beirut, Damaskus, atau Istanbul, bukan dari para petani Arab (*fellahin*) yang telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun. Akibatnya, setelah tanah berpindah tangan kepada lembaga Zionis,

para petani lokal kerap diusir atau kehilangan akses atas lahan yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Praktik ini bukan sekadar konsekuensi tak disengaja, melainkan bagian dari strategi kolonisasi yang bertujuan menciptakan basis demografis Yahudi yang terpisah dan mandiri.

Selain itu, koloni-koloni Zionis awal menerapkan prinsip *Hebrew Labor* (*avodah ivrit*), yaitu kebijakan eksklusivitas tenaga kerja Yahudi, yang secara sistematis mengecualikan tenaga kerja Arab dari pertanian dan industri pemukim. Kebijakan ini memperdalam segregasi ekonomi dan sosial antara pemukim Yahudi dan penduduk Arab setempat, serta menandai pergeseran dari pola koeksistensi pragmatis pra-abad ke-20 menuju relasi yang bersifat kompetitif dan eksklusif.

Para sarjana seperti Gershon Shafir dan Rashid Khalidi menilai bahwa fase ini merupakan awal dari konflik struktural, bukan konflik keagamaan spontan, karena akar masalahnya terletak pada perebutan tanah, tenaga kerja, dan kedaulatan.

Penting dicatat bahwa hingga awal abad ke-20, otoritas Ottoman masih memandang Palestina sebagai wilayah multi-komunal yang harus dikelola secara administratif, bukan sebagai ruang nasional eksklusif. Pemerintah Ottoman bahkan sempat berupaya membatasi imigrasi Yahudi massal dan pembelian tanah oleh orang asing, meskipun kebijakan ini sering kali tidak efektif akibat tekanan diplomatik Eropa dan celah administratif. Namun demikian, fakta bahwa pembatasan tersebut pernah diupayakan menunjukkan bahwa perubahan demografis dan sosial akibat imigrasi Zionis telah dipersepsikan sebagai persoalan politik sejak dini.

Dari sudut pandang penduduk Arab Palestina, proses ini menandai awal disrupsi mendalam terhadap tatanan sosial yang telah lama stabil. Hilangnya tanah, tersingkirnya petani lokal, dan munculnya komunitas pemukim yang terorganisir secara politik tetapi terpisah secara sosial memunculkan kesadaran kolektif baru di kalangan masyarakat Arab Palestina. Kesadaran ini belum sepenuhnya berbentuk nasionalisme modern pada tahap awal, namun sudah terwujud dalam bentuk resistensi

lokal, protes administratif, dan penolakan terhadap proyek kolonisasi yang dipandang mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Dalam perspektif normatif Islam sebagaimana dipahami para ulama tafsir klasik, praktik kolonisasi yang menghasilkan pengusiran, ketidakadilan sosial, dan dominasi satu kelompok atas kelompok lain bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan amanah kekuasaan. Meskipun para mufasir klasik tidak membahas Zionisme—karena merupakan fenomena modern—kerangka tafsir mereka terhadap ayat-ayat tentang tanah, kekuasaan, dan *fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) memberikan dasar etis untuk menilai bahwa legitimasi kehadiran suatu kelompok di sebuah wilayah tidak ditentukan oleh klaim teologis atau historis semata, melainkan oleh praktik keadilan dan perlindungan terhadap penduduk yang telah ada.

Dengan demikian, lahirnya Zionisme dan dimulainya imigrasi Yahudi modern ke Palestina tidak dapat dipahami sebagai kelanjutan alami dari sejarah religius Yahudi di wilayah tersebut, melainkan sebagai proyek politik modern yang berakar pada pengalaman Eropa dan dijalankan melalui mekanisme kolonial pemukiman. Proyek ini secara bertahap mengubah struktur demografis, ekonomi, dan sosial Palestina, serta menciptakan ketegangan struktural yang menjadi fondasi konflik Palestina–Israel pada abad ke-20.

3.5. Mandat Inggris dan Deklarasi Balfour

Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I (1918) menandai berakhirnya tatanan politik lama di Palestina dan membuka jalan bagi penetrasi kolonial Eropa dalam bentuk yang dilegalkan oleh hukum internasional. Palestina kemudian ditempatkan di bawah kekuasaan Inggris melalui sistem Mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang secara formal diklaim bertujuan mempersiapkan wilayah tersebut menuju pemerintahan sendiri.

Namun, berbeda dengan mandat-mandat lain, Mandat Inggris atas Palestina sejak awal dibebani oleh komitmen politik yang kontradiktif, yakni kewajiban untuk

memfasilitasi pendirian “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di wilayah yang telah dihuni oleh mayoritas penduduk Arab.

Pondasi politik mandat ini adalah Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour. Dalam suratnya kepada Lord Rothschild, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap pendirian *a national home for the Jewish people* di Palestina, dengan syarat tidak merugikan “hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina”. Formulasi ini sejak awal mengandung ambiguitas serius, karena mengakui hak kolektif nasional Yahudi, tetapi secara simultan meniadakan hak politik kolektif penduduk Arab Palestina yang pada saat itu berjumlah sekitar 90 persen dari total populasi.

Sejarawan seperti Rashid Khalidi menegaskan bahwa Deklarasi Balfour merupakan bentuk kolonialisme deklaratif, yakni janji politik yang dibuat oleh kekuatan imperialis atas tanah yang bukan miliknya dan tanpa persetujuan penduduk asli (Khalidi, *The Iron Cage*, 2006).

Ketika Mandat Palestina secara resmi disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922, isi Deklarasi Balfour dimasukkan langsung ke dalam teks mandat. Dengan demikian, dukungan terhadap Zionisme bukan lagi kebijakan sementara, melainkan kewajiban hukum internasional yang mengikat Inggris. Mandat Palestina menjadi satu-satunya mandat Liga Bangsa-Bangsa yang secara eksplisit memandatkan perubahan demografis dan politik demi kepentingan kelompok pendatang, sebuah fakta yang oleh banyak sarjana dinilai sebagai anomali hukum internasional (Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, 2005).

Dalam praktik administratifnya, Inggris secara aktif memfasilitasi imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina dalam skala besar dan terorganisir. Kebijakan imigrasi Mandat membuka pintu bagi puluhan ribu imigran Yahudi, terutama pada dekade 1920-an dan 1930-an, seiring meningkatnya antisemitisme di Eropa Timur dan naiknya rezim Nazi di Jerman. Inggris menerbitkan sertifikat imigrasi khusus, memberikan

perlindungan militer terhadap pemukiman Yahudi, serta mengizinkan lembaga-lembaga Zionis seperti *Jewish Agency* berfungsi sebagai otoritas semi-negara yang mengelola imigrasi, pendidikan, ekonomi, dan hubungan luar negeri komunitas Yahudi di Palestina.

Sebaliknya, penduduk Arab Palestina tidak diberikan lembaga perwakilan nasional yang setara. Permintaan mereka untuk membentuk pemerintahan representatif berbasis mayoritas penduduk secara konsisten ditolak oleh Inggris, karena dinilai akan menghambat implementasi Deklarasi Balfour. Sejarawan Albert Hourani mencatat bahwa Mandat Inggris menciptakan struktur politik yang timpang, di mana satu komunitas dipersiapkan untuk kenegaraan, sementara komunitas lain dikelola sebagai subjek kolonial (Hourani, *A History of the Arab Peoples*, 1991).

Ketimpangan ini semakin tajam dengan pembentukan dan perlindungan terhadap organisasi-organisasi keamanan Zionis seperti Haganah, yang berkembang dari milisi pertahanan menjadi kekuatan militer terorganisir. Inggris, meskipun secara formal melarang kepemilikan senjata ilegal, dalam praktiknya mentoleransi dan bahkan melatih unsur-unsur keamanan Yahudi, terutama selama Perang Dunia II. Sebaliknya, perlawanan Arab Palestina terhadap kebijakan kolonial dan imigrasi massal ditekan secara keras, terutama selama Pemberontakan Arab 1936–1939, melalui penangkapan massal, eksekusi, penghancuran desa, dan penerapan hukum darurat. Ilan Pappé menyebut periode ini sebagai fase “militerisasi kolonial” yang secara sistematis melemahkan masyarakat Palestina sebelum 1948 (Pappé, *A History of Modern Palestine*, 2004).

Dampak langsung dari kebijakan Mandat Inggris adalah perubahan drastis komposisi demografis Palestina. Jika pada akhir periode Ottoman penduduk Yahudi hanya sekitar 8–10 persen, maka pada akhir 1930-an jumlah mereka meningkat menjadi hampir 30–33 persen dari total populasi. Perubahan ini bukan hasil pertumbuhan alami, melainkan konsekuensi langsung dari migrasi kolonial yang difasilitasi kekuasaan imperialis. Bersamaan dengan itu, akuisisi tanah oleh lembaga

Zionis meningkat pesat, sering kali mengakibatkan pengusiran petani Arab dan terbentuknya kelas masyarakat yang terdislokasi secara ekonomi. Justin McCarthy menegaskan bahwa proses ini menciptakan ketegangan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui kompromi administratif semata (McCarthy, *The Population of Palestine*, 1990).

Dalam konteks inilah konflik Palestina mengalami transformasi fundamental. Konflik yang sebelumnya bersifat lokal dan sporadis berubah menjadi konflik kolonial bersenjata, di mana penduduk asli berhadapan bukan hanya dengan pemukim baru, tetapi juga dengan kekuatan imperialis global yang melindungi mereka. Rashid Khalidi menggambarkan kondisi ini sebagai *iron cage*, yaitu situasi di mana masyarakat Palestina terjebak dalam struktur kolonial yang meniadakan kedaulatan politik mereka sekaligus memfasilitasi kolonisasi wilayah mereka.

Dari perspektif normatif Islam, kondisi Mandat Inggris dapat dibaca sebagai bentuk kezaliman struktural (*zulm munazzam*), di mana kekuasaan digunakan untuk mengalihkan tanah, keamanan, dan masa depan politik suatu wilayah tanpa musyawarah dan keadilan. Prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menolak *'uluww* (dominasi), *fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi), dan penindasan terhadap kaum lemah memberikan kerangka etis untuk menilai bahwa kebijakan Mandat Inggris bertentangan dengan nilai keadilan universal. Meskipun para mufasir klasik tidak membahas kolonialisme modern secara langsung, tafsir mereka tentang amanah kekuasaan dan keadilan sosial tetap relevan sebagai kritik normatif terhadap praktik kolonial di Palestina.

Dengan demikian, Mandat Inggris dan Deklarasi Balfour harus dipahami bukan sebagai kebijakan netral atau respons kemanusiaan semata, melainkan sebagai mekanisme kolonial yang menginstitusionalisasi proyek Zionis di Palestina. Melalui legitimasi hukum internasional, dukungan administratif, dan perlindungan militer, Inggris menciptakan kondisi yang secara langsung mengarah pada eskalasi konflik bersenjata dan tragedi kemanusiaan yang mencapai puncaknya pada 1948. Bagian ini

menegaskan bahwa konflik Palestina–Israel modern berakar kuat pada struktur kolonial Mandat Inggris, bukan semata pada perbedaan agama atau permusuhan kuno.

3.6. Menuju 1948 dan Nakba: Puncak Kolonialisme Pemukim dan Penghancuran Masyarakat Palestina

Periode menjelang tahun 1948 merupakan fase krusial yang menandai transformasi konflik Palestina dari konflik kolonial struktural menjadi tragedi kemanusiaan berskala luas. Pada tahap ini, proyek Zionisme yang sebelumnya difasilitasi oleh Mandat Inggris memasuki fase realisasi kenegaraan melalui strategi militer, demografis, dan teritorial yang sistematis. Peristiwa yang oleh masyarakat Palestina dikenal sebagai al-Nakba (malapetaka) bukanlah konsekuensi spontan dari perang semata, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan kolonial, perencanaan politik Zionis, dan runtuhnya struktur sosial-politik Palestina akibat dominasi imperialis.

Pada tahun 1947, Inggris menyatakan ketidakmampuannya untuk terus mengelola Palestina dan menyerahkan masalah tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP) kemudian mengusulkan Rencana Pemisahan (Resolution 181) yang membagi Palestina menjadi dua negara: satu negara Yahudi dan satu negara Arab, dengan Yerusalem di bawah administrasi internasional. Rencana ini memberikan sekitar 55 persen wilayah Palestina kepada negara Yahudi, meskipun komunitas Yahudi hanya berjumlah sekitar sepertiga populasi dan memiliki kurang dari 7 persen tanah secara legal.

Sebagian besar pemimpin Arab Palestina dan negara-negara Arab menolak rencana ini karena dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Sebaliknya, kepemimpinan Zionis menerima rencana tersebut secara strategis, bukan sebagai penyelesaian final, tetapi sebagai batu loncatan menuju ekspansi teritorial lebih lanjut. Ben-Gurion, pemimpin *Jewish Agency*, secara terbuka menyatakan bahwa pembentukan negara Yahudi di sebagian wilayah Palestina akan menjadi basis untuk perluasan di masa depan, sebuah fakta yang

dicatat dalam arsip Zionis dan dianalisis oleh sejarawan seperti Ilan Pappé dan Benny Morris.

Sejak akhir 1947 hingga Mei 1948, konflik di Palestina memasuki fase perang sipil antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina. Pada periode ini, organisasi militer Zionis—Haganah, Irgun, dan Lehi—melaksanakan serangkaian operasi militer terkoordinasi yang bertujuan menguasai wilayah strategis dan mengosongkan desa-desa Arab. Puncaknya adalah Plan Dalet (Plan D), sebuah dokumen militer yang disusun oleh Haganah pada Maret 1948.

Plan Dalet secara eksplisit memuat instruksi untuk menghancurkan desa-desa Arab, mengusir penduduknya, dan mencegah kembalinya mereka. Meskipun terdapat perdebatan akademik mengenai apakah plan ini merupakan rencana induk pembersihan etnis, mayoritas sejarawan—termasuk Morris dan Pappé—sepakat bahwa implementasinya di lapangan menghasilkan pengusiran massal dan penghancuran sistematis masyarakat Palestina. Peristiwa Deir Yassin pada April 1948, di mana lebih dari seratus warga sipil Palestina dibunuh, menjadi simbol teror yang memicu eksodus besar-besaran penduduk Arab.

Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya Mandat Inggris, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, beberapa negara Arab—Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon—memasuki Palestina, yang sering digambarkan dalam narasi resmi Israel sebagai “serangan Arab terhadap negara baru”. Namun, secara historis, intervensi ini terjadi setelah sebagian besar wilayah yang dialokasikan untuk negara Arab Palestina telah jatuh ke tangan milisi Zionis, dan setelah ratusan ribu warga Palestina telah diusir.

Penelitian Avi Shlaim menunjukkan bahwa perang 1948 bukanlah perang eksistensial simetris, melainkan konflik yang sangat timpang, di mana pasukan Zionis lebih terorganisir, lebih bersenjata, dan telah memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Inggris. Pada akhir perang, Israel menguasai sekitar 78 persen wilayah Palestina historis, jauh melampaui pembagian yang ditetapkan oleh PBB.

Dampak paling signifikan dari perang 1948 adalah terjadinya Nakba, yaitu pengusiran sekitar 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka. Lebih dari 500 desa Palestina dihancurkan atau dikosongkan, sementara kota-kota utama seperti Jaffa, Haifa, dan Acre kehilangan sebagian besar penduduk Arabnya. Para pengungsi Palestina tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah, hidup dalam kondisi yang hingga kini belum terselesaikan.

Israel kemudian mengesahkan serangkaian undang-undang, seperti *Absentees' Property Law* (1950), yang secara legal menyita tanah dan properti milik pengungsi Palestina dan mencegah mereka kembali. Kebijakan ini secara efektif menginstitusionalisasi hasil Nakba dan mengubah pengusiran sementara menjadi pengungsian permanen. UN General Assembly Resolution 194 (1948) yang menegaskan hak kembali pengungsi Palestina hingga kini tidak pernah diimplementasikan.

Dari perspektif hukum internasional modern, peristiwa Nakba 1948 memenuhi kriteria pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana didefinisikan dalam praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam konteks konflik Balkan pada dekade 1990-an, yakni pengusiran sistematis suatu kelompok penduduk dari wilayah tempat tinggalnya melalui kekerasan, teror, dan penghancuran permukiman. Sejarawan Israel Ilan Pappé secara eksplisit menggunakan istilah ethnic cleansing untuk menggambarkan peristiwa 1948, dengan merujuk pada pola operasi militer, penghancuran desa, serta pencegahan kembalinya penduduk Palestina.

Sementara itu, Benny Morris—meskipun lebih berhati-hati secara terminologis—tetap mengakui bahwa pengusiran massal penduduk Arab Palestina merupakan elemen struktural dan tidak terpisahkan dari proses pembentukan negara Israel. Dengan demikian, perbedaan di antara para sejarawan lebih bersifat pada istilah, bukan pada fakta historis terjadinya pengusiran sistematis.

Dalam perspektif normatif Islam, peristiwa Nakba secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan (*al-'adl*), amanah kekuasaan (*al-*

amanah), serta larangan keras terhadap pengusiran paksa dan perampasan hak hidup manusia. Al-Qur'an secara tegas mengecam tindakan mengusir manusia dari rumah dan tanahnya sebagai bentuk kezaliman besar, sebagaimana firman Allah:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu sendiri dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu terhadap mereka dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Al-Baqarah: 85)

Ibnu Katsir dalam Tafsir *al-Qur'an al-'Azhim* (1999) menjelaskan bahwa ayat ini mengecam dua kejahatan besar sekaligus: pembunuhan dan pengusiran paksa, yang keduanya dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian ilahi dan nilai kemanusiaan. Menurut Ibnu Katsir, pengusiran dari tanah air bukan sekadar pelanggaran sosial, tetapi bentuk penghancuran martabat manusia yang mendatangkan murka Allah dan kehancuran kolektif suatu kaum. Ath-Thabari menambahkan bahwa frasa *“tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim”* menunjukkan keharaman mengusir suatu kelompok dari tempat tinggalnya dengan kekuatan dan permusuhan, baik atas dasar kepentingan politik maupun dominasi kelompok tertentu.

Lebih jauh, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan tidak pernah dilegitimasi melalui dominasi, kesombongan politik, dan perusakan tatanan sosial:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

“Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di bumi dan tidak berbuat kerusakan.” (Al-Qasas: 83)

Menurut Ibnu Katsir, *'uluww fi al-ardh* bermakna kesombongan kekuasaan, dominasi politik, dan pemaksaan kehendak atas manusia lain, sedangkan fasad mencakup kezaliman sosial, perampasan hak, dan penghancuran kehidupan masyarakat.

Al-Qurthubi (2006) menegaskan bahwa ayat ini merupakan kaidah universal dalam Islam: setiap kekuasaan yang dibangun di atas penindasan dan perusakan, meskipun dibungkus dengan klaim moral atau religius, tidak memiliki legitimasi di sisi Allah dan pada akhirnya akan runtuh secara historis.

Selain itu, Al-Qur'an juga melarang secara tegas perampasan tanah dan hak hidup orang lain tanpa dasar keadilan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.” (Al-Baqarah: 188)

Para mufasir menjelaskan bahwa “harta” dalam ayat ini mencakup kepemilikan individu dan kolektif, termasuk tanah dan tempat tinggal. Ath-Tabari menegaskan bahwa perampasan tanah dengan kekuatan atau manipulasi hukum termasuk dalam kategori *akl al-mal bil-batil* (perolehan harta secara batil).

Meskipun para mufasir klasik tidak menyaksikan peristiwa Nakba 1948, kerangka etis dan normatif yang mereka bangun mengenai keadilan sosial, amanah kekuasaan, dan larangan kezaliman tetap relevan untuk mengevaluasi peristiwa tersebut. Dalam pandangan penulis tesis, nilai-nilai Qur'ani ini memberikan dasar moral yang kuat untuk menilai Nakba bukan sekadar sebagai tragedi politik, tetapi sebagai ketidakadilan historis dan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip universal Islam.

Dengan demikian, penggunaan dalil agama untuk membenarkan pengusiran, penjajahan, dan penghapusan suatu masyarakat dari tanahnya tidak memiliki legitimasi baik secara hukum internasional maupun dalam perspektif normatif Al-Qur'an.

3.7. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Negara Israel di Era Kontemporer

Bagian ini menguraikan praktik-praktik Negara Israel di era kontemporer yang dinilai bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional dalam konteks pendudukan atas wilayah Palestina.

Dalam konteks konflik Palestina–Israel masa kini, berbagai laporan lembaga internasional dan kajian akademik menunjukkan adanya pola pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh

negara Israel sebagai kekuatan pendudukan (*occupying power*). Pelanggaran-pelanggaran ini tidak dapat dipahami sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan negara dan struktur kolonial yang berkelanjutan sejak 1948.

Sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada tahun 1967, praktik penguasaan wilayah tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pendudukan militer sementara. Kebijakan pembangunan dan perluasan permukiman Yahudi secara sistematis menunjukkan adanya upaya perubahan demografis permanen yang berdampak pada perampasan tanah Palestina, fragmentasi wilayah hidup penduduk asli, serta pembentukan sistem hukum ganda yang diskriminatif. Dalam hukum internasional, praktik ini telah dinyatakan melanggar Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

Namun, dalam perspektif Islam, persoalan ini juga harus dinilai melalui kerangka moral Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya terkait konsep kepemilikan tanah, keadilan, dan larangan kezaliman. Al-Qur'an secara tegas menempatkan bumi sebagai milik Allah semata, sementara manusia hanyalah pemegang amanah yang terikat oleh syarat moral. Allah berfirman:

وَالْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bumi itu milik Allah; Dia mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-A'raf : 128)

Menurut Ibnu Katsir (1999), ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan atas tanah tidak pernah bersifat absolut atau diwariskan secara permanen kepada suatu kaum. Ath-Thabari menjelaskan bahwa “pewarisan” dalam ayat ini berarti pergiliran kekuasaan sesuai dengan keadilan atau kezaliman suatu umat. Al-Qurthubi (2006) menekankan bahwa ayat ini membatalkan klaim hak ilahi atas tanah yang dilepaskan dari ketakwaan dan keadilan sosial.

Prinsip Qur’ani ini diperkuat secara langsung oleh Sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa perampasan tanah, sekecil apa pun, merupakan dosa besar. Dalam hadits sahih disebutkan:

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi tanah itu dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memandang perampasan tanah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi kezaliman besar yang memiliki konsekuensi eskatologis. Para ulama, termasuk Ibnu Hajar al-‘Asqalani, menjelaskan bahwa ancaman dalam hadits ini berlaku baik terhadap individu maupun kekuasaan politik yang melakukan perampasan secara sistematis.

Selain itu, Al-Qur’an secara tegas melarang segala bentuk fasad di muka bumi, yaitu kerusakan struktural yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (Al-A‘raf: 56)

Ath-Thabari (2000) menafsirkan *fasad* dalam ayat ini sebagai segala bentuk kezaliman yang merusak keamanan, termasuk pengusiran penduduk dari tanahnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mencakup larangan menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak hidup manusia. Al-Qurthubi menegaskan bahwa fasād yang paling berat adalah ketika hukum Allah dilanggar demi mempertahankan dominasi dan kekuasaan.

Dalam konteks pengusiran penduduk Palestina dari rumah dan tanah mereka, larangan ini menjadi sangat relevan. Al-Qur’an bahkan mengakui bahwa pengusiran dari tanah air merupakan bentuk kezaliman ekstrem yang dapat memicu konflik dan perlawanan. Allah berfirman:

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?" (Al-Baqarah: 246)

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa pengusiran, karena ia menghancurkan kehidupan keluarga dan komunitas sekaligus. Ath-Thabari menegaskan bahwa pengusiran dari kampung halaman merupakan bentuk agresi yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan politik apa pun.

Sunnah Nabi ﷺ kembali memperkuat larangan kezaliman struktural ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hadits ini bersifat universal dan mencakup seluruh bentuk kezaliman, termasuk kezaliman kolektif dan institusional. Dalam konteks pendudukan dan kolonisasi pemukim, kezaliman tidak lagi bersifat individual, tetapi telah menjadi sistem yang dilembagakan melalui hukum, militer, dan kebijakan negara.

Lebih jauh, Nabi Muhammad ﷺ juga menegaskan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan akan kehilangan legitimasi di sisi Allah. Dalam hadits lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلَحْهُ

"Sesungguhnya Allah memberi penanguhan kepada orang zalim, hingga apabila Dia menghukumnya, maka Dia tidak akan melepaskannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sejalan dengan prinsip Qur'ani dalam Surat Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri"

Ibnu Katsir, ath-Thabari, dan al-Qurthubi sepakat bahwa ayat ini menolak klaim keistimewaan Bani Israil yang dilepaskan dari ketaatan moral. Kekuasaan, menurut

para mufasir, selalu tunduk pada hukum sebab-akibat ilahi: keadilan membawa keberlangsungan, sementara kezaliman membawa kehancuran.

Dengan demikian, kebijakan permukiman Israel pasca-1967—yang oleh banyak sarjana Barat seperti John Dugard dan Richard Falk dipahami sebagai bentuk kolonialisme pemukim—tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional modern, tetapi juga secara langsung bertabrakan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, perampasan tanah, pengusiran penduduk asli, dan dominasi hukum yang diskriminatif merupakan bentuk zulm dan fasād yang tidak dapat dibenarkan oleh klaim sejarah, etnis, maupun teologis apa pun.

3.8. Pengusiran Paksa dan Penghancuran Rumah

Penghancuran rumah warga Palestina oleh otoritas Israel, khususnya di Yerusalem Timur dan Area C Tepi Barat, merupakan salah satu praktik paling konsisten dan berdampak destruktif dalam rezim pendudukan pasca-1967. Secara formal, tindakan ini kerap dibenarkan dengan alasan administratif, terutama ketiadaan izin bangunan. Namun, berbagai kajian hukum dan laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa sistem perizinan tersebut bersifat diskriminatif secara struktural. Warga Palestina hampir mustahil memperoleh izin pembangunan, sementara permukiman Yahudi—yang secara hukum internasional sendiri ilegal—justru difasilitasi dan dilegalkan secara administratif. Akibatnya, pembangunan rumah oleh warga Palestina dipaksa berlangsung di luar sistem izin, yang kemudian dijadikan dasar legal semu untuk penghancuran rumah dan pengusiran paksa.

Dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan pengusiran paksa terhadap ribuan keluarga Palestina, menghancurkan tempat tinggal, memutus mata pencaharian, dan merusak jaringan sosial komunitas. Penghancuran rumah tidak hanya berdampak pada individu yang terdampak langsung, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif, ketidakpastian hukum, dan tekanan psikologis yang meluas.

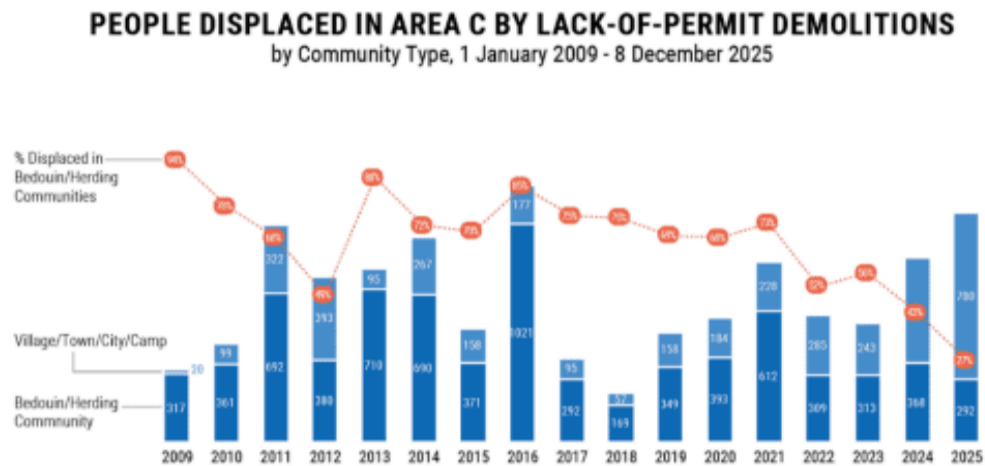
Oleh karena itu, banyak pakar hukum menilai bahwa penghancuran rumah tidak dapat dipahami sebagai penegakan hukum administratif biasa, melainkan sebagai instrumen pengendalian demografis dan politik dalam konteks pendudukan militer.

Dalam hukum humaniter internasional, tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 secara tegas melarang pengusiran paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan. Pasal 49 menyatakan bahwa pemindahan paksa, baik secara individual maupun massal, dilarang dalam keadaan apa pun, kecuali untuk alasan keamanan penduduk itu sendiri atau kebutuhan militer yang benar-benar mendesak dan bersifat sementara. Lebih lanjut, Pasal 53 Konvensi yang sama melarang penghancuran properti milik individu atau kolektif oleh negara pendudukan, kecuali jika penghancuran tersebut mutlak diperlukan oleh operasi militer.

Dalam konteks Yerusalem Timur dan Area C, penghancuran rumah Palestina jelas tidak memenuhi kriteria “kebutuhan militer yang mendesak”. Tindakan tersebut dilakukan dalam situasi non-tempur, berdasarkan pertimbangan administratif sipil, dan sering kali justru bertujuan membuka ruang bagi perluasan permukiman pemukim. Oleh karena itu, dalam doktrin hukum humaniter internasional, praktik ini dikategorikan sebagai *grave breaches* (pelanggaran berat), yakni pelanggaran serius yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individual menurut hukum internasional.

Sejumlah pakar hukum internasional juga menilai bahwa penghancuran rumah dan pengusiran paksa ini memenuhi unsur *collective punishment* (hukuman kolektif). Konsep ini dilarang secara tegas dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya secara pribadi. Dalam banyak kasus, rumah dihancurkan bukan karena tindakan kriminal pemiliknya, melainkan karena kebijakan zonasi dan perizinan yang diskriminatif. Bahkan dalam kasus tertentu, rumah keluarga dihancurkan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga,

sehingga seluruh keluarga dan komunitas menanggung akibatnya. Praktik semacam ini secara luas dipahami oleh para pakar sebagai bentuk hukuman kolektif yang dilarang secara absolut



Grafik 1. Data Penduduk Palestina Yang Terusir di Area C

Grafik ini menunjukkan jumlah orang Palestina yang mengungsi/terusir di Area C akibat penghancuran bangunan karena tidak memiliki izin bangunan, dengan pemisahan antara komunitas badui/penggembala, dan penduduk desa, kota, atau kamp.

Garis persentase menunjukkan bahwa dalam banyak tahun, mayoritas korban pengusiran berasal dari komunitas Badui/penggembala, dengan angka yang pada beberapa tahun mencapai lebih dari 80–90%. Selain itu, dalam laporan yang diterbitkan oleh OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) pada 11 Desember 2025, disebutkan bahwa situasi kemanusiaan di Tepi Barat semakin memburuk, dengan lebih dari 1.000 orang Palestina yang terpaksa mengungsi pada tahun 2025 akibat penghancuran rumah yang dilakukan oleh otoritas Israel.

Penghancuran rumah ini sering terjadi karena kurangnya izin bangunan yang diberikan kepada warga Palestina, sebuah izin yang sangat sulit untuk diperoleh. Angka ini mencatatkan jumlah pengungsi tahunan tertinggi kedua sejak 2009, dengan sebagian besar korban berasal dari komunitas Bedouin dan penggembala, meskipun

dalam tahun ini mayoritas pengungsi berasal dari kota dan desa. Selain itu, meningkatnya kekerasan antara pasukan Israel dan warga Palestina turut memperburuk situasi. Hingga Desember 2025, tercatat lebih dari 230 orang Palestina, termasuk 52 anak-anak, tewas akibat serangan atau bentrokan dengan pasukan Israel dan pemukim Israel, dengan insiden-insiden kekerasan ini terjadi di berbagai daerah, termasuk Ramallah, Hebron, dan Nablus.

Laporan tersebut juga mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah cedera yang dialami oleh warga Palestina yang berusaha menyeberangi penghalang yang membatasi akses mereka ke Yerusalem Timur dan Israel. Dalam tiga bulan terakhir, rata-rata jumlah orang yang terluka dalam upaya menyeberangi penghalang meningkat dua kali lipat, dengan 14 orang Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka sejak Oktober 2023.

Keputusan Israel untuk mencabut izin yang sebelumnya diberikan kepada pekerja Palestina yang mengakses Yerusalem Timur dan Israel memperburuk krisis ekonomi di wilayah ini, memaksa banyak orang untuk mengambil risiko menyeberangi penghalang demi mencari pekerjaan. Sementara itu, serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina juga semakin sering terjadi. Sejak awal 2025, tercatat lebih dari 1.700 serangan pemukim yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan properti, terutama di wilayah Ramallah, Nablus, dan Hebron. Banyak serangan ini menargetkan petani Palestina, menghancurkan pohon-pohon zaitun yang menjadi mata pencaharian utama mereka, serta merusak properti pribadi dan mengancam keselamatan keluarga.

Di sisi lain, situasi kemanusiaan ini juga tercermin dalam ketidakseimbangan besar dalam bantuan internasional yang diterima. Pada 10 Desember 2025, diketahui bahwa hanya sekitar 50% dari dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak 3 juta orang yang membutuhkan bantuan di Gaza dan Tepi Barat telah disalurkan. Hal ini mengindikasikan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan perlindungan untuk populasi yang terpengaruh konflik.

Sebagian besar dari dana tersebut masih difokuskan untuk krisis di Gaza, sementara hanya 12% dari total bantuan yang disalurkan untuk situasi kemanusiaan di Tepi Barat.

Meskipun berbagai organisasi internasional dan LSM lokal berupaya memberikan bantuan, ketergantungan pada dana yang terbatas dan berkurangnya dukungan internasional untuk wilayah ini menunjukkan bahwa upaya bantuan sangat terhambat. Ketegangan yang terus berlanjut dan kekurangan dukungan internasional semakin mempersulit pemulihan dan kesejahteraan masyarakat Palestina di wilayah ini.

Situasi kemanusiaan yang terjadi di Tepi Barat, yang melibatkan penghancuran rumah, pengusuran paksa, dan kekerasan terhadap warga Palestina, dapat dianalisis melalui perspektif ajaran Islam dalam Al-Qur'an, pandangan sarjana modern, serta refleksi pribadi. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya keadilan dan penghindaran dari kekerasan yang melampaui batas. Allah berfirman,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah:190)

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk berperang dalam pembelaan diri, tetapi tanpa melampaui batas dalam tindak kekerasan. Tindakan penghancuran rumah dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik adalah pelanggaran terhadap prinsip ini. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan untuk melampaui batas dalam pertempuran, yaitu dengan menyerang orang yang tidak terlibat atau merusak properti yang tidak relevan dengan pertempuran (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*).

Al-Qurthubi juga menekankan bahwa Allah mengingatkan umat untuk menghindari perbuatan yang merusak masyarakat yang tidak bersalah dalam peperangan, dan bahwa perang hanya dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri, bukan penyerangan yang tidak perlu (Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*).

At-Thabari dalam tafsirnya menambahkan bahwa "melampaui batas" juga mencakup perbuatan yang mengarah pada penyiksaan atau penganiayaan terhadap orang yang tidak bersalah, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam (At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 2000).

Selain itu, dalam Surah Al-Ma'idah, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." (Al-Ma'idah:8)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan yang tidak memihak dan bersikap adil meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Ini menunjukkan bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang mengalami kekerasan, penghancuran rumah, dan pelanggaran hak asasi manusia, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ibnu Katsir mengartikan ayat ini sebagai kewajiban untuk menegakkan keadilan meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 1999), sementara Al-Qurthubi menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang yang dekat maupun yang jauh (Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, 2006).

Pandangan sarjana modern juga memberikan perspektif yang kritis terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Edward Said, dalam bukunya "*Orientalism*", mengungkapkan bahwa kebijakan kolonial yang diterapkan oleh negara-negara besar terhadap wilayah-wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, menciptakan ketidakadilan dan menempatkan orang-orang Palestina dalam posisi yang terpinggirkan. Said menyatakan, "Pengaruh besar dari kolonialisme Barat di Timur Tengah telah menghasilkan ketidakadilan yang terus berlanjut, yang meminggirkan

masyarakat Palestina dan menekankan dominasi Israel atas tanah yang mereka klaim sebagai rumah mereka." (Edward Said, *Orientalism*, 1978)

Noam Chomsky, seorang intelektual terkemuka, juga mengkritik kebijakan Israel di Palestina, menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Chomsky mengatakan, "Israel memiliki kebijakan yang secara sistematis merampas hak-hak dasar rakyat Palestina, dan tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar kemanusiaan." (Noam Chomsky, *The Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians*, 1983)

Selain itu, sejarawan Ilan Pappé, dalam bukunya *The Ethnic Cleansing of Palestine*, menggambarkan kebijakan Israel sebagai pembersihan etnis yang mengarah pada penghancuran identitas dan keberadaan masyarakat Palestina. Pappé menulis, "Kebijakan Israel sejak pendirian negara tersebut telah berfokus pada pengusiran dan pemusnahan etnis Palestina melalui serangkaian tindakan yang termasuk penghancuran rumah dan pemindahan paksa yang tidak manusiawi." (Ilan Pappé, *The Ethnic Cleansing of Palestine*, 2006.)

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina adalah pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya menghancurkan kehidupan fisik, tetapi juga merusak identitas dan martabat mereka.

Dari perspektif penulis, sangat prihatin melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Penghancuran rumah, penggusuran paksa, dan kekerasan yang mereka alami adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, yang seharusnya tidak terjadi di dunia yang mengklaim menghargai keadilan dan martabat manusia. Menurut saya, kita harus melihat masalah ini bukan hanya dari sudut pandang politik, tetapi sebagai masalah kemanusiaan yang mendalam.

Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk tidak melampaui batas dan untuk selalu menegakkan keadilan, tidak peduli siapa yang terlibat. Sebagai umat manusia, kita semua berhak untuk hidup dengan aman, memiliki rumah yang layak, dan menjalani hidup dengan martabat. Oleh karena itu, solusi untuk konflik ini harus melibatkan

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan keadilan yang sejati, yang mencakup pengakhiran kekerasan, penghancuran rumah, dan penggusuran paksa. Keamanan dan kesejahteraan rakyat Palestina harus dijamin, dan dunia internasional harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

3.9. Ketidakmampuan Mendapatkan Izin Bangunan

Ketidakmampuan warga Palestina untuk mendapatkan izin bangunan di wilayah pendudukan, khususnya di Area C yang berada di bawah kontrol administratif Israel, adalah masalah serius yang menciptakan kondisi hidup yang sangat diskriminatif dan penuh tantangan. Sistem perizinan yang diterapkan oleh otoritas Israel sangat membatasi kemampuan warga Palestina untuk membangun tempat tinggal atau fasilitas lain di wilayah ini. Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat, sepenuhnya berada di bawah kontrol militer dan administratif Israel, yang berarti bahwa warga Palestina yang ingin membangun di area ini harus mendapatkan izin dari otoritas Israel, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Sayangnya, hampir seluruh permohonan izin yang diajukan oleh warga Palestina untuk pembangunan di Area C ditolak.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 90% permohonan izin bangunan yang diajukan oleh warga Palestina ditolak oleh otoritas Israel, yang menyebabkan mereka terpaksa membangun rumah atau fasilitas lainnya tanpa izin. Ketika pembangunan dilakukan tanpa izin, bangunan tersebut menjadi rentan terhadap penghancuran oleh pihak berwenang Israel. Israel sering menggunakan alasan administratif, seperti "pembangunan ilegal" atau "tidak memiliki izin", untuk menghancurkan rumah-rumah yang dibangun tanpa izin, meskipun banyak dari bangunan tersebut adalah kebutuhan dasar tempat tinggal bagi keluarga Palestina yang terpaksa membangun karena kekurangan alternatif tempat tinggal yang layak.

Proses perizinan yang sangat sulit ini dan penghancuran bangunan yang dilakukan oleh otoritas Israel bukan hanya berdampak pada ketidakpastian hidup warga Palestina, tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Banyak

warga yang kehilangan tempat tinggal mereka dan terpaksa menjadi pengungsi internal, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa jaminan bahwa tempat tinggal baru mereka akan aman dari penghancuran. Selain itu, kebijakan ini memperburuk krisis perumahan di Palestina, menciptakan kondisi hidup yang tidak aman, tidak stabil, dan penuh ketidakpastian.

Dampak sosial dari kebijakan ini sangat besar, dengan banyak keluarga yang terpaksa hidup dalam kondisi yang buruk, tanpa akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, kebijakan perizinan ini juga terkait dengan kontrol atas sumber daya alam, seperti tanah dan air, yang sebagian besar dikuasai oleh Israel untuk mendukung pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan, sementara warga Palestina dibatasi aksesnya.

Dalam banyak kasus, pembangunan pemukiman Israel di Area C berjalan tanpa hambatan, sementara warga Palestina yang tinggal di wilayah yang sama terhambat dalam membangun rumah atau bahkan fasilitas dasar. Oleh karena itu, kebijakan perizinan yang diskriminatif ini tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga bagian dari upaya lebih besar untuk mengontrol dan menguasai wilayah, yang memperburuk ketegangan sosial dan kemanusiaan di wilayah pendudukan.

Masalah penghancuran rumah dan penindasan terhadap warga Palestina yang tidak mendapatkan izin bangunan, terutama di wilayah Area C yang berada di bawah kontrol administratif Israel, sangat terkait dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْنُدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al Baqarah : 190)

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam situasi konflik, kita tidak boleh melampaui batas dengan menindas mereka yang tidak terlibat dalam peperangan.

Demikian pula Allah menegaskan di dalam ayat yang lain, Surah Al-Isra (17:70) menyatakan,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan." (Al Isra : 70)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, dimuliakan oleh Allah dan diberikan hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup dengan aman dan memiliki tempat tinggal yang layak. Ketidakadilan yang dilakukan terhadap warga Palestina yang rumahnya dihancurkan jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Selain itu, Allah juga berfirman,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari rumahmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al Mumtahanah : 8)

Ayat ini mengajarkan bahwa berbuat baik dan adil terhadap mereka yang tidak memusuhi kita adalah kewajiban, yang mengarah pada kritik terhadap penghancuran rumah warga Palestina yang tidak terlibat dalam konflik.

Tiga ulama tafsir besar, yaitu Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan At-Tabari, juga menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam Islam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keadilan Allah adalah prinsip utama, dan ketidakadilan akan mendapat balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks penghancuran rumah, Ibnu Katsir akan menganggap tindakan ini sebagai kezaliman yang tidak dapat dibenarkan.

Al-Qurthubi (2006) lebih lanjut menjelaskan bahwa penindasan terhadap hak-hak individu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Beliau menekankan bahwa setiap kebijakan yang merugikan kaum yang tertindas tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran besar terhadap hukum Allah.

At-Thabari (2000) menambahkan bahwa hak atas tanah dan properti pribadi adalah hak yang dilindungi oleh Islam, dan penghancuran properti tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang sangat dilarang. Dengan demikian, ketiganya sepakat bahwa penghancuran rumah atau tanah tanpa alasan yang sah adalah bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan.

Dalam pandangan sarjana modern, Edward Said, Noam Chomsky, dan Norman Finkelstein juga mengkritik kebijakan Israel terkait penghancuran rumah dan pemindahan paksa warga Palestina. Edward Said dalam karyanya banyak menyoroti bagaimana kebijakan kolonial dan penjajahan mengabaikan hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang aman. Said berpendapat bahwa penghancuran rumah adalah bagian dari upaya untuk melemahkan identitas dan eksistensi bangsa Palestina.

Noam Chomsky menganggap kebijakan Israel sebagai bagian dari praktik apartheid yang melanggar hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak sipil dalam konflik. Norman Finkelstein juga menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Semua sarjana ini sepakat bahwa penghancuran rumah dan penindasan terhadap warga Palestina adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang dilindungi dalam hukum internasional dan ajaran Islam, yang menekankan perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan aman.

3.10. Serangkaian Tindakan Tidak Berperikemanusiaan Zionis Yahudi Pada Rakyat Palestina

1. Perampasan Sumber Irigasi oleh Zionis di Palestina: Sebuah Sejarah Ketidakadilan terhadap Rakyat Palestina

Salah satu aspek dari konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Zionis adalah perampasan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan air dan sistem irigasi yang menjadi kunci bagi kelangsungan hidup petani Palestina. Sejak awal pendudukan wilayah Palestina oleh Zionis pada pertengahan abad ke-20, upaya untuk mengendalikan dan menguasai sumber daya air telah menjadi bagian penting dari strategi mereka untuk mengontrol wilayah dan mengusir penduduk Palestina.

Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan dan pertanian, terutama di wilayah seperti Palestina yang memiliki iklim semi-arid. Sebagian besar sumber air di wilayah Palestina berasal dari tiga akuifer utama yang terletak di bawah tanah Tepi Barat, serta dari sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah tersebut. Salah satu contoh penting adalah Sungai Yordan, yang telah lama menjadi garis pemisah antara Palestina dan wilayah yang diduduki oleh Zionis, serta juga menjadi sumber air utama bagi penduduk Palestina dan Zionis.

Namun, sejak berdirinya negara Zionis pada 1948 dan pendudukan Tepi Barat serta Gaza pada 1967, Zionis secara sistematis menguasai dan mengeksploitasi sumber daya air di wilayah tersebut, sementara rakyat Palestina kehilangan akses yang cukup terhadap air bersih dan sistem irigasi yang vital bagi kehidupan mereka.

Setelah pendudukan wilayah Palestina, pasukan Zionis mengambil alih hampir seluruh kontrol atas sumber daya air, termasuk pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah. Badan air Israel (Israel Water Authority) diberi kewenangan untuk mengatur distribusi air di wilayah yang diduduki, yang termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Pada tahun 1967, pasukan Zionis mulai memonopoli sebagian besar sumur dan fasilitas irigasi yang sebelumnya dimiliki oleh warga Palestina. Mereka juga mulai membangun sistem irigasi besar-besaran untuk mendukung pertanian dan permukiman di wilayah yang mereka kuasai. Salah satu tindakan yang paling merugikan adalah pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang sebagian besar mengandalkan sumber daya air yang sebelumnya digunakan oleh penduduk Palestina.

Lebih dari 80% dari sumber daya air yang tersedia di wilayah Palestina kini dikendalikan oleh pihak Zionis, sementara lebih dari 1,8 juta warga Gaza hidup dengan akses terbatas terhadap air bersih, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini adalah bagian dari kebijakan pembatasan akses yang dilakukan oleh Zionis terhadap air, yang sering kali menggunakan kontrol terhadap jaringan irigasi dan sumur sebagai alat untuk mendiskriminasi rakyat Palestina.

Sumber air yang sebelumnya digunakan oleh petani Palestina untuk irigasi pertanian mereka telah dikuasai oleh Zionis melalui berbagai cara, termasuk penghancuran infrastruktur yang ada dan pembatasan pembangunan fasilitas baru yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Palestina. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Zionis menghancurkan banyak sumur dan sistem irigasi yang dimiliki oleh petani Palestina, yang mengakibatkan kerugian besar bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pertanian.

Sebagai contoh, di Jalur Gaza, sebagian besar fasilitas irigasi dan sistem pengelolaan air yang ada telah hancur akibat serangan militer Zionis dalam konflik-konflik yang berulang. Blokade yang diberlakukan oleh Zionis terhadap Gaza juga membatasi kemampuan warga Palestina untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun atau memperbaiki sistem irigasi mereka.

Pembatasan ini juga mencakup pembatasan akses ke air untuk keperluan domestik. Banyak warga Palestina yang harus bergantung pada pasokan air yang

sangat terbatas, seringkali hanya diberikan dalam jumlah yang tidak cukup untuk kebutuhan dasar mereka. Hal ini berdampak serius pada kesehatan masyarakat, serta menciptakan ketergantungan pada pasokan air dari sumur-sumur kecil yang seringkali terkontaminasi dan tidak dapat digunakan untuk konsumsi langsung.

Selain penguasaan langsung terhadap sumber air, kebijakan Zionis juga mencakup pengembangan permukiman ilegal di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka. Pembangunan permukiman ini sering kali didasarkan pada kontrol terhadap sumber daya alam, termasuk air, yang memungkinkan permukiman-pemukiman Zionis tersebut berkembang pesat. Para pemukim Zionis mendapatkan akses penuh terhadap sumber daya air yang berada di bawah kontrol militer, sementara warga Palestina tidak diberi akses yang sama.

Sumber daya air yang sebelumnya digunakan untuk irigasi pertanian Palestina sekarang digunakan untuk mendukung kebutuhan permukiman Zionis. Bahkan, banyak permukiman ini tidak hanya menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk memperluas kawasan pertanian mereka, yang secara langsung mengarah pada pengambilalihan tanah pertanian milik petani Palestina. Ini menyebabkan ketergantungan petani Palestina pada pasokan air yang terbatas, yang semakin memperburuk kemiskinan dan ketergantungan mereka terhadap bantuan internasional.

Perampasan sumber air ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan petani Palestina, yang merupakan sektor utama dalam ekonomi mereka. Di bawah sistem yang diterapkan oleh Zionis, petani Palestina kehilangan sebagian besar akses mereka ke irigasi yang diperlukan untuk bertani. Mereka dipaksa untuk menggunakan sumber air yang sangat terbatas yang tersedia di wilayah mereka, dan sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pertanian mereka.

Petani Palestina yang sebelumnya dapat menanam berbagai jenis tanaman pangan kini semakin kesulitan untuk mempertahankan produktivitas mereka karena ketidakstabilan akses terhadap air yang mereka butuhkan. Akibatnya, banyak petani

terpaksa meninggalkan lahan mereka, berpindah ke kota-kota besar, atau bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup. Dengan semakin terhimpitnya ruang hidup dan sumber daya alam, masa depan pertanian Palestina semakin tidak pasti.

Dalam perspektif Islam, hak atas sumber daya alam—termasuk air—merupakan hak bersama umat manusia yang tidak dapat diambil begitu saja oleh pihak manapun tanpa alasan yang sah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, dan segala yang Allah ciptakan di bumi—termasuk air—adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." (Al Baqarah : 164)

Ibnu Katsir (1999), dalam tafsirnya, menekankan bahwa air adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, dan mengingkari hak akses atas air adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat-Nya. Dalam konteks ini, tindakan Zionis yang merampas air dari warga Palestina adalah penyalahgunaan nikmat Tuhan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kehidupan bersama. Dalam pandangan Islam, ini adalah suatu bentuk kezaliman karena air adalah hak dasar setiap makhluk.

Al-Qhurtubi (2006) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah mengingatkan umat manusia untuk mengenali tanda-tanda kebesaran-Nya melalui ciptaan-Nya, termasuk air. Oleh karena itu, perampasan air dari warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kontradiksi dengan nilai-nilai keadilan yang diperintahkan oleh Allah. Perampasan ini menghambat kehidupan rakyat Palestina dan berpotensi menghancurkan kehidupan mereka yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk bertahan hidup.

Ath-Thabari (2000) juga menjelaskan bahwa air adalah pemberian Allah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Perampasan sumber daya air yang terjadi di Palestina jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghargai dan menggunakan nikmat Allah dengan adil dan bijaksana. Tindakan Zionis yang membatasi akses air bagi warga Palestina menyebabkan ketidakadilan sosial yang serius, merusak kehidupan petani Palestina, dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama.

Islam mengajarkan bahwa air adalah hak seluruh umat manusia, dan siapapun yang merampas hak atas air dari orang lain, terlebih untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bertindak tidak adil dan melanggar prinsip dasar keadilan. Hadis Nabi Muhammad juga mengajarkan,

مَا حَقُّ لَأَمْرِي أَنْ يَمْنَعَ مَاءٌ يَنْبُتُ فِي نَحْلِهِ أَوْ يَمْنَعَ شَجَرَةً أَوْ مَاءٌ يَجْرِي فِي الطَّرِيقِ

"Tidak ada hak bagi seseorang untuk menghalangi air yang mengalir, atau pohon yang memberi buah, atau jalur perjalanan yang biasa dilalui." (HR Muslim)

Dengan demikian, perampasan air oleh Zionis terhadap rakyat Palestina adalah suatu bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai hak-hak dasar manusia.



Gambar 2

Zionis sengaja menghancurkan sumber air di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk membatasi akses warga Palestina terhadap air minum (Sumber : Aljazeera.net)

Perampasan sumber daya air oleh Zionis di Palestina merupakan salah satu aspek dari strategi kolonial untuk menguasai tanah dan sumber daya alam Palestina. Pengambilalihan sumur, sistem irigasi, dan pembatasan akses terhadap air secara sistematis menyulitkan kehidupan rakyat Palestina, terutama para petani, dan memperburuk krisis kemanusiaan yang mereka alami. Sumber daya alam, terutama air, harus menjadi hak yang adil bagi semua orang, dan tindakan Zionis yang memonopoli sumber daya ini jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam hukum internasional dan ajaran Islam.

2. Pembantaian Beit Hanun

Beit Hanun terletak di utara Gaza, dekat dengan perbatasan dengan wilayah yang diduduki Zionis. Pada Oktober 2006, situasi di Gaza semakin memanas setelah serangan-serangan balasan antara kelompok militan Palestina, terutama Hamas, dan pasukan Zionis. Hamas, yang pada waktu itu telah memegang kendali di Gaza

setelah memenangkan pemilu Palestina pada Januari 2006, terlibat dalam konflik terbuka dengan pasukan Zionis, terutama dalam bentuk serangan roket ke wilayah Zionis selatan. Zionis, yang menganggap serangan roket ini sebagai ancaman besar terhadap keamanan negaranya, merespons dengan operasi militer yang lebih intensif di Gaza.

Pada 26 Oktober 2006, pasukan Zionis meluncurkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Beit Hanun, yang diduga menjadi tempat persembunyian dan peluncuran roket oleh kelompok militan Palestina. Selama operasi ini, pasukan Zionis menggunakan serangan artileri dan serangan udara yang menargetkan wilayah yang padat penduduknya, tanpa membedakan antara kombatan dan warga sipil.

Serangan pasukan Zionis terhadap Beit Hanun pada 26 Oktober 2006 menyebabkan kehilangan jiwa yang sangat besar di kalangan warga sipil. Menurut laporan PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional, lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan tersebut, dengan banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok militan Palestina.

Serangan tersebut dimulai dengan penembakan artileri yang diluncurkan oleh pasukan Zionis ke pemukiman sipil di Beit Hanun, yang menyebabkan penghancuran besar-besaran. Rumah-rumah warga hancur, jalan-jalan terputus, dan infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit juga terdampak. Selain itu, banyak warga sipil yang terluka parah akibat pecahan peluru dan ledakan, yang mempersulit upaya penyelamatan dan pertolongan.

Menurut laporan dari *Human Rights Watch (HRW)*, serangan pasukan Zionis terhadap Beit Hanun melibatkan penggunaan senjata yang tidak akurat, yang menjadikan serangan ini sangat berbahaya bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Pasukan Zionis juga dikritik karena tidak memberi peringatan yang

cukup kepada penduduk sipil sebelum serangan, yang merupakan kewajiban menurut hukum humaniter internasional.

Tragedi Beit Hanun mendapat kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional. PBB, dalam beberapa kesempatan, mengutuk tindakan pasukan Zionis yang menyebabkan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil. Laporan yang dikeluarkan oleh *International Red Cross (ICRC)* - Komite Palang Merah Internasional - juga menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil.

Selain itu, *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik Zionis atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang menyebabkan kematian warga sipil. Mereka menekankan bahwa meskipun Zionis memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan roket, penggunaan kekuatan harus selalu dibatasi oleh hukum internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.

Reaksi dari masyarakat internasional juga mencakup protes besar di berbagai negara, dengan banyak pihak menuntut agar Zionis dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian tersebut. Organisasi-organisasi kemanusiaan dan aktivis hak asasi manusia menyerukan penyelidikan independen terhadap peristiwa ini untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Tragedi Beit Hanun meninggalkan dampak jangka panjang bagi warga Gaza, terutama keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terdekat mereka. Selain itu, kerusakan infrastruktur yang terjadi semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung di Gaza akibat blokade yang diberlakukan oleh Zionis. Akibat penghancuran rumah dan fasilitas publik, ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Dampak psikologisnya juga sangat besar, terutama bagi anak-anak yang harus hidup dalam ketakutan dan trauma setelah melihat kekerasan yang merenggut nyawa keluarga mereka. Lembaga-lembaga internasional terus memperingatkan bahwa tanpa adanya upaya penyelesaian yang adil untuk konflik ini, tragedi seperti Beit Hanun kemungkinan akan terulang, dengan lebih banyak korban sipil yang akan jatuh.

Dalam pandangan Islam, perang dan kekerasan hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti untuk membela diri dan menghindari penindasan. Surah Al-Baqarah ayat 190, mengajarkan bahwa umat Islam diizinkan untuk berperang hanya melawan orang-orang yang memerangi mereka, tetapi harus menghindari melampaui batas dan menyakiti orang yang tidak terlibat dalam pertempuran.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al Baqarah : 190)

Dalam hal ini, pembantaian terhadap warga sipil di Beit Hanun yang tidak terlibat dalam konflik adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia.



Gambar 3 : Kehancuran Beit Hanun

Tragedi Beit Hanun pada Oktober 2006 adalah contoh jelas dari kejahatan perang yang melibatkan pembunuhan massal terhadap warga sipil di Gaza. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Zionis mengakibatkan banyak korban jiwa, penghancuran infrastruktur, dan penderitaan mendalam bagi masyarakat Palestina. Meskipun pasukan Zionis mengklaim bahwa serangan ini adalah bagian dari upaya untuk melawan kelompok militan, serangan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil. Tragedi ini memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza dan menunjukkan pentingnya komunitas internasional untuk bertindak lebih tegas dalam menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pembantaian Beit Hanun mengingatkan dunia akan perlunya pendekatan yang lebih berimbang dan berfokus pada perdamaian dan keadilan untuk rakyat Palestina, serta pentingnya memastikan bahwa hak asasi manusia selalu dijunjung tinggi dalam setiap konflik.

3. Pembangunan Permukiman Ilegal

Permukiman Ilegal Zionis merujuk pada pembangunan permukiman yang didirikan oleh bangsa Zionis (Israel) di wilayah yang diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari 1967, termasuk di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Pembangunan permukiman-permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 4 yang melarang pemindahan penduduk dari negara penjajah ke wilayah yang didudukinya. Walaupun begitu, Israel terus melanjutkan ekspansi permukiman di wilayah-wilayah tersebut, yang memperburuk konflik Israel-Palestina dan memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut.

Setelah berdirinya negara Israel pada 1948, wilayah Palestina yang sebelumnya merupakan wilayah mandat Britania menjadi wilayah yang diperebutkan antara Israel dan bangsa Palestina. Pada Perang Enam Hari 1967, Israel merebut sebagian besar wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem

Timur, dan Gaza. Meskipun Gaza akhirnya ditarik mundur pada 2005, Tepi Barat dan Yerusalem Timur tetap berada di bawah kendali Israel hingga hari ini.

Permukiman Zionis adalah bagian dari strategi Israel untuk memperkuat kontrol atas wilayah yang mereka duduki, terutama yang memiliki nilai strategis atau religius, seperti Yerusalem Timur yang memiliki Al-Aqsa, tempat suci bagi umat Islam. Dengan mendirikan permukiman-permukiman ini, Israel ingin mempertegas klaim mereka atas wilayah tersebut dan menciptakan fakta di lapangan yang mempersulit kemungkinan adanya solusi dua negara yang adil bagi Palestina dan Israel.

Permukiman-permukiman ini dibangun di atas tanah yang diduduki, yang merupakan wilayah yang diakui oleh hukum internasional sebagai bagian dari Palestina yang seharusnya diberikan kepada negara Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Namun, dengan membangun permukiman di wilayah ini, Israel menciptakan fakta politik baru yang membuat terwujudnya negara Palestina yang utuh menjadi semakin sulit.

Pemukiman ini sering kali dibangun di atas tanah milik warga Palestina yang dirampas secara paksa. Warga Palestina sering kali dipaksa untuk mengosongkan rumah mereka, diancam dengan kerusakan properti, atau menghadapi pembatasan keras dalam mengakses tanah mereka untuk keperluan pertanian dan pembangunan.

Warga Palestina yang tinggal di dekat permukiman-permukiman Zionis sering kali mengalami pembatasan ketat dalam akses ke sumber daya alam, terutama air, dan juga pembatasan dalam hal mobilitas mereka di wilayah yang mereka tinggali. Tembok pemisah dan checkpoint yang dibangun oleh Israel semakin mempersulit kehidupan warga Palestina sehari-hari.

Menurut Konvensi Jenewa IV, yang merupakan pedoman hukum internasional dalam kasus pendudukan, pembangunan permukiman oleh negara penjajah di wilayah yang didudukinya adalah ilegal. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV dengan tegas menyatakan: "Pendudukan negara yang mengalihkan sebagian dari

penduduknya ke wilayah yang didudukinya, atau memindahkan atau merelokasi penduduk sipil setempat, adalah tindakan yang dilarang."

Berdasarkan prinsip ini, pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. PBB, dalam berbagai resolusinya, menyatakan bahwa pemukiman Israel adalah ilegal dan harus dihentikan. Namun, Israel mengabaikan resolusi tersebut, dan terus memperluas pemukiman mereka.

Pembangunan pemukiman-pemukiman Zionis berkontribusi pada penyempitan wilayah yang bisa digunakan oleh Palestina untuk membangun negara mereka. Permukiman ini sering kali dibangun di wilayah strategis dan di sekitar Jalur Hijau, yang merupakan batas wilayah yang diakui secara internasional antara Israel dan Palestina. Ini mengurangi ruang hidup bagi warga Palestina dan memperburuk ketegangan.

Pemukiman Zionis juga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap warga Palestina. Ini termasuk perampasan tanah mereka tanpa ganti rugi, penggusuran paksa, dan penurunan kualitas hidup. Kehidupan warga Palestina sering terganggu oleh kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Zionis dan oleh pembatasan kebebasan bergerak yang diberlakukan oleh militer Israel.

Pemukiman Zionis sering kali dibangun di atas lahan pertanian Palestina, yang berarti bahwa petani kehilangan akses ke tanah mereka, dan banyak yang terpaksa pindah ke tempat yang lebih sempit. Ini memperburuk kondisi ekonomi Palestina dan menambah ketergantungan mereka pada bantuan internasional.

Pembangunan permukiman ilegal juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Pembentukan fakta di lapangan yang terus berkembang di wilayah yang diperebutkan ini mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan yang adil dan berdasarkan hukum internasional, yang mengakui hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri di wilayah yang diinginkan.

Meskipun banyak negara dan organisasi internasional, seperti PBB, Uni Eropa, dan Amnesty International, secara tegas mengutuk pemukiman Zionis dan menganggapnya sebagai ilegal, Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman tersebut. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah memberikan dukungan politik kepada Israel, meskipun ada kecaman internasional yang meluas terhadap kebijakan ini.

Namun, meskipun dukungan ini ada, banyak negara di dunia, terutama di Negara-Negara Dunia Ketiga dan beberapa negara Eropa, mendesak agar Israel menghentikan ekspansi pemukiman dan mematuhi hukum internasional. PBB telah beberapa kali mengeluarkan resolusi yang mengecam pembangunan pemukiman dan menganggapnya sebagai penghalang perdamaian.

Pemukiman ilegal Zionis di wilayah yang diduduki Palestina adalah salah satu aspek yang memperburuk konflik antara Palestina dan Israel. Ini tidak hanya merampas hak tanah rakyat Palestina tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa IV, yang melarang pemindahan penduduk dari negara penjajah ke wilayah yang didudukinya. Meskipun ada kecaman internasional, pemukiman Zionis terus berkembang, menciptakan fakta-fakta politik yang semakin mempersulit tercapainya solusi dua negara yang adil bagi Palestina dan Israel.



Gambar 4

Sumber : <https://npc.id/7-langkah-proyek-permukiman-ilegal-besar-besaran-israel-di-palestina/>

Dalam perspektif Islam, perampasan tanah, penggusuran paksa, dan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Zionis di wilayah Palestina jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki hak atas tanah dan properti mereka yang harus dihormati dan tidak boleh dirampas secara tidak sah. Islam mengakui bahwa tanah dan properti adalah hak individu yang dilindungi. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al Baqarah : 188)

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir (1999) mengingatkan bahwa merampas tanah orang lain dengan cara apapun, baik dengan kekerasan atau penipuan, adalah dosa besar dalam Islam. Ibnu Katsir juga mengutip hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seseorang untuk mengambil hak orang lain, termasuk tanah dan sumber daya alam yang digunakan oleh orang lain. Menurut Ibnu Katsir, tanah yang dirampas dari pemilik sahnya harus dikembalikan, dan setiap bentuk pemindahan tanah atau penggusuran yang tidak sah adalah tindakan kezaliman.

Ath-Thabari (2000) juga menekankan bahwa merampas hak orang lain adalah pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Ia juga menekankan bahwa pembangunan pemukiman atau pendudukan tanah orang lain secara ilegal adalah bentuk penindasan terhadap hak-hak mereka, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Beliau juga menyoroti bahwa tanah yang digunakan untuk keperluan umum, seperti lahan pertanian atau tempat tinggal, tidak boleh dikuasai oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik sahnya. Oleh karena itu, kebijakan Zionis yang merampas tanah dan

membangun pemukiman ilegal di Palestina merupakan pelanggaran hukum Islam yang serius.

Al-Qurthubi (2006), dalam tafsirnya, menguraikan bahwa Islam melarang penindasan terhadap hak orang lain, terutama dalam hal hak atas tanah dan sumber daya alam. Dalam tafsirnya terhadap Surah An-Nisa ayat 58 yang menyebutkan pentingnya menyerahkan hak kepada yang berhak, Al-Qurtubi menekankan bahwa tanah yang dikuasai oleh individu atau kelompok harus dihormati, dan setiap tindakan yang merampas tanah dari pemilik sahnyanya adalah pelanggaran besar terhadap prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa : 58)

Al-Qurthubi (2006) juga menegaskan bahwa pemukiman ilegal Zionis di atas tanah Palestina adalah contoh jelas dari ketidakadilan yang harus dikoreksi. Menurutny, tindakan seperti itu adalah kezaliman yang harus dihentikan, karena merampas hak hidup dan hak atas tanah milik orang lain adalah tindakan yang haram dalam Islam.

4. Penyiksaan Tahanan Palestina

Data statistik dan sensus menunjukkan bahwa lebih dari 650 ribu warga Palestina telah menjadi tawanan Zionis sejak awal tahun 1967. Jumlah ini setara dengan 1/3 jumlah penduduk Palestina. Tidak satu pun rumah atau keluarga Palestina luput dari percobaan penahanan yang pahit oleh para penjajah Yahudi. Hasil sensus ini pernah diulas saluran berita televisi Al-Jazeera pada tahun 2005.

Penyiksaan terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis merupakan salah satu bentuk kezaliman sistematis yang dilakukan oleh pasukan penjajah Israel terhadap rakyat Palestina. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dan meskipun banyak laporan internasional yang mengutuk tindakan ini, kondisi di penjara-penjara Israel tetap mengerikan, dengan para tahanan Palestina sering kali menjadi korban penyiksaan fisik dan psikologis yang brutal. Penyiksaan ini bertujuan untuk melemahkan perlawanan rakyat Palestina dan memaksakan pengakuan atau informasi dari para tahanan, serta untuk menakuti dan menghancurkan semangat perlawanan mereka terhadap pendudukan Zionis.

Bentuk penyiksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut,

a. Penyiksaan Fisik

Tahanan Palestina sering kali mengalami penyiksaan fisik yang sangat kejam selama penahanan mereka. Pemukulan, penghantaman dengan benda keras, penggunaan borgol yang ketat, dan penyerangan fisik dengan kekuatan berlebihan adalah hal yang umum terjadi di penjara Zionis. Banyak tahanan yang mengeluhkan luka fisik yang dialami selama interogasi atau setelah penangkapan, dan banyak yang tidak menerima perawatan medis yang memadai.

b. Penyiksaan Psikologis

Selain penyiksaan fisik, tahanan Palestina juga sering mengalami penyiksaan psikologis yang menghancurkan mental mereka. Para tahanan sering dipaksa untuk berpisah dari keluarga mereka selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mereka juga sering diperlakukan dengan penghinaan verbal, ancaman terhadap keluarga, serta dipaksa untuk mendengarkan teriakan dan suara kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan lainnya. Di samping itu, banyak tahanan yang dipenjara dalam isolasi panjang, yang dapat memicu gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.

c. Penggunaan Metode "Shabeh"

Salah satu bentuk penyiksaan yang terkenal di penjara Zionis adalah metode yang disebut "Shabeh". Metode ini melibatkan peregangan ekstrem tubuh tahanan dalam posisi yang sangat menyakitkan untuk waktu yang lama. Tahanan akan diikat dalam posisi yang tidak wajar, yang menyebabkan rasa sakit luar biasa dan sering kali menyebabkan cedera fisik permanen. Tahanan yang tidak kooperatif sering dipaksa untuk menjalani interogasi dengan metode ini, yang juga bertujuan untuk menghancurkan semangat perlawanan mereka.

d. Penggunaan Kandang Besi (*Isolation Cells*)

Para tahanan sering kali ditempatkan dalam sel isolasi, yang disebut "kandang besi", di mana mereka tidak memiliki akses ke dunia luar. Di dalam sel-sel ini, mereka dipaksa untuk berada dalam kondisi terisolasi dalam waktu yang sangat lama tanpa kontak sosial atau fisik dengan siapa pun. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi mental mereka dan menyebabkan gangguan psikologis yang parah.

e. Perlakuan terhadap Tahanan Anak-anak

Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah penyiksaan terhadap anak-anak Palestina yang ditahan oleh Zionis. Anak-anak ini sering kali ditangkap di tengah malam, diborgol, dan dipaksa untuk menghadap interogator tanpa kehadiran orang tua atau pengacara. Banyak anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis, dipaksa untuk mengakui tuduhan yang tidak mereka lakukan, atau bahkan mengancam untuk membunuh keluarga mereka jika mereka tidak mengaku.

Praktik penyiksaan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang melarang penyiksaan terhadap tahanan perang dan pengobatan yang tidak manusiawi terhadap mereka. Pasal 3 Konvensi Jenewa I-IV mengharuskan pihak yang menduduki suatu wilayah untuk memperlakukan tahanan dengan layak, serta menjamin hak mereka untuk mendapatkan

perlindungan dan perawatan medis yang diperlukan. Namun, Israel terus melanggar prinsip-prinsip ini dengan menyiksa para tahanan Palestina, yang sering kali tidak diberikan proses hukum yang adil dan dipenjara tanpa tuduhan yang jelas atau bukti yang sah.

Meskipun banyak laporan yang mengutuk penyiksaan yang dilakukan oleh Zionis terhadap tahanan Palestina, termasuk laporan dari organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) - Badan PBB untuk Pengungsi Palestina komunitas internasional- sering kali gagal mengambil langkah nyata untuk mengakhiri praktik ini. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, sering memberikan dukungan politik dan militer yang membuat Israel merasa bebas untuk melanjutkan kebijakan ini tanpa konsekuensi yang berarti.

Namun, beberapa negara dan organisasi internasional tetap menekan Israel untuk menghentikan penyiksaan terhadap tahanan Palestina. Pengadilan Internasional juga telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan.

Penyiksaan terhadap tahanan Palestina memberikan dampak fisik dan psikologis yang sangat besar. Selain menyebabkan cedera fisik yang permanen, seperti patah tulang atau kerusakan organ internal, tahanan juga sering menderita gangguan psikologis seperti stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, dan rasa putus asa yang mendalam. Dalam banyak kasus, para tahanan yang disiksa selama bertahun-tahun menghadapinya dengan trauma yang mendalam, yang bisa memengaruhi kesejahteraan mental mereka seumur hidup.

Penyiksaan ini juga menciptakan efek jangka panjang pada keluarga para tahanan. Banyak keluarga yang menderita akibat tidak tahu nasib anggota keluarganya yang ditahan, atau mereka harus menanggung beban psikologis akibat

perlakuan buruk yang diterima oleh anggota keluarga mereka. Anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat penahanan atau kekerasan oleh Israel juga menghadapi trauma yang bisa bertahan lama.

Penyiksaan terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis adalah salah satu aspek kezaliman sistematis yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional yang melarang perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Praktik penyiksaan ini tidak hanya merusak fisik dan mental para tahanan, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama di Palestina. Meskipun ada kecaman internasional terhadap tindakan ini, penindasan terhadap para tahanan Palestina tetap berlanjut, mencerminkan ketidakadilan yang lebih besar dalam konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina.

Dalam Islam, penyiksaan terhadap tawanan atau orang yang tertawan adalah dilarang. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia, termasuk tawanan perang, harus diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Al Insan : 8)

Islam juga menegaskan bahwa setiap orang, termasuk tawanan perang, memiliki martabat yang harus dihormati. Nabi Muhammad dalam berbagai hadistnya menunjukkan pentingnya memperlakukan tawanan dengan baik. Beliau bersabda,

اَتَّقُوا اللَّهَ فِي هَؤُلَاءِ الْمَحْبُوسِينَ، فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَزَاهُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَقٌّ فَأَدَّاهُ إِلَيْهِ، فَيُطْعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ

"Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan tawanan, karena mereka adalah saudara kalian yang Allah serahkan kepada kalian. Maka siapa yang memiliki hak mereka, maka berikanlah hak mereka. Berilah mereka makanan dari

apa yang kalian makan dan pakaian dari apa yang kalian pakai. Janganlah menyiksa mereka." (HR. Muslim)

Dalam Perang Uhud, Nabi Muhammad memberi arahan agar kaum muslimin tidak menyiksa tawanan. Bahkan, dalam Perang Badar, Nabi memberikan keputusan untuk memperlakukan tawanan dengan baik dan mengizinkan mereka untuk menebus diri. Dalam sejarah Islam, banyak contoh para pemimpin Islam yang memperlakukan tawanan dengan baik. Salah satunya adalah Khalifah Umar bin Khattab yang sangat berhati-hati dalam memperlakukan tawanan perang dan selalu mengingatkan untuk tidak menyakiti mereka.

Secara keseluruhan, Islam sangat menekankan pada perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dan menentang segala bentuk penyiksaan. Penyiksaan tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dengan prinsip-prinsip moralitas yang lebih universal yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

f. Diskriminasi Pendidikan Anak-Anak Arab

Diskriminasi dalam sistem pendidikan bagi anak-anak Arab, terutama yang tinggal di wilayah Palestina yang diduduki oleh Yahudi atau yang berada di negara Yahudi, telah menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia, aktivis, dan bahkan pemerintah Palestina. Dalam konteks ini, "Zionis" mengacu pada kebijakan dan tindakan negara Yahudi yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bagian dari gerakan Zionisme, yang mendukung pendirian dan pelestarian negara Yahudi di tanah yang dianggap oleh sebagian besar orang Palestina dan negara-negara Arab sebagai wilayah yang sah untuk bangsa Palestina.

Di wilayah yang diduduki, seperti Tepi Barat dan Gaza, banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Yahudi telah membatasi akses ke beberapa area, mempengaruhi anak-anak Palestina dalam mengakses pendidikan yang memadai. Sering kali, mereka harus menghadapi kendala jarak

yang jauh, pembatasan perjalanan, dan bahkan serangan atau penghadangan di jalan oleh pasukan Zionis.

Banyak sekolah Palestina di Gaza dan Tepi Barat mengalami kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, dan akses ke teknologi. Ini juga disebabkan oleh pemblokiran dan pembatasan yang diberlakukan oleh Zionis terhadap impor barang dan material yang dibutuhkan untuk pendidikan.

Yahudi terkadang menutup sekolah-sekolah Palestina di wilayah yang diduduki, dengan alasan keamanan atau karena adanya dugaan bahwa sekolah-sekolah tersebut mendukung kegiatan politik tertentu. Dalam beberapa kasus, Yahudi telah menutup sekolah-sekolah di Jerusalem Timur, yang berisiko menghalangi pendidikan bagi ribuan anak-anak Palestina.

Di wilayah yang berada di bawah kontrol Yahudi atau di area yang terpengaruh oleh kebijakan Yahudi, ada upaya untuk memaksakan kurikulum Yahudi yang tidak mencerminkan sejarah atau identitas Palestina. Hal ini menyebabkan banyak orang tua dan aktivis Palestina merasa bahwa kurikulum tersebut berusaha menghapus identitas budaya dan sejarah Palestina dari pendidikan anak-anak mereka.

Anak-anak Arab yang tinggal di Yahudi juga mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan. Meskipun mereka merupakan warga negara Yahudi, anak-anak Arab sering menghadapi disparitas dalam kualitas pendidikan yang diberikan. Sumber daya yang lebih sedikit, ruang kelas yang padat, dan kekurangan fasilitas seringkali menjadi masalah di sekolah-sekolah Arab di Yahudi. Sering kali, sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan dana yang setara dengan sekolah-sekolah Yahudi, yang mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Dalam beberapa konflik besar, seperti Perang Gaza (misalnya, 2024), sekolah-sekolah sering menjadi sasaran serangan udara atau artileri Yahudi. Banyak sekolah yang hancur atau rusak parah, mengganggu proses belajar-

mengajar dan membahayakan keselamatan anak-anak. Dalam banyak kasus, anak-anak Palestina menjadi korban langsung dari serangan yang dilakukan selama konflik. Selain cedera fisik, mereka juga menderita trauma psikologis yang mendalam, yang mengganggu kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan.



Israel serang sekolah Al-Jaouni yang dijadikan kamp pengungsi Palestina di Gaza. Foto: EPA

Gambar 5

Sumber : metrotvnews

Sekolah-sekolah Arab di Yahudi dan wilayah Palestina yang diduduki seringkali menerima dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah Yahudi. Ini menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang sangat jelas, di mana anak-anak Arab tidak memiliki akses yang setara terhadap bahan ajar, infrastruktur yang memadai, dan teknologi pendidikan. Pemerintah Yahudi seringkali lebih memprioritaskan sumber daya untuk sekolah-sekolah di pemukiman Yahudi dan wilayah yang lebih dekat dengan komunitas Yahudi, sementara sekolah-sekolah di wilayah Arab seringkali terpinggirkan.

Beberapa pendidik dan aktivis di Palestina yang terlibat dalam pendidikan anak-anak Palestina, terutama di wilayah yang diduduki, terkadang menjadi sasaran penangkapan atau pembatasan kebebasan oleh otoritas Yahudi. Hal ini bisa menambah kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang efektif bagi anak-anak.

Ibnu Katsir (1999), dalam tafsirnya, selalu menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan, termasuk dalam hak-hak pendidikan. Ia mengutip banyak ayat yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu, tanpa terkecuali, yang harus diberikan dengan adil dan setara.

Ketika menafsirkan Surat Al Alaq ayat 1,

أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,”

Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca dan belajar, yang menandakan betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Pendidikan di sini bukan hanya tentang ilmu duniawi, tetapi juga ilmu agama yang bermanfaat bagi kehidupan umat.

Allah juga berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.” (Al Hujurat : 13)

Ibnu Katsir (1999) ketika menjelaskan ayat ini sebagai suatu seruan untuk tidak membedakan suku, bangsa, atau etnis dalam hal pendidikan dan hak-hak lainnya. Ini berarti, diskriminasi yang dialami anak-anak Palestina dalam akses pendidikan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.

Imam Ath-Thabari (2000) mengutip banyak pendapat sahabat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip dasar bahwa semua umat manusia berhak mendapatkan keadilan. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, ia menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan kesetaraan hak di hadapan Allah, yang berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Ia juga membahas pentingnya pendidikan sebagai instrumen pembebasan, yang memberikan pemahaman bahwa akses pendidikan yang adil adalah salah satu cara untuk membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakadilan.

Al-Qurthubi, seorang ulama tafsir yang lebih menekankan pada aspek hukum, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perlakuan terhadap anak-anak dan hak mereka untuk memperoleh pendidikan adalah bagian dari kewajiban masyarakat Islam. Dalam pandangannya, hak pendidikan adalah bagian dari hak hidup yang harus dijaga oleh semua pihak, dan penghalangannya adalah kezaliman yang harus diperangi. Ketika menafsirkan Surat Al Baqarah ayat 2,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,” Al-Qurthubi (2006) mengartikan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup yang harus diterima dan diajarkan kepada umat Islam. Pendidikan ini harus mencakup ilmu agama dan dunia yang seimbang, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penyampaian ilmu ini kepada siapa pun, termasuk anak-anak. juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak yang tertindas, termasuk di wilayah yang dikuasai oleh penjajah atau yang mengalami diskriminasi seperti anak-anak Palestina. Dalam pandangannya, menghalangi hak pendidikan mereka adalah kezaliman yang harus dilawan.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak setiap individu, yang harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Diskriminasi terhadap pendidikan anak-anak Palestina bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam, yang mengajarkan kesetaraan hak tanpa membedakan suku, ras, atau latar belakang sosial.

Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, terutama anak-anak Palestina yang mengalami diskriminasi dalam pendidikan mereka. Islam memerintahkan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati. Rasulullah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَٰلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika

tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kewajiban kepada kita untuk mengupayakan perubahan dan keadilan bagi anak-anak yang tertindas ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) dan historis, penelitian ini sampai pada beberapa simpulan utama sebagai berikut:

- a. Pertama, Al-Qur'an menggambarkan Bani Israil dengan pendekatan moral dan keimanan, bukan berdasarkan etnis. Kritik yang disampaikan berkaitan dengan perilaku tertentu, seperti pelanggaran perjanjian, penolakan terhadap kebenaran, dan penyimpangan ajaran. Kisah-kisah tersebut berfungsi sebagai pelajaran ('ibrah) bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- b. Kedua, konflik Palestina-Israel tidak hanya bersifat politik dan teritorial, tetapi juga memiliki latar belakang sejarah dan ideologi. Perkembangan Zionisme modern, dukungan kekuatan Barat, serta klaim historis-keagamaan atas wilayah menjadi faktor penting dalam muncul dan berlanjutnya konflik.
- c. Ketiga, penelitian ini menemukan adanya kesesuaian secara tematik antara kritik Al-Qur'an terhadap perilaku menyimpang sebagian Bani Israil dengan praktik ideologi Zionisme modern, terutama dalam aspek kekuasaan dan klaim wilayah. Namun, kritik ini ditujukan pada ideologi dan kebijakan politik, bukan pada agama atau etnis tertentu.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pertama, bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian tematik tentang Ahli Kitab dengan melibatkan tafsir-tafsir klasik lainnya seperti Tafsir al-Razi, serta melakukan

perbandingan dengan tafsir kontemporer guna melihat dinamika metodologi penafsiran dalam konteks isu-isu global modern.

- b. Kedua, bagi kalangan akademisi dan peneliti kajian Timur Tengah, disarankan untuk mengembangkan penelitian interdisipliner yang mengaitkan teks keagamaan dengan studi kolonialisme, hubungan internasional, media, dan propaganda politik. Pendekatan semacam ini penting agar konflik Palestina tidak direduksi menjadi persoalan agama semata, tetapi dipahami sebagai persoalan keadilan, kemanusiaan, dan penindasan struktural.
- c. Ketiga, bagi umat Islam dan lembaga pendidikan Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun kesadaran kritis terhadap konflik Palestina berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan pemahaman ulama Ahlus Sunnah. Pemahaman tersebut penting agar solidaritas terhadap Palestina tidak bersifat emosional semata, tetapi berlandaskan ilmu, etika, dan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.
- d. Keempat, bagi para dai, pendidik, dan aktivis dakwah, disarankan agar penyampaian isu Yahudi dan Palestina dilakukan secara proporsional dan ilmiah, dengan menekankan perbedaan antara kritik terhadap ideologi Zionisme dan generalisasi terhadap pemeluk agama Yahudi. Pendekatan ini penting untuk menjaga objektivitas dakwah serta menghindari penyimpangan dari prinsip keadilan Islam.
- e. Kelima, bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan kajian lebih mendalam mengenai peran media global, teknologi digital, dan operasi informasi dalam membentuk persepsi dunia tentang konflik Palestina-Israel, serta bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat digunakan sebagai kerangka etika dalam menghadapi perang informasi (*information warfare*) di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, A. H. ibn M. (2002). *Maalim at-Tanzil* (Vol. 1–4). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Faruqi, I. R. (1980). *Islam and Zionism*. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 145–168.
- Al-Qurtubi, M. ibn A. (2006). *Al-Jami‘ li aḥkām al-Qur’an* (Vol. 1–20). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ash-Shalih, S. (2020). Zionisme dalam perspektif Al-Qur’an: Analisis terhadap permusuhan Bani Israil terhadap kaum mukminin. *Al-Fikr Al-Islami*, 12(1), 45–67.
- Ath-Tabari, M. ibn J. (2000). *Jami‘ al-bayan ‘an ta’wil ay al-Qur’an* (Vol. 1–30). Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Finkelstein, N. G. (2003). *Image and reality of the Israel–Palestine conflict*. London: Verso.
- Finkelstein, N. G. (2012). *Knowing too much: Why the American Jewish romance with Israel is coming to an end*. New York, NY: OR Books.
- Hassan, N., & Ismail, A. (2022). *Contemporary Qur’anic discourse on Zionism and the Palestinian struggle*. *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 10(2), 89–110.
- Ibn Katsir, I. ibn ‘U. (1999). *Tafsir al-Qur’an al-‘azim* (Vol. 1–8). Riyadh: Dar Ṭayyibah.
- Khalidi, R. (2006). *The iron cage: The story of the Palestinian struggle for statehood*. Boston, MA: Beacon Press.
- Khalidi, R. (2020). *The hundred years’ war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917–2017*. New York, NY: Metropolitan Books.

- Mahmoud, R., & Al-Khatib, M. (2023). *Religious narratives and resistance: Qur'anic interpretation in the Palestinian cause*. Middle East Review of Theology and Politics, 5(1), 33–56.
- Maesuri, Y. (2022). Yahudi perspektif Al-Qur'an (Studi tafsir Al-Azhar karya Hamka). BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 4(2), 101–118.
- Masalha, N. (2012). *The Palestine Nakba: Decolonising history, narrating the subaltern, reclaiming memory*. London: Zed Books.
- Masalha, N. (2018). *Palestine: A four thousand year history*. London: Zed Books.
- Morris, B. (2004). *The birth of the Palestinian refugee problem revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morris, B. (2008). *1948: A history of the first Arab-Israeli war*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Muslim ibn al-Ḥajjaj. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nurcahyati, N., Sholeh, R., & Karim, D. A. (2021). Yahudi dalam Al-Qur'an: Analisis tematik tafsir Ibnu Katsir. Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1), 1–20.
- Pappe, I. (2004). *A history of modern Palestine: One land, two peoples*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pappe, I. (2006). *The ethnic cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications.
- Pew Research Center. (2023). *Global attitudes on Israel, Palestine, and religious narratives*. Washington, DC: Pew Research Center.
- Rogan, E. (2017). *The Arabs: A history*. London: Penguin Books.
- Rogan, E., & Shlaim, A. (Eds.). (2001). *The war for Palestine: Rewriting the history of 1948*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Said, E. W. (1979). *The question of Palestine*. New York, NY: Vintage Books.
- Said, E. W. (1993). *Culture and imperialism*. New York, NY: Knopf.
- Shlaim, A. (2001). *The iron wall: Israel and the Arab world*. London: Penguin Books.

- Suwaidan, T. A. (2017). Ensiklopedi Palestina bergambar: Pembahasan lengkap seputar sejarah Palestina sejak sebelum Islam hingga abad modern. Solo: Zamzam.
- Suwaidan, T. A. (2015). Ensiklopedi Yahudi bergambar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). (2022). *Israeli practices towards the Palestinian people and the question of apartheid*. Beirut: United Nations.
- Yusufpati, M. H. (2023). Ahl al-Kitab dalam Al-Qur'an: Kecaman terhadap Yahudi dan implikasinya. *Jurnal Kalam*, 17(1), 55–78.